



POLITIK IDENTITAS DAN IDENTITAS POLITIK



DRS. SUSWANTA., M.SI

Politik Identitas dan Identitas Politik

Drs. Suswanta., M.Si



Politik Identitas dan Identitas Politik

Penulis

Drs. Suswanta., M.Si

ISBN

978-623-8151-93-6

Editor

Diana Michel

Penata Letak

Iman Amanda Permatasari

Layout dan Desain Cover

Wendi Firnanda

Penerbit

***The Journal Publishing
Anggota IKAPI***

Iv+185 Hlm; 15 cm x 23
cmCetakan I, Mei 2024

Alamat Penerbit

***Jalan Lemahdadi, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Regency,
Special Region of Yogyakarta 55184, DIY
Contact Person 0823-2679-6566***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun
tanpa izin tertulis dari penerbit.*

KATA PENGANTAR

Buku ini membahas secara mendalam tentang fenomena politik identitas dan identitas politik, dua konsep terkait namun berbeda dalam konteks penggunaannya. Identitas politik merujuk cara individu mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik, mencakup afiliasi partai, keyakinan ideologis, dan nilai-nilai politik yang dianut. Sebaliknya, politik identitas merujuk pada penggunaan identitas sosial seperti ras, etnisitas, agama, gender, atau orientasi seksual sebagai dasar mobilisasi dukungan politik. Buku ini mengeksplorasi bagaimana politik identitas sering digunakan kelompok minoritas memperjuangkan haknya, serta bagaimana politik identitas dapat dimanipulasi oleh elit politik memperkuat kekuasaan / memperoleh dukungan massa. Dalam konteks Indonesia, dengan menemukan keseimbangan antara pengakuan identitas dan upaya mempromosikan persatuan nasional menghindari polarisasi yang merugikan.

Yogyakarta, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I POLITIK IDENTITAS DAN IDENTITAS POLITIK	1
1. Konsep dan Masalah	1
BAB II ARTI PENTING KAJIAN DAN DEFINISI	6
1. Arti Penting Kajian Politik Identitas	6
2. Pengertian Politik Identitas	6
BAB III KARAKTERISTIK CIRI DAN POLITIK IDENTITAS	
.....	30
1. Karakteristik Politik Identitas	30
2. Karakteristik Politik Identitas di Indonesia	38
3. Ciri-Ciri Politik Identitas.....	47
BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLITIK	
IDENTITAS	61
1. Faktor Mempengaruhi Politik Identitas.....	61
2. Faktor Mempengaruhi Identitas Politik.....	75
3. Faktor Yang Memunculkan Politik Identitas Pilpres 2024	85
BAB V DAMPAK POLITIK IDENTITAS	90
1. Dampak Politik Identitas Kepada Keberagaman.....	90
2. Dampak Politik Identitas Terhadap Demokrasi Indonesia	95
3. Dampak Politik Identitas Pada Pemilu 2019.....	100
4. Dampak Politik Identitas Pada Pemilu 2024.....	103
BAB VI CONTOH PENGGUNAAN IDENTITAS POLITIK DI	
INDONESIA	116

1. Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017	116
2. Politik Identitas di Manado	126
3. Politik Identitas di Maluku Utara Tahun 2018.....	138
4. Politik Identitas Pada Pilgub Sumatera Utara 2018	143
5. Politik Identitas di Kalangan Partai Politik	154
BAB VII KEBIJAKAN ANTISIPASI POLITIK IDENTITAS	
INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA	157
1. Kebijakan Antisipasi Pol Identitas Di Indonesia.....	157
2. Antisipasi Politik Identitas di Berbagai Negara	172
DAFTAR PUSTAKA.....	179

BAB I

POLITIK IDENTITAS DAN IDENTITAS POLITIK

1. Konsep Dan Masalah

Politik identitas pada dasarnya dapat dimaknai sebagai suatu tindakan individu atau kelompok dalam politik yang mengutamakan perebutan kekuasaan dengan landasan kesamaan identitas (Rif'an, 2020). Kesamaan identitas ini bisa berupa ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Dalam konteks politik, identitas menjadi alat strategis untuk membangun solidaritas dan menggalang dukungan dari kelompok memiliki kesamaan tersebut. Dengan menekankan identitas bersama, individu atau kelompok politik berusaha menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan yang kuat, yang kemudian digunakan untuk memperjuangkan kepentingan dan memperoleh kekuasaan politik (Wingarta et al., 2021).

Beberapa pakar atau ahli politik di Indonesia terlibat dalam perdebatan intens mengenai penggunaan politik identitas di dalam konteks politik nasional (Suswanta, 2018). Pandangannya terbagi, mendukung penggunaan politik identitas, sementara ada yang menolaknya. Mereka mendukung penggunaan politik identitas cenderung melihatnya sebagai strategi sah dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kelompok tertentu (Samosir & Novitasari, 2022). Berpendapat bahwa politik identitas membantu memperkuat solidaritas dalam kelompok, memberikan suara kepada yang terpinggirkan, dan memperjuangkan hak penting bagi identitasnya. Terutama negara kaya akan keragaman budaya dan agama seperti Indonesia, pengakuan terhadap identitas individu atau

kelompok menjadi bagian penting dalam memastikan inklusivitas dan keadilan dalam politik (Prasetyo et al., 2023).

Disisi lain, ada juga pandangan yang menolak penggunaan politik identitas. Mereka yang menentang politik identitas cenderung melihatnya sebagai ancaman terhadap kesatuan dan keragaman masyarakat. Mereka khawatir bahwa politik identitas bisa memperkuat perpecahan antar kelompok dan memicu konflik sosial. Selain itu, mereka berpendapat bahwa politik identitas sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik sempit, tanpa perhatikan dampaknya terhadap stabilitas dan harmoni sosial. Kekhawatiran utama dari para penolak politik identitas adalah bahwa penggunaannya di Indonesia cenderung terfokus untuk mempertahankan kekuasaan politik dan menyingkirkan pesaing politik lainnya. Ini mengakibatkan polarisasi politik yang lebih dalam dan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Penggunaan politik identitas untuk tujuan politik yang sempit dapat mengaburkan isu-isu penting yang memengaruhi semua warga negara, seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, dan Kesehatan (Renhoard, 2019). Pada akhirnya, penting bagi Indonesia untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam menggunakan politik identitas. Pengakuan terhadap identitas individu dan kelompok penting memastikan inklusivitas dan keadilan, harus diimbangi dengan upaya mempromosikan persatuan nasional dan menghindari polarisasi yang berlebihan. Pemerintah, pemimpin politik, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan beragam, di mana semua warga negara merasa dihargai dan diwakili.

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung dan kompleksitas politik yang semakin meningkat, konsep politik identitas dan identitas politik telah menjadi fokus utama dalam kajian politik modern. Masyarakat di berbagai belahan dunia semakin menyadari peran penting identitas dalam membentuk pandangan politik, perilaku pemilih, dan dinamika politik secara keseluruhan (Mujab & Irfansyah, 2020). Fenomena seperti polarisasi politik, konflik etnis dan agama, serta munculnya gerakan sosial yang didasarkan pada identitas tertentu, semakin menyoroti relevansi politik identitas dan identitas politik dalam konteks masa kini (Tayibnapis & Aladdin, 2023).

Identitas politik, pada dasarnya, merujuk pada cara individu mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik. Identitas ini meliputi afiliasi partai politik, keyakinan ideologis, dan nilai-nilai politik yang mereka anut. Seorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai liberal, misalnya, cenderung mendukung kebijakan yang bersifat progresif, sementara yang mengidentifikasi dirinya sebagai konservatif lebih condong pada nilai-nilai konservatif (Toulwala & Meo, 2023). Identitas politik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor latar belakang, seperti status sosial, pendidikan, dan pengalaman politik individu (Said, 2023).

Sementara itu, politik identitas dapat merujuk pada penggunaan identitas sosial, seperti ras, etnisitas, agama, gender atau orientasi seksual, sebagai dasar memobilisasi dukungan politik. Politik identitas sering kali digunakan oleh kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau minoritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam Masyarakat (Habibi & Suswanta, 2019). Di sisi lain, politik identitas sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak

untuk memperkuat kekuasaan politik atau memperoleh dukungan massa. Ketika identitas politik individu dan politik identitas berbenturan, ini dapat menghasilkan dinamika yang kompleks dalam politik kontemporer. Munculnya gerakan-gerakan politik yang didasarkan pada identitas tertentu (Fautanu et al., 2020).

Dalam konteks inilah buku ini hadir, dengan tujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam, wawasan yang tajam, dan pemahaman yang komprehensif tentang politik identitas dan identitas politik. Dengan menyelidiki berbagai dimensi politik identitas dan identitas politik, buku ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang dinamika politik modern dan bagaimana kita dapat menghadapinya secara efektif di masa depan. Politik identitas telah menjadi alat yang kuat dalam mobilisasi massa dan pengorganisasian politik di banyak negara. Misalnya, di Amerika Serikat, politik identitas rasial telah menjadi fitur dominan dalam politik nasional, dengan kelompok-kelompok seperti Afro-Amerika, Latinx, dan Asia-Amerika yang mengorganisir diri mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mempengaruhi proses politik (Al-Farisi, 2020).

Di beberapa negara Eropa, isu-isu identitas etnis dan agama jadi pusat perhatian dalam politik kontemporer, terutama dalam konteks imigrasi dan integrasi. Partai politik populis sering menggunakan politik identitas dalam memobilisasi pemilih dan memperkuat platform politiknya, dengan menekankan kepentingan "orang asli" dan menyalahkan kelompok minoritas atas masalah sosial dan ekonomi. Namun, dampak politik identitas tidak selalu negatif. Banyak gerakan sosial yang didasarkan

pada identitas berhasil memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kelompok yang terpinggirkan, membawa perubahan positif dalam masyarakat. Contohnya adalah gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan gerakan feminis di seluruh dunia, keduanya menggunakan politik identitas untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan.

Politik identitas memiliki dampak yang signifikan pada dinamika politik di tingkat lokal. Misalnya, di banyak negara berkembang, politik identitas etnis sering menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan partai politik dan perebutan kekuasaan. Konflik etnis yang muncul dari politik identitas dapat mengancam stabilitas politik dan perdamaian sosial dalam jangka Panjang. Sehingga timbul pertanyaan yang muncul: Bagaimana politik identitas memengaruhi konflik etnis, agama, dan gender di tingkat lokal dan global? Apa peran identitas politik dalam membentuk pandangan politik dan perilaku pemilih? Apa implikasi politik identitas terhadap integrasi sosial dalam masyarakat multikultural?

BAB II

ARTI PENTING KAJIAN DAN DEFINISI

1. Arti Penting Kajian Politik Identitas

Kajian tentang identitas politik dan politik identitas memiliki relevansi yang sangat penting dalam memahami dinamika politik kontemporer di berbagai belahan dunia. Identitas politik merujuk cara individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik, sedangkan politik identitas mengacu pada penggunaan identitas politik untuk tujuan politik tertentu. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas sosial-politik saat ini, pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep ini menjadi semakin penting dalam memahami konflik, mobilisasi politik, pembentukan kebijakan, dan dinamika sosial memengaruhi masyarakat luas (Triantoro, 2019).

Pertama-tama, penting menyadari bahwa identitas politik tidaklah statis, merupakan konstruksi sosial yang terus berubah dan berkembang seiring waktu. Identitas politik seseorang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk tidak terbatas pada agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, kelas sosial, dan afiliasi politik. Identitas tidak hanya mencerminkan bagaimana individu memahami diri mereka sendiri, tetapi juga bagaimana mereka dilihat oleh orang lain dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat di sekitar mereka (Sujito, 2022).

Dalam konteks politik identitas, konsep ini sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memobilisasi dukungan, memenangkan pemilihan, atau menggalang solidaritas politik. Misalnya, partai politik sering kali menggunakan isu-isu identitas seperti etnis, agama, atau nasionalisme untuk memperkuat basis dukungan mereka

atau untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu ekonomi atau sosial yang mungkin kurang menguntungkan bagi mereka. Penggunaan politik identitas ini dapat memicu polarisasi masyarakat dan meningkatkan ketegangan antarkelompok (Muhtadi, 2019).

Dalam banyak kasus, identitas politik juga berperan dalam membentuk preferensi politik seseorang. Misalnya, seorang individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota minoritas etnis mungkin cenderung mendukung kebijakan yang memperjuangkan hak-hak minoritas, sementara individu yang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok agama tertentu mungkin lebih mendukung kandidat atau partai yang dianggap memperjuangkan nilai-nilai agama mereka (Kusyadi et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang identitas politik individu dapat membantu dalam meramalkan perilaku pemilih dan menganalisis hasil pemilihan.

Selain itu, kajian tentang identitas politik dan politik identitas juga relevan dalam konteks konflik sosial dan politik. Identitas politik sering kali menjadi pemicu konflik antarkelompok, terutama ketika identitas tersebut digunakan oleh aktor politik atau elit untuk memperkuat kekuasaan atau mencapai tujuan politik mereka. Konflik antara kelompok etnis, agama, atau budaya sering kali dipicu oleh persaingan atas sumber daya, ketidaksetaraan ekonomi, atau ketidakadilan politik, tetapi sering kali dipicu atau diperparah oleh mobilisasi politik yang didasarkan pada identitas (Ihsan & Nurhayati, 2020).

Dalam konteks global, politik identitas juga menjadi faktor penting dalam analisis konflik internasional dan geopolitik. Negara menggunakan identitas nasional atau budaya memperkuat legitimasi mereka dan memobilisasi

dukungan domestik. Konflik antarnegara sering dipicu oleh persaingan atas identitas, wilayah, atau kepentingan politik yang mendasarkan diri pada identitas nasional atau keagamaan (Ukhra et al., 2021). Selain itu, kajian tentang identitas politik dan politik identitas juga relevan dalam konteks pembentukan kebijakan. Identitas politik individu dan kelompok dapat memengaruhi preferensi kebijakan mereka dan persepsi mereka terhadap isu-isu politik tertentu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang identitas politik membantu pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat beragam (Sulaksono et al., 2023)

Dalam beberapa kasus, identitas politik juga dapat menjadi hambatan bagi pembentukan konsensus politik atau implementasi kebijakan yang efektif. Misal, ketika isu-isu identitas seperti agama atau etnisitas menjadi pusat perdebatan politik, sering kali sulit untuk mencapai kesepakatan atau kompromi memadai antara berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang identitas politik dapat membantu dalam merancang strategi komunikasi dan negosiasi yang lebih efektif (Anam, 2019).

Selain itu, kajian tentang identitas politik dan politik identitas relevan dalam konteks pembangunan demokrasi. Identitas politik dapat memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi politik dan pengorganisasian masyarakat sipil (Bareilly et al., 2021). Kelompok yang mengidentifikasi dirinya berdasarkan identitas tertentu sering kali membentuk gerakan politik atau organisasi advokasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka atau untuk mempengaruhi kebijakan publik. Oleh karena itu,

pemahaman mendalam tentang identitas politik dapat membantu dalam merancang strategi untuk memperluas partisipasi politik dan memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam proses politik.

Secara keseluruhan, kajian tentang identitas politik dan politik identitas memiliki relevansi yang sangat penting dalam memahami dinamika politik kontemporer di berbagai belahan dunia. Identitas politik merupakan konstruksi sosial yang kompleks dan berubah-ubah yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik individu dan kelompok, sementara politik identitas sering digunakan oleh aktor politik untuk memobilisasi dukungan, memenangkan pemilihan, atau memperkuat kekuasaan mereka (Liadi & Erawati, 2020). Pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini membantu dalam merancang kebijakan yang lebih responsif, menganalisa perilaku pemilih, menganalisis konflik sosial dan politik, dan memperkuat partisipasi politik dan pembangunan demokrasi. Selain itu politik identitas dapat di jabarkan sebagai berikut:

1) Mengantisipasi kekuatan bangsa

Politik identitas di Indonesia, baik yang berbasis agama/teritorial, telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam tentang kemampuan bangsa ini dalam menjaga keutuhan negara-bangsa. Fenomena ini menggarisbawahi tantangan besar dihadapi Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang sangat kaya. Di satu sisi, politik identitas berbasis agama muncul ketika kelompok tertentu menggunakan agama sebagai dasar utama dalam partisipasi politik mereka. Hal ini seringkali terlihat dalam pemilihan umum, di mana kandidat atau partai politik menggunakan retorika agama

untuk menarik dukungan dari pemilih yang memiliki identitas agama yang sama. Fenomena ini dapat memecah belah masyarakat berdasarkan garis keagamaan, mengikis toleransi umat beragama, dan meningkatkan polarisasi sosial.

Di sisi lain, politik identitas berbasis teritorial muncul kedaerah atau wilayah tertentu memperjuangkan hak khusus atau otonomi yang lebih besar berdasarkan identitas teritorial mereka. Hal ini seringkali terjadi di daerah dengan sejarah panjang perjuangan otonomi atau konflik separatis, seperti Aceh atau Papua. Identitas teritorial ini bisa memperkuat semangat kebangsaan lokal, namun juga berpotensi mengancam integritas nasional jika tuntutan tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat.

Karakteristik yang menjadi rujukan pengertian dari negara-bangsa mencakup identitas yang tidak hanya menceritakan diri sendiri tetapi juga mencerminkan identitas kolektif yang mencakup berbagai kelompok dalam masyarakat. Negara-bangsa yang kuat adalah yang mampu mengintegrasikan berbagai identitas ini ke dalam satu narasi nasional yang inklusif. Indonesia, dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu", berusaha menciptakan identitas nasional yang mencakup keragaman etnis, budaya, dan agama. Namun, politik identitas yang berkembang menunjukkan adanya kesenjangan dalam upaya menciptakan narasi nasional yang inklusif tersebut. Ketika identitas agama / teritorial dijadikan alat politik, hal ini dapat menimbulkan eksklusivitas dan mengancam kohesi sosial. Penting bagi semua elemen bangsa untuk bekerja sama dalam menjaga persatuan dan mengelola keberagaman dengan bijak.

Masyarakat didorong untuk melihat keberagaman kekuatan, bukan ancaman. Pendidikan multikultural, dialog antaragama dan kebijakan inklusif menghargai hak-hak semua kelompok adalah beberapa langkah penting yang bisa diambil untuk meredam dampak negatif dari politik identitas. Dengan demikian, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara-bangsa yang kuat dan bersatu di tengah keberagaman yang ada.

2) Mengantisipasi Kekuatan Elit

Mengantisipasi kekuatan elit dalam konteks politik identitas merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan keadilan sosial. Politik identitas, yang merujuk pada cara-cara individu dan kelompok mendefinisikan dan mempromosikan identitas mereka berdasarkan faktor seperti etnisitas, agama, gender, dan orientasi seksual, digunakan oleh elit untuk mempertahankan kekuasaan dan mempengaruhi massa. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah melalui peningkatan pendidikan dan kesadaran publik tentang bagaimana politik identitas dapat dimanipulasi. Literasi politik yang baik akan membantu masyarakat mengenali dan mengkritisi narasi yang dibangun oleh elit. Selain transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah juga penting agar masyarakat paham bagaimana keputusan dibuat dan mengidentifikasi upaya elit memanipulasi identitas politik.

Peran media yang independen dan kritis tidak kalah pentingnya. Media harus berfungsi sebagai penjaga demokrasi yang menginformasikan publik secara objektif dan memeriksa kekuasaan elit. Keterlibatan masyarakat sipil melalui organisasi-organisasi juga dapat membantu mengimbangi kekuatan elit dengan memberikan suara

kepada kelompok yang terpinggirkan dalam diskusi politik. Penguatan lembaga demokrasi seperti parlemen, peradilan, dan badan pengawas akan memastikan adanya kontrol terhadap kekuasaan elit dan menjaga keadilan bagi semua kelompok identitas.

Selain itu, promosi identitas yang inklusif dilakukan untuk mengakui keragaman tanpa memecah-belah masyarakat. Kampanye politik juga perlu diatur agar tidak menggunakan retorika yang memecah-belah berdasarkan identitas, tetapi fokus pada isu-isu substansial dan solusi konkret. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan politik identitas dapat dikelola secara konstruktif dan tidak merugikan kohesi sosial, hingga keseimbangan kekuasaan dan keadilan sosial terjaga.

2. Pengertian Politik Identitas

1) Pengertian Politik Identitas

Politik identitas adalah sebuah konsep yang relatif baru dalam bidang kajian ilmu politik. Ia juga dikenal dengan istilah bio politik atau politik perbedaan. Konsep bio politik menekankan pada perbedaan-perbedaan yang muncul dari karakteristik tubuh manusia. Walaupun wacana tentang bio politik telah ada dalam bidang filsafat sejak lama, penerapannya dalam kajian ilmu politik mulai mendapat sorotan setelah disimposiumkan dalam sebuah pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada tahun 1994 (Khoirunnisa, 2023). Dalam konteks politik identitas, perbedaan-perbedaan yang muncul dari karakteristik fisik atau biologis individu menjadi fokus utama dalam analisis politik. Mencakup perbedaan seperti ras, etnisitas, gender, orientasi seksual, dan kondisi fisik lainnya. Konsep ini

menyoroti bagaimana perbedaan memengaruhi identitas politik seseorang dan bagaimana identitas digunakan mobilisasi dukungan politik, merumuskan kebijakan yang menguntungkan kelompok (Asshiddiq, 2024).

Simposium internasional di Wina pada tahun 1994 menjadi titik awal bagi perhatian yang lebih serius terhadap politik identitas dalam kajian ilmu politik. Pertemuan tersebut memperkenalkan konsep ini ke dalam diskusi ilmiah yang lebih luas, memicu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana politik identitas memainkan peran dalam dinamika politik lokal dan global. Sejak saat itu, politik identitas telah menjadi topik yang penting dalam kajian ilmu politik, dengan banyak peneliti dan akademisi yang memperdalam pemahaman tentang peran identitas dalam politik modern (Syarwi, 2022). Dengan demikian, politik identitas bukanlah hanya sebuah konsep baru dalam kajian ilmu politik, juga sebuah kerangka analisis berkembang pesat dalam memahami bagaimana karakteristik fisik dan biologis individu memengaruhi perilaku politik dan dinamika sosial secara lebih luas. Konsep ini terus menjadi fokus penelitian dan perdebatan dalam upaya untuk meraih pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas politik kontemporer.

Menurut Jeffrey Week, identitas adalah konsep yang berkaitan dengan rasa kepemilikan terhadap suatu kelompok atau komunitas, kesadaran akan persamaan dengan sejumlah orang dan perbedaan yang membedakan seseorang dari yang lain (Bareilly et al., 2021). Dalam pandangan Week, identitas bukanlah sekadar tentang bagaimana seseorang mengenali dirinya sendiri, tetapi tentang bagaimana individu tersebut merasa terhubung dengan orang lain dalam kelompok sama atau sejenis.

Pendapat Week menekankan pentingnya identitas dalam membentuk kedekatan sosial dan keanggotaan dalam suatu kelompok. Identitas memberikan individu rasa memiliki dan rasa solidaritas dengan komunitasnya, sementara juga menegaskan keunikan dan perbedaan yang membuat mereka unik. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya identitas baik bagi individu maupun bagi kelompok atau komunitas secara keseluruhan. Pandangan ini menggambarkan identitas sebagai fondasi dari rasa kebersamaan dan koneksi sosial, membantu membentuk jati diri individu dan memperkuat ikatan antaranggota kelompok. Dengan demikian, identitas bukan tentang bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri, tetapi tentang bagaimana mereka merasa terhubung dengan orang lain dalam sebuah jaringan hubungan yang saling mendukung dan memperkaya.

Kemudian menurut pandangan Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dipisahkan dari kesadaran akan keterikatan dengan kelompok atau komunitas tertentu. Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa identitas tidak hanya mengacu pada persamaan individu dengan orang lain, tetapi juga pada kesadaran akan perbedaan atau "keberbedaan" yang ada di luar kerangka persamaan tersebut. Dengan kata lain, identitas menciptakan rasa kebersamaan dan persamaan dengan orang lain dalam kelompok atau komunitas, ia juga secara bersamaan membentuk kesadaran akan "keberbedaan" atau "lainnya" yang berada di luar kategori-kategori persamaan tersebut. Dengan demikian, karakteristik identitas tidak hanya dipengaruhi oleh ikatan kolektif atau persamaan dengan orang lain, tetapi juga oleh kategori-kategori perbedaan yang ada. Identitas seseorang tidak hanya terbentuk oleh

kesadaran akan kesamaan dengan anggota kelompoknya, oleh pengakuan terhadap perbedaan yang membedakan mereka dari individu lainnya. Ini menunjukkan bahwa identitas merupakan konsep yang kompleks, yang melibatkan hubungan antara persamaan dan perbedaan dalam membentuk jati diri individu dan memahami hubungan mereka dengan orang lain dalam masyarakat.

Pemahaman bahwa politik identitas sebagai sumber dan alat politik dalam persaingan untuk memperoleh kekuasaan politik menjadi semakin menonjol dalam praktik politik sehari-hari. Akibatnya, para ilmuwan yang aktif dalam wacana politik identitas berusaha keras untuk merekonseptualisasikan konsep ini agar lebih mudah dimengerti dan dapat dioperasikan dengan lebih efektif. Salah satu contoh pendekatan ini adalah definisi yang diajukan oleh Agnes Heller, yang mengartikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus utamanya adalah perbedaan sebagai kategori politik yang mendasar. Pendekatan ini menyoroti bahwa dalam politik identitas, perhatian utama tertuju pada pengakuan dan penekanan terhadap perbedaan, baik itu perbedaan dalam agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, atau faktor identitas lainnya. Dalam kerangka ini, politik identitas menjadi alat memperjuangkan kepentingan dan hak kelompok yang mungkin dianggap terpinggirkan atau diabaikan dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Donald L. Horowitz, seorang pakar politik dari Universitas Duke, politik identitas dapat didefinisikan sebagai proses pemberian batasan yang jelas untuk menentukan siapa yang akan diterima dan siapa yang akan ditolak dalam suatu kelompok atau komunitas. Dalam konsep ini, garis-garis pemisahan yang ditetapkan

tampaknya tidak dapat diubah, sehingga status sebagai anggota/bukan anggota dalam kelompok tersebut menjadi terlihat sebagai sesuatu yang permanen. Pendekatan ini menyoroti bagaimana politik identitas dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat batasan-batasan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, bagaimana hal tersebut dapat mengakibatkan pembentukan kedudukan permanen dalam hubungan antarindividu dan kelompok. Menunjukkan pentingnya pemahaman tentang dinamika politik identitas dalam membentuk inklusi dan eksklusivitas dalam masyarakat, serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi struktur sosial dan politik secara lebih luas (Maulana et al., 2020).

Menurut Agnes Heller, politik identitas adalah sebuah konsep dan gerakan politik yang memusatkan perhatiannya pada perbedaan sebagai kategori utama. Secara positif, politik identitas menandakan keterbukaan dan ruang kebebasan berpikir, terutama setelah gagalnya narasi besar yang sebelumnya mencoba mengakomodasi beragam kepentingan. Politik identitas menjadi pusat perhatian dan kajian utama karena melibatkan masalah yang berkaitan dengan perbedaan, yang didasarkan pada asumsi-asumsi fisik tubuh (Mubarak, 2023).

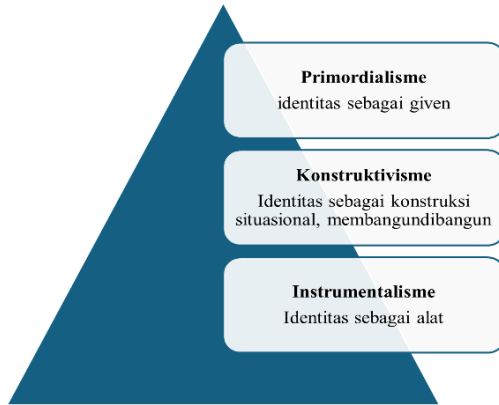
Masalah yang jadi fokus politik identitas meliputi isu-isu seperti gender, feminisme, dan maskulinisme, yang muncul dari perbedaan karakteristik fisik dan fisiologis antara pria dan wanita, serta konflik-konflik yang mungkin timbul dari perbedaan ini. Selain itu, politik identitas juga mencakup isu-isu etnis, yang sering kali melibatkan perbedaan fisik dan karakteristik antara kelompok-kelompok etnis tertentu, serta konflik-konflik yang timbul dari identitas etnis tersebut. Di samping itu,

politik identitas mencakup isu agama, kepercayaan, dan bahasa, didasarkan pada perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, dan bahasa yang digunakan.

Klaus Von Beyme menganalisis karakter Gerakan politik identitas dalam tiga tahap perkembangan:

- (1) Pertama; tahap pramodern yang terjadi perpecahan fundamental, kelompokkelompok kesukuan, dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial politik yang menyeluruh, dimana terjadi mobilisasi ideologis oleh para elite dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dari penguasa ke penguasa yang baru.
- (2) Kedua; Pada tahap modern, gerakan muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber- sumber untuk dimobilisasi, terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah sehingga peran pemimpin tidak dominan lagi dan bertujuan pada pembagian kekuasaan.
- (3) Ketiga; perkembangan postmodern, munculnya gerakan berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul berbagai macam kesempatan individual, dan tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan akhirnya. Dalam situasi negara yang terdiri dari multi identitas dan etnisitas, politik perbedaan tumbuh subur dan memicu munculnya perjuangan kelompok-kelompok terpinggirkan yang mencoba menampilkan diri dan bertahan.

Berbagai sudut pandang telah mengulas fenomena politik identitas dengan pendekatan yang berbeda-beda. Pierre Van Den Bergh (1991) dan Ubed Abdilah (2002) telah menguraikan tiga perspektif teoritis yang digunakan mempelajari politik identitas, yaitu: primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme.



Sumber: *Pierre Van Den Bergh Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*. New Delhi: Sage Publication; 1991

Gambar 1. Pembagian Paradigma Melihat Politik Identitas

Dalam pendekatan 1, pandangan primordialisme melihat fenomena agama dari sudut pandang sosio-biologis. Menurut pandangan, kelompok sosial ditandai oleh faktor-faktor seperti wilayah, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada dan tidak dapat dipertanyakan. Secara konseptual, pendekatan ini menekankan bahwa identitas etnik dan agama primordial berfungsi sebagai perekat dalam membentuk suatu komunitas. Secara definitif, pendukung primordialisme menekankan pentingnya

upaya mencapai kepentingan kolektif dan kemampuan identitas kolektif dalam merumuskan pandangan tentang masa lalu dan masa kini. Mereka juga percaya bahwa identitas kolektif dapat membentuk visi untuk masa depan. Dengan kata lain, identitas etnik dan agama dipandang sebagai faktor yang kuat dalam membentuk kesatuan dan keberlanjutan suatu komunitas, serta sebagai sumber kekuatan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pandangan primordialisme menyoroti pentingnya pengakuan terhadap akar budaya dan agama dalam membentuk identitas kolektif, serta perannya dalam mempertahankan solidaritas dan stabilitas sosial dalam suatu masyarakat. Meskipun pandangan ini menekankan pada kepentingan kolektif dan kontinuitas sejarah, namun menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana identitas primordial dapat mengatasi perubahan dan tantangan zaman yang terus berkembang.

Pendekatan primordial tegaskan bahwa kepentingan individu dalam suatu agama dimanipulasi mendukung kepentingan kelompok dan pemimpinnya, dengan tujuan memperkuat posisi agama sebagai sumber kekuatan sosial. Namun, pandangan ini tidak dapat dipertahankan secara metodologis karena membatasi interpretasi dan pemahaman tentang perubahan dalam fenomena sosial dari waktu ke waktu. Max Weber, menjelaskan etnisitas sebagai kelompok individu yang merasa memiliki keterkaitan subjektif karena kesamaan fisik, agama, atau pengalaman kolonialisme dan migrasi.

Kerangka pendekatan 2, pendekatan konstruktivis yang dikembangkan oleh Frederik Barth, identitas agama dan budaya dipandang sebagai hasil dari proses yang kompleks. Menurut teori ini, identitas tidaklah statis atau

terlepas dari konteks sosial, melainkan terus berkembang melalui pembangunan dan rekonstruksi batas-batas simbolik. Proses ini terjadi melalui penggunaan mitologi yang diperoleh melalui bahasa dan pengalaman masa lampau. Dalam kerangka konstruktivis ini, identitas agama dan budaya tidaklah sesuatu yang telah ditentukan secara inheren, tetapi merupakan konstruksi sosial yang terus berubah dan terbentuk melalui interaksi sosial. Batas-batas antara kelompok agama dan budaya tidaklah baku, melainkan didefinisikan ulang melalui interaksi antarindividu dan kelompok, melalui proses mitologis yang terus berlangsung.

Frederik Barth lebih jauh berargumentasi bahwa agama dan etnisitas mengalami perubahan terus-menerus dan bahwa batas keanggotaan suatu kelompok etnik dinegosiasikan dan dinegosiasikan kembali. Tergantung pada perjuangan politik di antara kelompok yang ada, fenomena negosiasi identitas ini sebagai situasional. Pada batas ini, para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau sosial. Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri (*self-image*) dan harga diri (*self-esteem*) baik sebagai individu maupun kelompok. Identitas-identitas akan selalu dialami, dikomunikasikan, diolah, ataupun dikonstruksi setiap individu dalam berinteraksi.

Pendekatan instrumentalisme menekankan proses manipulasi dan mobilisasi politik dalam konteks identitas etnis dan agama. Menurut pandangan ini, kelompok-kelompok sosial menggunakan atribut awal seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa sebagai dasar untuk

melakukan mobilisasi kepentingan mereka. Mereka yang menganut pandangan instrumentalis mengklaim bahwa identitas etnis dan agama sering dimanipulasi oleh elit politik dari kelompok etnis dan agama untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Pendekatan ini menyatakan bahwa identitas etnis dan agama sering dijadikan alat oleh elit politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, sering kali dengan memanipulasi persepsi dan loyalitas kelompok tersebut. Ini juga diasumsikan bahwa kelompok minoritas cenderung dimanfaatkan sebagai alat untuk keuntungan kelompok mayoritas dalam kompetisi politik. Dengan kata lain, identitas etnis dan agama sebagai sumber kekuasaan dapat dimanfaatkan dalam pertarungan politik mencapai tujuan. Dengan demikian, pendekatan instrumentalisme menyoroti peran strategis identitas etnis dan agama dalam politik, di mana identitas tersebut sering digunakan oleh elit politik sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Ini menekankan aspek-aspek manipulatif dan strategis dari penggunaan identitas etnis dan agama dalam arena politik.

Menurut Brown dalam bukunya "Ethnic Revival: Perspectives on State and Society," konsep etnisitas (termasuk agama) dapat dimanipulasi secara instrumental, tetapi pada saat yang sama, identitas etnisitas, termasuk agama, juga sering diterima secara alami atau primordial. Dalam banyak kasus, individu merasa keterikatan yang kuat terhadap identitas etnis atau agama mereka sebagai bagian dari identitas bawaan mereka. Namun, pendekatan instrumentalis sering kali mendapat kritik karena dianggap terlalu materialistik dan tidak memperhitungkan hubungan yang kompleks antara identitas primordial individu dengan etnis atau agamanya. Pendekatan ini

dianggap terlalu memusatkan perhatian pada penggunaan politis identitas etnis atau agama sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, tanpa memperhatikan nilai-nilai, makna, dan hubungan emosional yang terkait dengan identitas tersebut bagi individu dan masyarakat.

Sementara pendekatan instrumentalis memberikan pemahaman tentang bagaimana identitas etnis atau agama dimanipulasi dalam politik, kritik terhadap pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dimensi primordial dari identitas etnis/agama, yang melibatkan hubungan yang lebih dalam dan kompleks antara individu dengan identitas mereka. Ini menunjukkan kompleksitas dalam pemahaman tentang peran identitas etnis dan agama dalam politik dan masyarakat.

Meski demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa identitas primordial seringkali dimanfaatkan sebagai instrumen politik, fenomena ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena terjadi dalam berbagai konteks dan situasi politik. Dalam menghadapi kenyataan ini, sudut pandang peneliti cenderung melihat politik identitas agama sebagai sebuah proses konstruksi, sebagaimana dinyatakan oleh pandangan Frederick Barth. Menurut Barth, identitas agama merupakan hasil dari proses yang kompleks, di mana batas-batas simbolik terus dibangun dan diperkuat oleh mitologi sejarah untuk kepentingan situasional para elit politik. Dengan demikian, pandangan ini menekankan bahwa identitas agama tidaklah statis atau inheren, melainkan berkembang dan direkonstruksi melalui interaksi sosial dan politik, sering kali untuk mendukung agenda politik tertentu.

Secara konseptual, identitas politik dan "politik identitas" merupakan dua konsep yang berbeda. Identitas politik merujuk pada konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik. Ini mencakup bagaimana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks politik, bagaimana memahami dan mengartikulasikan kepentingan politik mereka.

Di sisi lain, "politik identitas" mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu identitas politik maupun identitas sosial, sebagai sumberdaya dan sarana politik. Istilah ini menyoroti bagaimana identitas, baik itu berdasarkan pada faktor politik, etnis, agama, gender, atau lainnya, digunakan dalam proses politik. Politik identitas melibatkan strategi dan taktik yang digunakan oleh aktor politik untuk memobilisasi dukungan, memenangkan pemilihan, atau mencapai tujuan politik tertentu dengan memanfaatkan identitas individu atau kelompok sebagai alat politik.

Tentang pentingnya identitas politik, seorang pakar politik, Dr. Muradi, mengatakan bahwa identitas politik adalah basis awal seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas politik. Dalam konteks Pemilihan Gubernur Jawa Barat, identitas politik yang menonjol adalah budaya dan agama. Budaya dan agama bukan hanya simbol identitas, tetapi pilar yang membentuk pandangan dunia dan prinsip-prinsip yang memengaruhi perilaku politik seseorang. Budaya mencakup tradisi lokal, adat istiadat, dan kesetiaan terhadap kelompok etnis atau daerah, sementara agama memengaruhi sikap terhadap isu-isu moral dan pandangan tentang kepemimpinan. Dengan memahami peran identitas politik ini, para pemimpin

politik dapat lebih efektif berkomunikasi dengan pemilih potensial dan merumuskan strategi kampanye yang lebih efektif. Penting bagi pemimpin politik untuk mengakui, menghormati, dan memperhatikan identitas politik yang beragam upaya mereka untuk membangun dukungan dan legitimasi politik.

Identitas politik seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk menjadi simbol politik yang bertujuan hanya untuk merebut hati publik dalam komunikasi politik. Hal ini terjadi ketika para pemimpin politik atau partai menggunakan identitas politik, seperti budaya dan agama, sebagai instrumen menciptakan kesan menguntungkan dalam pandangan publik. Mereka mungkin menekankan aspek-aspek tertentu dari identitas politik tersebut secara berlebihan atau bahkan menyalahgunakannya demi kepentingan politik mereka.

Dalam konteks ini, identitas politik bukan lagi menjadi representasi yang autentik dari nilai-nilai dan kepentingan masyarakat, tetapi lebih sebagai alat strategis untuk memanipulasi opini publik. Para pemimpin politik dapat menggunakan retorika yang bersifat emosional atau polarisasi untuk memperkuat identitas politik tertentu dan membaga masyarakat berdasarkan garis pemisah.

Pemanfaatan identitas politik sebagai alat semacam ini rugikan proses demokrasi dan mengaburkan substansi dari isu-isu politik yang seharusnya diutamakan. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial, memperdalam polarisasi, dan mengurangi ruang untuk dialog yang konstruktif. Oleh karena itu, masyarakat untuk menjadi cerdas menganalisis pesan politik yang disampaikan dan mengambil keputusan berdasarkan substansi isu serta visi jangka panjang yang lebih luas.

Manuel Castells (2003:7-8) bahwa identitas dalam politik identitas dari instusi dominan yang mengakui dan menginternalisasi kelompok tertentu melalui 22aker dan stereotip pada diri. Castells lebih lanjut mengidentifikasi konstruksi identitas melalui 3 model, yaitu:

a) Legitimizing atau legitimasi identitas

Identitas dibangun oleh institusi dominan dalam kehidupan sosial sering kali mencerminkan kekuasaan dan pengaruh institusi tersebut terhadap masyarakat. Institusi ini berupa pemerintah, organisasi keagamaan, perusahaan besar, atau media massa, berperan dalam menciptakan dan mengarahkan identitas yang diakui dan diterima masyarakat. Proses ini melibatkan penanaman nilai-nilai, norma, dan persepsi tertentu yang dianggap sesuai dengan kepentingan dan agenda institusi dominan.

Institusi dominan menunjukkan kelekatkan identitas individu atau kelompok. Misalnya, pemerintah melalui sistem pendidikan, undang-undang, dan kebijakan publik menentukan identitas nasional ditanamkan warganya. Melalui kurikulum sekolah, buku pelajaran, dan program nasionalisme, pemerintah mengarahkan pemahaman masyarakat tentang apa arti jadi warga negara yang baik, hormati simbol nasional, dan jalankan peran masyarakat.

Organisasi keagamaan memainkan peran penting dalam membentuk identitas. Mereka mendefinisikan dan mempromosikan identitas keagamaan melalui doktrin, ritus, dan tradisi. Umat beragama mematuhi ajaran dan norma yang ditetapkan pemimpin keagamaan, mencakup pandangan tentang moralitas, hubungan sosial, dan peran gender. Identitas keagamaan tidak hanya mengikat individu dalam komunitas agama tapi mempengaruhi interaksi mereka dengan kelompok lain di masyarakat.

Media massa adalah contoh lain dari institusi yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk identitas. Melalui berbagai saluran seperti televisi, radio, koran, dan internet, media massa dapat membentuk opini publik dan mengarahkan pandangan masyarakat tentang berbagai isu. Identitas kultural dan sosial sering kali diperkuat atau dibentuk oleh representasi media, melalui pemberitaan, hiburan, atau iklan. Media dapat memperkuat stereotip, menciptakan ikon budaya, dan membingkai isu-isu sosial dengan cara yang mempengaruhi bagaimana individu melihat diri mereka sendiri dan orang lain.

Perusahaan besar turut berperan dalam membentuk identitas konsumen. Melalui branding dan pemasaran, perusahaan tidak hanya menjual produk tetapi juga gaya hidup dan nilai-nilai tertentu. Kampanye iklan sering kali menyasar emosi dan aspirasi individu, membentuk identitas mereka sebagai konsumen yang terkait dengan merek. Penggunaan produk tertentu kemudian menjadi bagian dari identitas pribadi dan sosial seseorang, mencerminkan status, aspirasi, dan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial. Namun, dominasi identitas yang dilekatkan oleh institusi ini tidak selalu diterima tanpa perlawanan. Ada kala individu atau kelompok menolak identitas yang dipaksakan dan berusaha membangun identitas alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan pengalaman mereka sendiri. Proses ini bisa melibatkan perjuangan sosial dan politik yang signifikan, di mana identitas yang dipaksakan dipertanyakan dan ditantang. Gerakan sosial, kelompok minoritas, dan individu yang tertindas sering kali memainkan peran penting dalam menegosiasikan identitas mereka dan memperjuangkan pengakuan serta penghormatan terhadap identitas yang

mereka pilih. Sebagai contoh, gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada 1960-an menantang identitas rasial yang dilekatkan oleh institusi yang mendukung segregasi dan diskriminasi rasial. Melalui protes, advokasi, dan pendidikan, mereka berhasil mengubah persepsi publik dan kebijakan pemerintah, memperjuangkan identitas yang lebih inklusif dan setara.

Di era digital, media sosial telah menjadi arena baru di mana identitas dapat dinegosiasikan dan dibentuk di luar kendali institusi tradisional. Platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook memungkinkan individu untuk menyuarakan identitas mereka sendiri dan membentuk komunitas berdasarkan minat dan nilai-nilai yang mereka pilih. Di sini, identitas jadi lebih dinamis dan beragam, dengan individu yang memiliki kekuatan lebih besar untuk menentukan bagaimana mereka ingin dilihat dan dikenali oleh orang lain. Secara keseluruhan, identitas yang dibentuk oleh institusi dominan adalah refleksi dari kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Namun, individu dan kelompok memiliki agen menegosiasikan, menolak, atau mengubah identitas ini, menciptakan ruang untuk identitas yang inklusif dan beragam masyarakat.

b) Resistance identity atau resistensi identitas

Identitas dilekatkan oleh aktor sosial tertentu sering kali muncul dalam kondisi tertekan akibat dominasi yang dirasakan oleh individu/kelompok. Pemberian identitas tidak hanya penamaan/pelabelan, tetapi mencerminkan kekuatan dan kekuasaan berusaha untuk mengontrol dan menentukan bagaimana individu/kelompok dipersepsikan dalam masyarakat. Dalam situasi ini, identitas dilekatkan jadi sumber tekanan yang signifikan, memicu perlawanan dan resistensi dari mereka yang merasa tertindas.

Resistensi terhadap identitas yang dipaksakan ini sering kali memunculkan identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial lainnya. Identitas baru dibangun sebagai bentuk perlawanan dan negosiasi terhadap kekuasaan yang berusaha mendominasi. Proses ini melibatkan upaya aktif mendefinisikan diri sendiri dan kelompok berdasarkan nilai, pengalaman, dan aspirasi berbeda dari yang dilekatkan oleh kekuasaan dominan.

Anthony Coulhoun menyebut fenomena ini sebagai "politik identitas." Dalam pandangan Coulhoun, politik identitas bukan hanya tentang pengakuan identitas yang berbeda, tetapi tentang perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, hak, dan keadilan dalam konteks dominasi sosial dan politik. Politik identitas melibatkan usaha untuk menegosiasikan dan mengukuhkan identitas berusaha untuk mengatasi marginalisasi dan penindasan.

c) Project identity atau proyek identitas

Konstruksi identitas pada model ini melibatkan upaya aktif dari aktor sosial, biasanya dari kelompok tertentu, untuk membentuk identitas baru yang bertujuan mencapai posisi tertentu dalam masyarakat. Proses ini sering kali dimotivasi oleh keinginan untuk mengubah struktur sosial yang ada, yang mungkin dianggap tidak adil atau tidak mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai kelompok. Identitas yang dibentuk melalui proses ini tidak hanya mencerminkan perbedaan individu atau kelompok dari yang lain, tetapi juga menegaskan hak mereka untuk diakui, dihargai, dan diperlakukan setara dalam tatanan sosial.

Proses konstruksi identitas ini sering kali dimulai dengan pengakuan bahwa identitas yang dilekatkan oleh kekuasaan dominan tidak mencerminkan realitas dan

aspirasi kelompok terpinggirkan. Identitas lama mungkin dipaksakan oleh kelompok dominan mempertahankan status quo dan mengabaikan atau menekan perbedaan yang ada. Sebagai respons, kelompok yang terpinggirkan mulai merumuskan identitas baru yang lebih sesuai dengan pengalaman dan aspirasi mereka. Identitas baru ini sering kali lahir dari pengalaman kolektif penindasan, marginalisasi, dan perjuangan untuk keadilan.

Gerakan sosial memainkan peran penting dalam proses ini. Melalui aksi kolektif, advokasi, dan mobilisasi massa, gerakan sosial dapat menciptakan ruang untuk dialog, solidaritas, dan pengakuan identitas baru. Misalnya, gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an berhasil mengubah struktur sosial dengan menolak identitas rasial yang dipaksakan oleh sistem segregasi dan diskriminasi. Melalui protes, aksi hukum, dan pendidikan publik, gerakan ini memperjuangkan identitas rasial yang menghargai kesetaraan dan martabat manusia, gilirannya mengubah hukum dan kebijakan, meningkatkan kesadaran sosial tentang isu rasial.

BAB III

KARAKTERISTIK CIRI DAN POLITIK IDENTITAS

1. Karakteristik Politik Identitas

Selain beberapa fakta di atas, politik identitas dan politisasi agama suatu tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam konteks pemilu sekarang dan akan datang. Politik identitas mengacu pada praktik politik yang didasarkan pada karakteristik kelompok tertentu seperti etnis, agama, dan suku. Ketiga kelompok tersebut menjadi aktor yang memiliki kemampuan mempengaruhi pemilih dalam mengambil keputusan politik masing (Mubarok, 2023). Dalam konteks politik identitas, masyarakat cenderung mengidentifikasi diri dari kelompok identitas dan memilih afiliasi kelompok tersebut. Politik identitas sering muncul dalam retorika politik, strategi kampanye, dan pembentukan koalisi politik. Hal ini mempengaruhi cara pemilih dalam memilih calon dan partai politik serta memengaruhi dinamika politik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia (Adam, 2022).

Politik identitas merupakan fenomena kompleks dan multifaset, di mana identitas kelompok tertentu digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kemala Chandakirana mengungkapkan bahwa politik identitas sering kali digunakan oleh para elit politik dan penguasa sebagai retorika untuk membedakan antara "kami" sebagai orang asli dan "mereka" sebagai orang pendatang (Kiftiyah, 2019). Dalam konteks ini, identitas digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan

kekuasaan, memperoleh keuntungan ekonomi, dan memanipulasi fakta demi kepentingan tertentu. Perbedaan yang ditekankan antara kelompok asli dan pendatang tidak hanya menciptakan garis demarkasi yang tegas, tetapi berfungsi sebagai alat untuk mengkonsolidasikan dukungan politik dan mengeksploitasi sentimen etnis atau kultural demi keuntungan politik (Muhtadi, 2019).

Politik identitas bukanlah fenomena baru; sejarah mencatat berbagai contoh di mana identitas kelompok digunakan sebagai alat politik. Dalam banyak kasus, politik identitas muncul dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks, di mana kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau tidak diakui (Kusyadi et al., 2022). Ketika para pemimpin politik menyadari potensi mobilisasi melalui identitas kelompok ini, mereka mulai menggunakan retorika menekankan perbedaan antara "kami" dan "mereka". Retorika semacam ini sering kali bertujuan untuk memperkuat solidaritas internal dan memperjelas siapa yang dianggap sebagai musuh atau pihak luar. Dalam hal ini, politik identitas menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan dukungan politik dan memperkuat basis kekuasaan (Ihsan & Nurhayati, 2020).

Kemala Chandakirana menyebutkan bahwa politik identitas sering kali digunakan oleh para penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ini dapat dilihat dalam berbagai konteks pemimpin politik menggunakan narasi identitas untuk membenarkan tindakan mereka atau untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang lebih mendesak (Rozi et al., 2021). Misalnya, di beberapa negara, politik identitas digunakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi serius atau ketidakadilan sosial dengan menciptakan musuh bersama atau kambing

hitam. Dalam situasi seperti ini, penguasa menggunakan retorika identitas untuk memanipulasi opini publik dan memastikan bahwa fokus perbedaan identitas daripada isu-isu struktural yang mendasar (Margiansyah, 2019).

Selain mempertahankan kekuasaan, politik identitas juga digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam beberapa kasus, kelompok yang diidentifikasi sebagai "asli" mungkin mendapatkan akses prioritas ke sumber daya atau peluang ekonomi, sementara kelompok "pendatang" mungkin dipinggirkan atau didiskriminasi. Pola ini tidak hanya memperkuat kekuasaan politik kelompok dominan tetapi memastikan bahwa keuntungan ekonomi tetap terkonsentrasi di tangan mereka. Dalam konteks ini, politik identitas menjadi alat yang efektif mempertahankan status quo dan mencegah redistribusi kekayaan atau sumber daya (Anam, 2019).

Manipulasi fakta adalah aspek lain dari politik identitas yang sering digunakan oleh penguasa. Ketika narasi identitas digunakan memecah belah masyarakat, fakta dan realitas sering kali disesuaikan atau dipelintir untuk mendukung agenda politik tertentu. Dalam banyak kasus, sejarah atau kejadian tertentu mungkin ditekankan atau diabaikan tergantung pada bagaimana mereka dapat digunakan untuk memperkuat narasi identitas (Soenjoto, 2019). Misalnya kejadian historis kebesaran/kejayaan kelompok asli akan ditekankan, kontribusi/keberhasilan kelompok pendatang mungkin diminimalkan atau diabaikan. Manipulasi fakta semacam ini tidak hanya memperkuat perbedaan identitas tetapi juga menciptakan versi realitas yang sesuai dengan kepentingan politik penguasa (Ardipandanto, 2020).

Dampak dari politik identitas bisa sangat merusak bagi kohesi sosial dan stabilitas politik. Ketika perbedaan identitas ditekankan berlebihan, ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik antar kelompok. Dalam banyak kasus, politik identitas telah menyebabkan perpecahan sosial yang mendalam, kekerasan, dan bahkan perang saudara. Ketika kelompok yang berbeda merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil atau diabaikan, ini dapat memicu rasa ketidakpuasan dan perlawanan yang intens. Selain itu, politik identitas juga dapat memperkuat stereotip dan prasangka, pada gilirannya memperdalam jurang pemisah antar kelompok (Indrawan et al., 2023).

Untuk memahami sepenuhnya bagaimana politik identitas digunakan sebagai alat politik, penting untuk melihat contoh konkret dari berbagai negara dan konteks. Di banyak negara, politik identitas telah memainkan peran penting dalam proses pemilihan umum, di mana calon atau partai politik menggunakan retorika identitas untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, di Amerika Serikat, politik identitas sering kali muncul dalam bentuk politik ras dan etnis, kandidat politik berusaha menarik dukungan dari kelompok minoritas menjanjikan kebijakan yang menguntungkan. Di negara-negara lain, politik identitas mungkin lebih terkait dengan identitas agama, bahasa, atau regional (Widjaja et al., 2021).

Dalam kasus Indonesia, politik identitas sering kali dikaitkan dengan perbedaan etnis dan agama. Di negara yang sangat beragam ini, para pemimpin politik sering kali menggunakan identitas etnis atau agama untuk membangun basis dukungan. Misalnya, dalam pemilihan kepala daerah, kandidat mungkin menggunakan retorika

yang menekankan identitas keagamaan mereka untuk menarik dukungan dari pemilih yang seagama. Demikian pula, perbedaan etnis sering kali digunakan untuk membangun solidaritas di antara kelompok etnis tertentu dan memperkuat dukungan politik. Dalam konteks ini, politik identitas menjadi alat yang sangat kuat untuk memobilisasi dukungan dan memenangkan pemilihan (Hutapea et al., 2023).

Namun, penggunaan politik identitas sebagai alat politik tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Dalam banyak kasus, ini dapat menyebabkan polarisasi dan fragmentasi masyarakat. Ketika identitas kelompok ditekankan secara berlebihan, ini dapat menciptakan perasaan "kami versus mereka" yang mendalam, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Selain politik identitas dapat menghalangi upaya membangun solidaritas dan kerjasama antar kelompok. Ketika perbedaan identitas ditekankan, menghalangi upaya untuk menemukan kesamaan dan membangun masyarakat yang inklusif (Harsono, 2023).

Untuk mengatasi dampak negatif politik identitas, penting bagi para pemimpin politik dan masyarakat untuk bekerja menuju inklusivitas dan kerjasama. Perlu upaya untuk mengakui dan menghargai perbedaan identitas, sambil bekerja untuk membangun rasa kebersamaan dan solidaritas. Pendidikan dan dialog antar kelompok dapat memainkan peran penting dalam proses ini, membantu mengurangi prasangka dan membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok. Selain itu, kebijakan publik yang adil dan inklusif dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang sering menjadi sumber ketegangan dalam politik identitas.

Dalam kesimpulannya, politik identitas adalah alat yang sering digunakan oleh para elit politik dan penguasa mempertahankan kekuasaan, memperoleh keuntungan ekonomi, dan memanipulasi fakta. Meski politik identitas dapat menjadi alat yang efektif untuk mobilisasi politik, dampak negatifnya terhadap kohesi sosial dan stabilitas politik tidak diabaikan. Untuk membangun masyarakat inklusif dan damai, penting bagi kita untuk mengakui dan menghargai perbedaan identitas sambil juga bekerja untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mendasari politik identitas. Hanya dengan cara ini kita mengurangi dampak negatif dari politik identitas dan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Karakteristik politik identitas yang disebutkan oleh Klaus Von Beyme dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1) Membangun kembali narasi besar yang prinsipnya ditolak oleh sebagian masyarakat adalah tugas yang kompleks, terutama ketika narasi tersebut berusaha menggabungkan faktor biologis sebagai penyusun perbedaan mendasar dalam realitas kehidupan. Ketika kita berbicara tentang gerakan politik identitas yang berakar pada faktor-faktor biologis, kita menghadapi tantangan untuk mengatasi stigma dan prasangka yang telah lama melekat pada konsep-konsep ini. Gerakan politik identitas yang mengakui dan mengendalikan faktor-faktor biologis harus berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam perangkap determinisme biologis yang reduktif. Sebaliknya, gerakan ini harus memperjuangkan pemahaman yang lebih holistik tentang identitas, yang mengakui bahwa faktor-faktor biologis adalah salah satu dari banyak elemen yang membentuk

identitas individu dan kelompok. Dalam konteks ini, teori yang dibangun menjelaskan bagaimana faktor-faktor biologis berinteraksi dengan aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan untuk membentuk identitas dinamis dan beragam. Dengan demikian, gerakan politik identitas dapat menavigasi antara pengakuan atas perbedaan biologis dan perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan sosial, menciptakan narasi besar baru yang inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan yang lebih adil.

- 2) Tendensi membangun sistem apartheid sebagai strategi terbaik dalam gerakan politik identitas muncul ketika kekuasaan yang diinginkan tidak dapat dicapai melalui pembagian kekuasaan yang adil dan inklusif. Dalam situasi di mana kelompok-kelompok merasa bahwa kepentingan mereka terus-menerus diabaikan atau dipinggirkan oleh struktur kekuasaan yang ada, pemisahan dan pengecualian diri sering kali dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar yang efektif. Sistem apartheid, dengan dasar pemisahan yang ketat antara kelompok identitas, berusaha menciptakan ruang di mana kelompok yang merasa terdiskriminasi dapat memegang kendali penuh atas wilayah mereka sendiri, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Ini dilihat sebagai cara untuk melindungi identitas dan kepentingan mereka dari dominasi atau eksploitasi oleh kelompok lain. Namun, pendekatan ini tidak hanya memperdalam perpecahan sosial tetapi juga menciptakan lingkungan yang sarat dengan ketidakadilan dan ketegangan. Ketika pemisahan dan pengecualian diri menjadi norma, ini tidak

hanya menghambat komunikasi dan kerjasama antar kelompok, tetapi juga memupuk ketidakpercayaan dan kebencian yang lebih dalam. Akibatnya, upaya untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis menjadi semakin sulit, karena perbedaan identitas ditekan secara ekstrem dan dipertahankan melalui struktur-struktur yang memisahkan manusia berdasarkan kategori-kategori yang kaku dan tidak fleksibel.

- 3) Salah satu kelemahan utama dari gerakan politik identitas adalah kecenderungan untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu pengetahuan yang hanya relevan bagi kelompok tertentu dan tidak dapat diterapkan secara universal. Upaya ini sering kali bertujuan untuk memperkuat klaim identitas dan memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Namun, pendekatan ini bisa menjadi bumerang ketika teori-teori tersebut menjadi terlalu eksklusif dan terlepas dari konteks yang lebih luas. Misalnya, jika sebuah teori dikembangkan hanya berdasarkan pengalaman dan perspektif satu kelompok identitas tertentu, teori tersebut mungkin tidak memperhitungkan kompleksitas dan interkoneksi antara berbagai identitas dan struktur sosial yang lebih luas. Hal ini dapat mengakibatkan fragmentasi pengetahuan dan menghambat dialog serta kerjasama lintas kelompok. Selain itu, teori yang terlalu spesifik dapat kehilangan daya tarik dan relevansi dalam skala global, karena tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang melintasi batas-batas identitas. Akibatnya, gerakan politik identitas dapat terisolasi dan kurang efektif

dalam mengadvokasi perubahan sosial yang menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi gerakan politik identitas untuk mengembangkan teori-teori inklusif, interdisipliner, mengakomodasi keragaman pengalaman manusia dan mendukung perjuangan kolektif untuk keadilan dan kesetaraan.

2. Karakteristik politik identitas di Indonesia

Politik identitas di Indonesia memiliki akar yang dalam dan konstruksikuat, berawal dari era penjajahan hingga masa kemerdekaan. Masa penjajahan Belanda, politik identitas mulai terbentuk seiring dengan adanya pembagian kelas sosial berdasarkan ras dan etnis. Kolonialisme menciptakan stratifikasi sosial yang jelas, dengan orang Eropa di puncak hierarki, diikuti oleh kaum peranakan dan akhir pribumi. Pembagian ini memupuk kesadaran akan identitas etnis dan rasial di kalangan penduduk pribumi, kemudian menjadi fondasi penting bagi munculnya gerakan nasionalisme.

Selama penjajahan, politik identitas mulai terwujud bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Perlawanan ini tidak hanya berbentuk fisik melalui perang gerilya dan pemberontakan, tetapi juga melalui pergerakan intelektual dan kebudayaan. Para pemimpin pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir memanfaatkan konsep identitas kebangsaan untuk menyatukan berbagai suku, agama, dan kelompok etnis di Indonesia dalam perjuangan melawan penjajah. Mereka mempromosikan ide bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam latar belakang etnis dan budaya, ada kesamaan identitas sebagai bangsa yang ingin bebas dari penindasan kolonial.

Pada masa awal kemerdekaan, identitas nasional ini semakin diperkuat melalui berbagai simbol dan kebijakan negara. Bendera Merah Putih, lagu dalam kebangsaan "Indonesia Raya," dan Pancasila dasar negara, semuanya berfungsi sebagai alat untuk mengonsolidasikan identitas nasional. Pendidikan juga memainkan peran penting, di mana kurikulum sekolah mengajarkan sejarah perjuangan kemerdekaan dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. Selain itu, pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto mempromosikan konsep "Bhineka Tunggal Ika" / "Berbeda-beda tetapi tetap satu" sebagai upaya untuk menjaga persatuan di tengah keragaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia.

Namun, politik identitas di Indonesia tidak selalu berjalan mulus dan sering kali menimbulkan ketegangan. Setelah masa Orde Baru berakhir, era Reformasi membuka ruang yang lebih luas bagi ekspresi identitas kelompok. Hal ini berdampak pada munculnya kembali sentimen etnis dan agama dalam politik, yang kadang kala menyebabkan konflik. Politik identitas yang awalnya digunakan untuk menyatukan bangsa, mulai digunakan oleh sebagian elit politik untuk memecah belah dan memperoleh dukungan elektoral dari kelompok tertentu. Contohnya adalah penggunaan isu etnis dan agama dalam berbagai pemilihan umum, seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sarat dengan narasi identitas.

Di satu sisi, era Reformasi juga memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk mengekspresikan identitas mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka. Gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak perempuan, kelompok LGBT, dan masyarakat adat mendapatkan

momentum dan dukungan. Mereka menggunakan politik identitas untuk menuntut pengakuan dan perlakuan yang lebih adil dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa politik identitas bisa menjadi alat yang positif untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan.

Namun, tantangan terbesar dari politik identitas di Indonesia adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebanggaan identitas kelompok dan kebutuhan untuk mempertahankan persatuan nasional. Meskipun penting untuk mengakui dan menghormati keragaman, ada risiko bahwa penekanan berlebihan pada identitas kelompok dapat mengarah pada fragmentasi sosial dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijak dan inklusif dari pemerintah serta sikap toleransi dan dialog antar kelompok masyarakat.

Salah satu contoh kebijakan yang berusaha menjaga keseimbangan ini otonomi daerah. Dengan memberikan banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah, diharapkan setiap daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola urusan mereka sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Namun, otonomi daerah juga membawa tantangan baru, seperti potensi ketimpangan antar daerah dan munculnya kepentingan lokal yang dapat bertentangan dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus tetap berperan sebagai pengawas dan penyeimbang untuk memastikan bahwa otonomi daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan persatuan nasional.

Pendidikan tetap menjadi kunci dalam mengatasi tantangan politik identitas. Kurikulum yang mengajarkan nilai kebangsaan dan toleransi harus terus dikembangkan

dan diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia. Selain itu, program-program yang mempromosikan interaksi dan dialog antar kelompok etnis dan agama, seperti pertukaran pelajar antar daerah, membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman antar kelompok. Melalui pendidikan inklusif dan dialog yang konstruktif, generasi muda Indonesia belajar untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam membangun masa depan bangsa.

Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam mengelola politik identitas. Media massa dan media sosial harus bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi tidak memecah belah dan tidak memperburuk sentimen identitas. Pelaporan yang objektif dan berimbang dapat membantu masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang isu-isu yang dihadapi bangsa. Media juga dapat menjadi platform untuk dialog dan debat yang sehat tentang identitas dan kebangsaan, akhirnya memperkuat persatuan dan kesadaran nasional.

Pada akhirnya, politik identitas di Indonesia adalah fenomena kompleks dan dinamis. Ia memiliki potensi untuk memperkuat persatuan nasional, namun juga berisiko menimbulkan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Sejarah menunjukkan bahwa identitas nasional kuat pernah menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Namun, dalam konteks modern, identitas nasional harus terus diadaptasi dan diperkuat melalui kebijakan yang inklusif, pendidikan yang mendukung toleransi, dan media yang bertanggung jawab. Hanya dengan demikian, politik identitas dapat menjadi kekuatan positif membantu Indonesia mengatasi tantangan masa depan dan membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera bagi semua warga negaranya.

Politik identitas Indonesia pada masa penjajahan hingga kemerdekaan tidak hanya ditentukan oleh nasionalisme, tetapi juga oleh peran signifikan yang dimainkan oleh umat Islam. Sebagai mayoritas penduduk Indonesia, umat Islam tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan tetapi juga dalam membentuk identitas nasional yang kompleks dan berlapis. Islam dan nasionalisme di Indonesia telah lama berdampingan, menciptakan hubungan yang harmonis dan dinamis terus mempengaruhi politik dan masyarakat hingga saat ini.

Pada masa penjajahan, berbagai organisasi dan gerakan berbasis Islam muncul sebagai respons terhadap penindasan kolonial. Salah satu yang paling terkenal adalah Sarekat Islam (SI), yang didirikan pada tahun 1912. SI menjadi wadah bagi kaum muslim untuk menyuarakan aspirasi mereka dan memperjuangkan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Gerakan ini tidak hanya menentang penjajahan Belanda tetapi juga berusaha memperkuat identitas keislaman di tengah masyarakat yang terjajah. Selain itu, SI memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep kesadaran nasional yang menggabungkan elemen-elemen Islam dan nasionalisme.

Pemimpin-pemimpin Islam pada masa itu, seperti Haji Agus Salim dan KH Hasyim Asy'ari, adalah tokoh-tokoh yang tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan tetapi juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam gerakan nasionalis. Mereka mengedepankan bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah bagian dari jihad, merupakan kewajiban agama. Mereka juga menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara umat Islam mencapai tujuan bersama. Dalam banyak pidato dan

tulisan, nilai-nilai Islam diintegrasikan dengan semangat nasionalisme, menciptakan narasi yang kuat tentang identitas kebangsaan yang bersifat inklusif dan religius.

Selain gerakan politik, pesantren-pesantren juga menjadi pusat penting dalam perjuangan kemerdekaan. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi menyebarkan ide, nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajahan. Santri-santri yang dididik di pesantren-pesantren ini kemudian menjadi pejuang yang tangguh dalam berbagai medan pertempuran melawan kolonialisme. Mereka juga berperan aktif dalam menyebarkan semangat kebangsaan di berbagai daerah di Indonesia, memperkuat jaringan perlawanan yang berbasis pada kesatuan identitas Islam dan nasionalisme.

Ketika Indonesia akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1945, umat Islam memainkan peran penting dalam pembentukan negara baru. Piagam Jakarta, yang merupakan cikal bakal Pancasila, mencantumkan prinsip bahwa negara harus berdasar pada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun kemudian terjadi perubahan, dan prinsip disepakati dihilangkan demi mencapai konsensus nasional yang lebih inklusif, semangat dan kontribusi umat Islam dalam proses tersebut tetap diakui sebagai bagian integral dari sejarah kemerdekaan Indonesia.

Setelah kemerdekaan, hubungan antara Islam dan nasionalisme berkembang. Organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Mereka tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan tetapi juga pada pendidikan, kesehatan,

dan berbagai bidang sosial lainnya. Dengan demikian, membantu membangun fondasi masyarakat Indonesia yang berkeadilan dan beradab. NU dan Muhammadiyah aktif dalam politik, sering kali berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat serta mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif (Efendi & Suswanta, 2017).

Dalam konteks politik, partai-partai berbasis Islam seperti Masyumi masa awal kemerdekaan dan kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di era reformasi, menunjukkan bahwa umat Islam berusaha untuk mengekspresikan identitas keagamaan mereka dalam ranah politik. Partai-partai ini, meskipun memiliki agenda yang berbeda-beda, pada dasarnya berusaha untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tercermin dalam kebijakan negara. Mereka juga berupaya untuk memastikan bahwa umat Islam memiliki perwakilan yang kuat dalam pemerintahan, sehingga kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik.

Namun, perjalanan politik identitas yang melibatkan Islam di Indonesia tidak selalu mulus. Ada kalanya muncul ketegangan antara keinginan untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara lebih formal dalam tata negara dengan kebutuhan untuk mempertahankan prinsip-prinsip negara yang inklusif dan beragam seperti yang tercermin dalam Pancasila. Perdebatan sering kali mencerminkan dinamika yang kompleks antara aspirasi keagamaan dan realitas politik yang plural.

Contohnya adalah perdebatan mengenai penerapan syariat Islam di beberapa daerah, seperti Aceh memiliki status otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariat. Sementara yang melihat ini sebagai bentuk penghormatan

terhadap identitas dan aspirasi lokal, ada kekhawatiran bahwa ini bisa menimbulkan segregasi dan ketidakadilan bagi mereka yang tidak beragama Islam atau yang memiliki interpretasi yang berbeda terhadap Islam. Oleh karena itu, mencari keseimbangan antara menghormati identitas keagamaan dan menjaga prinsip inklusivitas dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks modern, hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia masih terus berkembang dan menghadapi tantangan baru. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika politik internasional membawa pengaruh baru yang dapat memperkuat/merusak harmoni yang telah terbangun. Misalnya, fenomena radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam menjadi ancaman serius yang harus dihadapi dengan bijaksana. Pemerintah, bersama dengan organisasi Islam moderat, harus bekerja sama menangani isu ini dan memastikan bahwa Islam tetap menjadi kekuatan positif dalam membangun bangsa.

Di sisi lain, gerakan Islam moderat di Indonesia juga terus berusaha untuk memperkuat identitas kebangsaan yang harmonis dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, konsep Islam Nusantara yang dipromosikan oleh Nahdlatul Ulama menekankan bahwa Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang ramah, inklusif, dan sesuai dengan budaya lokal. Ini adalah upaya untuk memperlihatkan bahwa Islam berdampingan dengan identitas nasional dan berkontribusi secara konstruktif dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Kesimpulannya, politik identitas di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh nasionalisme, tetapi juga oleh peran signifikan umat Islam. Sejarah panjang menunjukkan bahwa Islam dan nasionalisme di Indonesia telah lama

berdampingan secara harmonis, memberikan kontribusi besar bagi perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara. Meski ada tantangan dan ketegangan, integrasi antara nilai-nilai Islam dan nasionalisme tetap menjadi kekuatan utama dalam membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. Dengan dialog yang konstruktif, pendidikan inklusif, dan kebijakan yang bijak, Indonesia dapat memelihara harmoni ini dan menghadapi tantangan masa depan dengan optimisme dan kebersamaan.

Kemunculan politik identitas, dinamika politik Indonesia sangat beragam tidak terlepas dari perasaan ketidakadilan dan tuntutan persamaan hak yang dirasakan oleh kelompok sosial. Perbedaan masyarakat menjadi indikator utama keberagaman Indonesia, gilirannya buat politik identitas Indonesia mempertegas perbedaan.

Penggunaan politik identitas yang pada dasarnya bersifat budaya akan masuk ke dalam tiga wilayah publik yang menjadi arena pertarungan berbagai kepentingan kultural. *Pertama*, peran politik identitas dimanfaatkan secara optimal melalui mekanisme pemerintahan. Artinya, aspek ini, politik identitas dari suatu kelompok bisa menjadi identitas nasional suatu bangsa melalui penguasaan atas negara. Dalam konteks kenegaraan, kepentingan kelompok diatasi dengan mengandaikan bahwa identitas etnis tidak menjadi identitas yang dominan. Sisi *kedua* adalah penggunaan politik identitas di ranah agama. Wilayah ini bisa mengatasi pengaruh negara jika aspek-aspek identitas etnis dapat diatasi. Oleh karena itu, ketika politik identitas beroperasi di wilayah, kepentingan yang paling menonjol adalah kepentingan kelompok agama tersebut, tetapi mereka kehilangan ciri identitas etnisnya. Wilayah *ketiga* adalah ranah hukum, di

mana terjadi perpaduan antara ranah negara dan agama karena keduanya memiliki aturan tersendiri. Pada aspek ini, politik identitas beroperasi dengan cara membagi kekuasaan di mana identitas kelompok akan memasukkan kepentingan identitasnya secara khusus. Kemungkinan interaksi di dalam kelompok akan menjadi dasar bagi hubungan politik identitas yang dibangun dengan kuat, namun demikian, ini tidak akan terjadi jika kepentingan politik identitas etnis yang bersifat minoritas tidak diakui dengan memberikan pengakuan atas hak-haknya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan hukum secara kolektif.

3. Ciri-ciri politik identitas

Dalam evolusi politik identitas, berbagai definisi berbeda, tapi intinya menunjukkan semangat perjuangan yang serupa. Istilah "identity politics" atau "politics of identity" sering digunakan secara bergantian, keduanya mengacu pada berbagai bentuk mobilisasi politik yang didasarkan pada identitas politik yang sebelumnya diabaikan atau ditindas, baik oleh kelompok dominan dalam sistem demokrasi liberal maupun oleh agenda politik kewarganegaraan yang mengklaim dirinya lebih progresif. Ada beberapa istilah lain yang digunakan dalam semangat perjuangan yang sama dengan politik identitas, seperti politik perbedaan, politik pengakuan, dan politik multikulturalisme.

Jurgen Habermas, seorang filsuf Jerman dikenal atas kontribusinya dalam teori komunikasi dan teori kritis, memberikan pandangan yang mendalam tentang identitas politik dalam konteks masyarakat modern. Habermas menyoroti beberapa ciri khas menjadi landasan identitas

politik, pada gilirannya memengaruhi dinamika sosial dan politik suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa ciri utama identitas politik menurut Habermas:

1) Deliberatif

Konsep identitas politik menurut Jorgen Habermas, pendekatan deliberatif menjadi pijakan penting dalam pembentukan identitas politik yang kuat dan inklusif. Habermas menyoroti proses deliberatif sebagai landasan mendasari identitas politik yang sehat dalam masyarakat modern. Proses ini partisipasi aktif dan dialog rasional antara anggota masyarakat, yang membentuk identitas politik yang lebih demokratis, responsif, dan reflektif.

Secara esensial, identitas politik yang didasarkan pada pendekatan deliberatif adalah hasil dari diskusi terbuka dan dialog rasional antara anggota masyarakat.

Proses ini melibatkan pertukaran gagasan, pandangan, dan argumentasi yang masuk akal, tanpa adanya dominasi atau penindasan dari pihak otoriter. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, mendengarkan pandangan orang lain, dan bersama mencapai kesepakatan yang disepakati bersama.

Diskusi dan dialog dalam proses deliberatif ini membantu mengatasi konflik dan perbedaan pandangan dalam masyarakat. Melalui argumentasi yang masuk akal

dan pertimbangan bersama, anggota masyarakat dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik yang kompleks dan menemukan solusi yang memadai untuk masalah yang dihadapi. Proses ini juga mendorong kesadaran akan kepentingan bersama dan nilai-nilai oleh masyarakat sebagai keseluruhan.

Partisipasi aktif dalam proses deliberatif bukan hanya sekadar memberikan suara dalam pemilihan umum

atau forum publik, tetapi juga melibatkan keterlibatan langsung dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Ini memungkinkan setiap individu untuk merasa memiliki tanggung jawab terhadap pembentukan identitas politik dan arah masa depan masyarakat mereka. Selain itu, proses deliberatif juga memperkuat rasa keterhubungan dan solidaritas sosial di antara warga negara, karena mereka merasa dihargai dan didengarkan dalam proses pembentukan keputusan.

Dengan demikian, pendekatan deliberatif dalam pembentukan identitas politik menurut Habermas tidak hanya memperkuat demokrasi dan partisipasi politik, tetapi juga mendorong inklusi, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat. Ini menciptakan landasan yang kokoh bagi identitas politik responsif, adil, dan berkelanjutan, masyarakat untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dan mencapai kemajuan bersama.

2) Universalitas Normatif

Pendekatan Universalitas Normatif dalam identitas politik, dikemukakan oleh Jurgen Habermas, menegaskan pentingnya adopsi prinsip-prinsip moral dan etika bersifat universal sebagai landasan bagi kesatuan dan kemajuan masyarakat. Dalam pemahaman, identitas politik yang kuat tidak hanya didasarkan pada aspek lokal atau kepentingan kelompok, tetapi memperhatikan nilai-nilai berlaku secara universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia.

Ketika identitas politik diperkaya dengan nilai-nilai universal, masyarakat menjadi lebih mampu membentuk solidaritas sosial kuat. Solidaritas timbul dari kesadaran bersama akan prinsip moral yang mendasari kehidupan bersama. Ketika warga negara memiliki kesepahaman

kuat tentang keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia, cenderung lebih bersedia bekerja sama dan memperjuangkan kepentingan bersama.

Selain itu, adopsi nilai universal ini juga membantu mengatasi polarisasi politik seringkali memecah belah masyarakat. Ketika individu dari berbagai latar belakang dan keyakinan ideologis mengakui prinsip moral bersifat universal, perbedaan menjadi titik persatuan daripada perpecahan. Memungkinkan dialog yang lebih konstruktif dan kerja lebih efektif dalam menanggapi tantangan sosial dan politik yang kompleks.

Pengakuan akan nilai-nilai universal juga membantu membangun fondasi moral yang kokoh bagi kehidupan bersama dalam masyarakat yang multikultural. Ketika semua anggota masyarakat sepakat untuk menghormati dan menerapkan prinsip moral dalam tindakan sehari-hari, tercipta suasana yang lebih inklusif dan harmonis di antara beragam kelompok etnis, agama, dan budaya.

Pendekatan Universalitas Normatif dalam identitas politik bukan hanya tentang pengenalan nilai moral yang bersifat universal, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai ini dijadikan landasan bagi kesatuan sosial yang lebih kuat dan kemajuan bersama. Pengakuan dan penerapan prinsip moral ini dalam kehidupan politik dan sosial, masyarakat membangun fondasi yang lebih stabil untuk menjawab tantangan global dan mempromosikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua warga negara.

3) Partisipasi Demokratis

Partisipasi demokratis menjadi inti dari identitas politik yang dipahami menurut konsep Jürgen Habermas. Dalam visinya, partisipasi aktif dari seluruh warga negara merupakan fondasi krusial untuk membangun identitas

politik yang kuat dan inklusif. Ini meliputi partisipasi dalam proses politik formal seperti pemilihan umum dan pengambilan keputusan, partisipasi dalam ruang publik di mana gagasan politik dan argumen saling dipertukarkan.

Partisipasi dalam proses politik formal, seperti pemilihan umum, warga negara untuk secara langsung memengaruhi arah dan kepemimpinan negara mereka. Melalui hak pilihnya, mereka memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin mereka dan untuk memberikan suara atas kebijakan-kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Ini adalah salah satu cara paling konkret di mana warga negara dapat memanifestasikan identitas politik mereka.

Partisipasi dalam pembuatan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum maupun mekanisme lain seperti referendum atau diskusi dan debat di lembaga legislatif, memberi warga negara rasa memiliki dalam proses pembentukan kebijakan. Hal ini memperkuat kesadaran tanggung jawab bersama dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Namun, partisipasi demokratis juga melampaui proses formal ini. Ruang publik, yang mencakup berbagai forum seperti pertemuan komunitas, diskusi kelompok, atau platform online, memainkan peran penting dalam memfasilitasi partisipasi aktif warga negara. Di sini, ide-ide politik dan argumen-argumen saling dipertukarkan, memungkinkan untuk dialog dan pertukaran pandangan kritis dan inklusif. Memberikan warga negara kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, mendengarkan sudut pandang berbeda, dan bersama capai pemahaman yang lebih mendalam tentang isu politik yang kompleks.

Partisipasi demokratis, baik dalam proses formal maupun ruang publik, tidak hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban yang melekat pada kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Ini adalah cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi semua warga negara didengar dan diperhitungkan dalam bentuk kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi demokratis adalah pondasi yang penting untuk membangun identitas politik yang inklusif, responsif, dan demokratis, sesuai dengan visi Habermas masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

4) Inklusi dan Pluralisme

Identitas politik yang diperjuangkan oleh Jorgen Habermas memberikan penekanan yang kuat pada inklusi dan pluralisme prinsip utama dalam pembentukannya. Konsep ini menegaskan, mengakui dan menghargai keberagaman masyarakat, serta menerima kepentingan dan perspektif yang beragam dari berbagai kelompok sosial dan budaya. Identitas politik yang diusulkan oleh Habermas tidak hanya memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan warga negara, tetapi mempromosikan keragaman kekuatan dalam memperkaya masyarakat.

Habermas mendukung identitas politik dalam konteks inklusi untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasa diakui, dihargai, dan didengar lingkungan politik dan sosial. Tidak mempertimbangkan kepentingan mayoritas, mempertimbangkan kepentingan kelompok minoritas atau yang terpinggirkan. Identitas politik ini membuat dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang inklusif di mana setiap orang merasa memiliki tempatnya dan dihargai karena keyakinannya.

Perspektif Habermas tentang pluralisme identitas politik menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai sumber kekuatan dan kekayaan yang ada dalam masyarakat. Setiap kelompok sosial dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk identitas politik dan jalan masa depan masyarakat. Identitas politik inklusif dan pluralis memungkinkan penerimaan perspektif dan kepentingan yang berbeda, menciptakan suasana terbuka dan responsif terhadap kompleksitas realitas sosial.

Kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua warga negara merupakan prinsip dasar identitas politik yang diadvokasi oleh Habermas. Ini berarti memastikan bahwa setiap individu memiliki akses sama terhadap sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk berkembang secara penuh sebagai anggota masyarakat. Dengan cara ini, identitas politik tersebut berupaya untuk mengatasi ketimpangan dan diskriminasi yang mungkin timbul akibat perbedaan sosial, ekonomi, atau budaya.

Secara keseluruhan, Habermas mendorong identitas politik berdasarkan inklusi dan pluralisme. Identitas politik menciptakan landasan kokoh untuk masyarakat inklusif, beragam, dan berkeadilan, dengan mengakui dan menghargai keberagaman masyarakat dan mendukung kesetaraan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara. Identitas politik berfungsi sebagai dorongan membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan harmonis di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki peran yang signifikan untuk dibuat.

5) Kritis Terhadap Keberadaan

Identitas politik yang diidealisasikan oleh Jürgen Habermas tidak hanya mengacu pada partisipasi aktif dalam proses politik dan pengakuan terhadap keragaman

masyarakat, tetapi juga mencakup sikap kritis terhadap kondisi yang ada. Dalam pemikirannya, identitas politik yang kuat harus menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat menggugat ketidakadilan, ketimpangan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini menunjukkan sebuah komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokratis dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sikap kritis terhadap keadaan yang ada menandakan bahwa identitas politik yang diadvokasi oleh Habermas tidak puas dengan status quo. Sebaliknya, ia menuntut refleksi kritis terhadap sistem politik, sosial, dan ekonomi yang ada, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan serta ketimpangan yang mungkin ada di dalamnya. Ini mencerminkan sebuah aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan bagi semua anggotanya.

Dengan mengedepankan sikap kritis, identitas politik ini tidak hanya berhenti pada pemahaman akan masalah-masalah yang ada, tetapi juga memperjuangkan solusi-solusi yang konstruktif dan progresif. Melalui dialog rasional dan diskusi terbuka, warga negara yang memegang identitas politik yang kritis dapat menciptakan momentum untuk perubahan positif dalam kebijakan publik, praktik sosial, dan budaya politik keseluruhan.

Lebih dari itu, sikap kritis terhadap keadaan yang ada mencerminkan sebuah komitmen yang mendalam terhadap nilai demokratis dan kemanusiaan. Identitas politik kuat tidak hanya memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, mempertimbangkan kepentingan bersama dari seluruh masyarakat. Ini menciptakan landasan moral yang kokoh bagi gerakan perubahan yang ingin memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati,

keadilan sosial diwujudkan, dan kesempatan yang sama diberikan kepada semua individu.

Dengan demikian, sikap kritis terhadap keadaan yang ada adalah salah satu karakteristik utama dari identitas politik yang diidamkan oleh Habermas. Ini menandakan sebuah komitmen yang teguh terhadap perubahan positif dan transformasi sosial yang mengarah kepada masyarakat yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan bagi semua anggotanya.

Secara mendasar, seluruh seri istilah tersebut lebih memahami pentingnya identitas sebagai alat untuk mengungkapkan kepentingan politik. Dalam konteks ini, identitas tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang kosong dan tanpa arti, tetapi sebagai representasi dari keberadaan sebuah kelompok identitas yang perlu diakui dan dihargai. Dalam perkembangan politik identitas di dunia keilmuan, para akademisi tidak hanya mengulas fenomena politik identitas dari masa ke masa, tetapi juga menyajikan berbagai sudut pandang dan perdebatan dalam upaya memahami teori dan praktiknya. Secara umum, dua aliran pemikiran utama yang mempengaruhi diskusi politik identitas, terdiri dari esensialisme dan konstruktivisme. Kedua aliran ini telah memberikan pengaruh signifikan pada perkembangan pengetahuan di berbagai bidang, termasuk :

a) Corak Pikir Esensialisme

Esensialisme adalah salah satu aliran pemikiran kuno yang telah berkembang dalam dunia ilmiah. Akar pemikiran ini dapat ditelusuri hingga pada Plato (428-348 SM), yang mengemukakan konsep bahwa esensi suatu entitas adalah tetap, dan setiap entitas memiliki esensi berbeda dengan yang lain. Menurut Richard, pemikiran

esensialisme menganggap bahwa setiap entitas memiliki karakteristik khas dalam identitas dan fungsi mereka.

Dalam sejarah, corak pikir esensialisme membagi menjadi dua aliran utama, yaitu esensialisme klasik dan esensialisme modern. Esensialisme klasik cenderung bersifat filosofis, titik awal kemunculannya diletakkan oleh Plato. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap entitas memiliki esensi tetap dan khas yang menjadikan mereka apa adanya. Plato, misalnya, mengemukakan bahwa ide-ide atau bentuk ideal tertentu menjadi esensi dari objek-objek dunia nyata.

Di sisi lain, corak pikir esensialisme modern memperluas konsep esensi untuk mencakup fenomena dalam berbagai bidang, baik secara biologis maupun kultural. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa segala sesuatu memiliki sifat yang alami dan baku, baik itu dalam konteks biologis, seperti genetika, maupun dalam konteks kultural, seperti norma dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Esensialisme modern dengan perkembangan isu kontemporer: budaya, seksualitas, gender, dan agama yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, kedua corak pikir berpendapat bahwa perbedaan adalah yang alami dan permanen. Mereka percaya bahwa setiap entitas memiliki esensi unik, yang menentukan identitasnya. Menurut pendapat ini, identitas individu atau kelompok didasarkan pada sifat alami atau budaya yang tidak dapat diubah.

Namun, pendekatan esensialisme juga telah menjadi topik diskusi dan kritik dalam studi identitas kontemporer. Kritikus menekankan bahwa perspektif yang tidak berubah dan statis dapat mengabaikan keanekaragaman

dan dinamika pengalaman manusia. Identitas tidak hanya ditentukan oleh elemen penting, tetapi juga oleh konteks sosial, historis, dan politik yang kompleks

Konteks politik identitas, pendekatan esensialisme implikasi signifikan. Pemahaman esensialis tentang identitas memperkuat pembagian dan konflik antara kelompok, menegaskan perbedaan sebagai sesuatu tetap dan tidak dapat dirubah. Pendekatan jadi dasar bagi gerakan politik perjuangkan pengakuan dan pemeliharaan identitas kelompok terpinggirkan/terancam.

Corak pikir esensialisme, klasik maupun modern, telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang identitas individu dan kelompok. Meski demikian, untuk mengakui kompleksitas dan keragaman dalam pengalaman identitas manusia, mengakui bahwa identitas adalah konstruksi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks sosial, budaya, dan politik yang berubah. 3 ciri umum corak pikir esensialisme yaitu; (1) Setiap entitas memiliki esensi, (2) Tidak ada kontinuitas, dan (3) Ada konstansi esensi disepanjang ruang dan waktu.

Keduanya menggunakan corak pikir esensialisme sebagai sebuah pendekatan untuk memahami fenomena dan perkembangan homoseksualitas dan heteroseksualitas (esensi) dalam kehidupan masyarakat pemikiran ini diungkapkan oleh Delameter dan Shibley

b) Corak Pikir Konstruktivisme

Konstruktivisme dikenal sebagai kebalikan dari esensialisme, dengan pendekatan ini lebih memperhatikan realitas sosial yang melibatkan manusia dan institusi sosial seperti masyarakat yang saling berinteraksi secara timbal balik. Corak pemikiran ini lebih mengasumsikan

bahwa realitas yang ada dalam diri manusia hanya dapat dipahami melalui pengalaman interaksi dan relasi konstruktif dalam dunia luar. Menurut pandangan konstruktivisme, realitas dibentuk konstruksi-konstruksi manusia dalam interaksi dengan lingkungannya, seperti yang digambarkan oleh Anderson. Sehingga, pengetahuan manusia pada dasarnya merupakan hasil dari proses konstruksi terjadi dalam interaksi dengan dunia luar.

Pemikiran Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa terdapat lima asumsi yang menjadi dasar dari kerangka konstruktivisme. Pertama, pengalaman manusia tentang dunia diatur, bahwa individu mengorganisir pengalaman mereka sesuai dengan pola-pola yang telah ada sebelumnya. Kedua, bahasa menjadi basis untuk memahami dunia, karena melalui bahasa individu dapat menyampaikan dan memahami makna yang diberikan pada pengalaman mereka. Ketiga, realitas kehidupan sehari-hari dipandang sebagai milik bersama, yang berarti bahwa individu mengonstruksi realitas bersama-sama dengan individu dalam masyarakat. Keempat, terdapat tipifikasi terhadap realitas yang terinstitusionalisasi, yang mengacu pada norma-norma dan klasifikasi yang diterima secara luas dalam masyarakat. Kelima, pengetahuan dapat diinstitusionalisasi pada level masyarakat atau kelompok sosial, berarti bahwa pengetahuan individu dipengaruhi oleh struktur dan norma-norma dalam masyarakat atau kelompok sosial tempat mereka berada. Penggunaan kerangka pemikiran seperti ini secara implisit mendorong pemikiran kritis dan mendalam dalam memahami realitas, dengan mengakui peran penting interaksi sosial, bahasa, dan struktur sosial dalam pembentukan pengetahuan dan pemahaman manusia tentang dunia.

Dalam pandangan Berger, identitas manusia adalah hasil dari proses dialektika sosial yang terbentuk melalui interaksi dan proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Identitas tidaklah sesuatu yang statis atau tetap, tetapi merupakan konstruksi dinamis yang terus berubah dan berkembang seiring waktu melalui interaksi sosial. Lebih lanjut, Berger menekankan bahwa identitas dapat dipelihara, dimodifikasi, dan dibentuk kembali oleh individu melalui hubungan sosial yang mereka lakukan.

Konsep ini, identitas bukanlah sesuatu yang melekat secara bawaan pada individu, tetapi merupakan hasil dari komunikasi dan interaksi sosial. Identitas seseorang tidak hanya didasarkan pada identifikasi dari luar, misalnya label-label diberikan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok sosial tertentu, tetapi juga melibatkan proses identifikasi oleh individu itu sendiri. Identitas adalah hasil dari pergulatan antara identifikasi yang diberikan oleh orang lain dan identifikasi yang dilakukan oleh individu sendiri dalam interaksi sosial.

Proses sosial memainkan peran penting dalam pembentukan identitas, karena melalui interaksi dengan orang lain dan partisipasi dalam berbagai konteks sosial, individu mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Identitas tidaklah sesuatu yang statis atau terkunci, tetapi selalu dalam proses perubahan dan pembentukan, terutama respons terhadap interaksi dan pengalaman-pengalaman baru.

Berger menekankan bahwa konteks sosial sangat penting pembentukan identitas. Faktor internal, seperti kepribadian dan kecenderungan, dan faktor eksternal, seperti norma masyarakat, nilai-nilai budaya, dan struktur

sosial masyarakat, berkontribusi pada identitas seseorang. Akibatnya, identitas tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial di mana seseorang tinggal.

Individu terus bernegosiasi tentang identitas mereka selama proses komunikasi dan interaksi sosial. Sambil mereka terus mengubah dan membentuk identitas mereka sendiri, memilih bagaimana mereka ingin dipahami dan dikenal orang lain. Seringkali, proses ini menghasilkan konflik, ketegangan, dan perubahan yang kompleks.

Oleh karena itu, identitas manusia adalah hasil dari proses sosial yang kompleks dan dinamis yang mencakup interaksi antara individu, masyarakat, dan satu sama lain. Identitas manusia berkembang dan berubah seiring waktu melalui interaksi sosial dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, untuk memahami identitas manusia secara menyeluruh, perlu studi menyeluruh tentang dinamika sosial, budaya, dan psikologis yang membentuknya.

BAB IV

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLITIK IDENTITAS

1. Faktor Mempengaruhi Politik Identitas

Ilmuwan sosial mulai menunjukkan minat terhadap isu politik identitas pada tahun 1970-an, yang awalnya berkembang di Amerika Serikat. Pada masa itu, negara ini menghadapi berbagai masalah terkait minoritas, gender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan dan teraniaya. Seiring waktu, cakupan politik identitas meluas hingga mencakup isu-isu agama, kepercayaan, dan berbagai ikatan kultural. Di Indonesia, politik identitas lebih banyak berfokus pada masalah etnisitas, agama, ideologi, serta kepentingan-kepentingan lokal. Hal ini umumnya diwakili oleh para elit yang memiliki agenda masing-masing. Salah satu manifestasi politik identitas di Indonesia adalah gerakan pemekaran daerah. Dalam gerakan ini, isu-isu keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat penting dalam diskusi politik mereka. Namun, ada keraguan mengenai apakah motivasi gerakan-gerakan tersebut benar-benar murni memperjuangkan keadilan atau lebih dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal tampil sebagai pemimpin, yang sering kali sulit untuk dijelaskan secara jelas.

Menguat politik identitas di ranah lokal berbarengan dengan politik desentralisasi. Setelah diberlakukannya UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas terlihat. Banyak aktor politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, secara sadar memanfaatkan isu pembagian kekuasaan. Di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Irian Jaya, tampak betapa

kuatnya isu ini digunakan oleh para aktor politik saat berhadapan dengan entitas politik lain. Politisasi identitas oleh para elit lokal di empat daerah tersebut dikreasikan sedemikian rupa agar mereka yang awalnya tersingkir dari pusat kekuasaan dapat masuk dan menikmati kekuasaan. Proyek politik identitas di empat daerah tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk. Pertama, politik identitas dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka pemekaran wilayah, seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan Irian Jaya. Kedua, politik identitas dicoba untuk ditransformasi ke dalam entitas politik dengan harapan dapat menguasai pemerintahan daerah hingga terjadi pergantian pimpinan puncak, seperti yang dikatakan oleh Gerry Van Klinken (2007) sebagai elit lokal yang mengambil alih seluruh bangunan institusi politik lokal. Hal ini terjadi di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Irian Jaya. Ketiga, politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan perbedaan antara 'kami dan mereka', 'saya' dan 'kamu', hingga mencapai bentuk ekstrim seperti 'Jawa' dan 'luar Jawa', 'Islam' dan 'Kristen'.

1) Sejarah dan Tradisi

Kolonialisme memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan politik identitas di berbagai negara, khususnya wilayah yang pernah mengalami penjajahan. Melalui kebijakan *divide et impera* (memecah belah dan kuasai), kolonialisme sering kali menciptakan atau memperparah perpecahan etnis dan budaya di daerah jajahan. Para penjajah menggambarkan batas-batas wilayah administratif tanpa mempertimbangkan kondisi etnis dan budaya lokal, yang akhirnya menimbulkan konflik identitas setelah kemerdekaan. Sebagai contoh,

banyak negara Afrika yang mengalami ketegangan etnis akibat batas-batas kolonial yang tidak alami, menciptakan sumber sengketa yang bertahan lama.

Selain itu, pengaruh budaya dan bahasa kolonial sangat nyata. Penggunaan bahasa penjajah sebagai bahasa administrasi dan pendidikan sering kali meminggirkan bahasa dan budaya lokal, menciptakan lapisan identitas baru yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa dan berpendidikan dalam bahasa kolonial. Proses akulturasi mengakibatkan hilangnya tradisi lokal atau menghasilkan pencampuran budaya yang kompleks. Di bidang ekonomi, sistem kolonial menciptakan ketidaksetaraan yang tajam, dengan kelompok yang diuntungkan oleh kebijakan kolonial sering kali tetap dominan secara ekonomi setelah kemerdekaan. Kesenjangan ekonomi ini mempengaruhi identitas politik kelompok yang merasa dirugikan oleh warisan kolonialisme.

Gerakan kemerdekaan yang muncul sebagai reaksi terhadap penindasan kolonial memainkan peran dalam pembentukan identitas politik. Nasionalisme yang bangkit dari perlawanan terhadap dominasi penjajah membentuk identitas nasional kuat dan sering kali menggabungkan berbagai kelompok etnis dan budaya dalam perjuangan bersama. Ideologi-ideologi politik seperti marxisme, pan-Afrikanisme, atau pan-Asianisme, yang berkembang selama periode kolonial, menjadi dasar identitas politik di negara-negara pasca-kolonial. Selain itu, trauma kolonial dan memori kolektif tentang penindasan memainkan peran besar dalam dinamika politik identitas. Pengalaman kolonial sering kali menjadi bagian penting dari memori kolektif masyarakat, mempengaruhi narasi identitas nasional dan politik identitas. Monumen, bangunan, dan

nama tempat peninggalan kolonial sering menjadi simbol perlawanan atau kenangan pahit yang mempengaruhi kebijakan politik masa kini.

Warisan budaya dan adat istiadat juga memainkan peran penting dalam pembentukan politik identitas. Tradisi budaya dan adat istiadat lokal sering kali menjadi dasar bagi identitas kelompok, memberikan simbol-simbol dan praktik yang memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan di antara anggota kelompok tersebut. Dalam banyak kasus, budaya dan adat istiadat juga digunakan sebagai alat untuk menegaskan identitas nasional dan memperkuat perlawanan terhadap pengaruh eksternal, termasuk kolonialisme. Misal, di Indonesia, adat istiadat dan tradisi budaya: upacara adat, pakaian tradisional, dan tarian daerah menjadi simbol penting dari identitas nasional yang beragam. Praktik-praktik budaya ini tidak hanya melestarikan warisan leluhur, berfungsi sebagai pernyataan politik identitas yang menolak homogenisasi budaya global.

Dalam masyarakat pernah mengalami penjajahan, warisan budaya dan adat istiadat sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan identitas kelompok berbeda dari identitas yang dipaksakan oleh penjajah. Misalnya, di negara-negara Afrika yang pernah dijajah, adat istiadat lokal dan praktik budaya tradisional sering kali dipertahankan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi budaya penjajah. Hal ini terlihat dalam cara masyarakat menghidupkan kembali bahasa-bahasa lokal, ritual-ritual tradisional, dan sistem nilai yang telah ada sebelum kedatangan penjajah. Warisan budaya dan adat istiadat mempengaruhi politik identitas dalam konteks migrasi dan diaspora. Kelompok diaspora sering kali

mempertahankan tradisi budaya dan adat istiadat asal mereka sebagai cara untuk menjaga identitas mereka di negara baru. Hal ini tidak hanya membantu mereka mempertahankan koneksi dengan tanah air, tetapi juga menciptakan komunitas yang solid di negara tujuan.

Dengan demikian, pengaruh kolonialisme dalam pembentukan politik identitas tidak hanya berakar pada masa lalu, tetapi juga terus berlanjut dan berkembang dalam konteks politik dan sosial masyarakat pasca-kolonial. Warisan budaya dan adat istiadat dipengaruhi oleh kolonialisme sering kali menjadi alat penting dalam mempertahankan identitas nasional dan mempromosikan kebanggaan budaya. Kombinasi antara warisan kolonial dan tradisi lokal menciptakan dinamika kompleks dalam politik identitas yang terus berkembang seiring waktu. Bagaimana sejarah kolonialisme dan budaya lokal terkait membentuk identitas politik unik di berbagai negara.

Konflik dan rekonsiliasi historis mencerminkan warisan dari ketegangan dan trauma yang ditinggalkan oleh kolonialisme. Dalam upaya untuk membangun kembali masyarakat terpecah dan memulihkan harmoni, negara-negara pasca-kolonial harus mengatasi warisan pembagian etnis dan budaya diperburuk oleh penjajah. Proses rekonsiliasi sering melibatkan pengakuan atas ketidakadilan masa lalu, pemulihan identitas budaya yang terpinggirkan, dan penciptaan narasi sejarah inklusif. Mengintegrasikan warisan budaya dan adat istiadat dalam proses, masyarakat memperkuat identitas nasional yang kohesif dan mengatasi perpecahan yang diwariskan oleh masa kolonial. Menunjukkan betapa pentingnya warisan budaya dalam mengatasi konflik historis dan membangun masa depan yang lebih inklusif dan harmonis.

2) Agama dan kepercayaan

Agama memainkan peran dalam pembentukan identitas kelompok berbagai masyarakat seluruh dunia. Agama tidak menyediakan sistem kepercayaan dan praktik spiritual saja, tetapi kerangka nilai dan norma mengatur perilaku individu dan komunitas. Dalam banyak masyarakat, agama berfungsi sebagai salah satu faktor utama yang membentuk identitas sosial dan budaya kelompok. Misalnya, di India, identitas Hindu, Muslim, Sikh, dan Kristen sangat kuat dan sering kali menjadi penanda identitas sosial dan politik. Identitas keagamaan memberikan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelompok, membedakan mereka dari kelompok lain. Upacara keagamaan, ritual, dan festival menjadi momen penting yang menguatkan rasa identitas bersama dan memperkuat ikatan sosial di dalam kelompok. Pendidikan agama dan transmisi nilai-nilai keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya membantu memperkuat identitas keagamaan sebagai bagian integral dari kehidupan komunitas.

Di berbagai tempat, agama juga berfungsi sebagai identitas yang melampaui batas-batas etnis dan bahasa. Misalnya, di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar Indonesia dan Malaysia, identitas keagamaan Islam sering kali menjadi perekat sosial yang mengatasi perbedaan etnis dan bahasa di antara penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa agama dapat berfungsi sebagai identitas yang inklusif, yang memungkinkan individu dari berbagai latar belakang etnis dan budaya untuk bersatu dalam kepercayaan dan praktik yang sama. Identitas agama juga memberikan landasan moral dan etika bagi kelompok, membimbing mereka dalam mengambil

keputusan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus, hukum agama juga mempengaruhi sistem hukum dan kebijakan publik, menunjukkan sejauh mana agama dapat mempengaruhi struktur sosial dan politik suatu negara.

Namun, peran agama dalam pembentukan identitas kelompok dapat menimbulkan ketegangan antaragama, terutama ketika identitas agama digunakan sebagai alat untuk membedakan "kami" dari "mereka". Ketegangan antaragama sering kali muncul dari perbedaan doktrin, praktik, dan keyakinan mendasar, serta dari persaingan untuk sumber daya dan pengaruh politik. Sejarah penuh dengan contoh konflik antaragama, mulai dari Perang Salib antara Kristen dan Muslim pada Abad Pertengahan hingga konflik lebih modern seperti ketegangan antara Hindu dan Muslim di India. Konflik-konflik ini sering kali berakar pada perasaan tidak aman dan ancaman terhadap identitas kelompok, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh salah satu kelompok.

Ketegangan antaragama dapat diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang diskriminatif atau kurangnya perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Misalnya, Myanmar, ketegangan mayoritas Buddha dan minoritas Muslim Rohingya menyebabkan kekerasan dan pengungsian massal, sebagian besar karena kebijakan pemerintah yang mendiskriminasi kelompok Rohingya dan tidak memberikan mereka kewarganegaraan penuh. Di Timur Tengah, konflik antara Sunni dan Syiah telah berlangsung selama berabad-abad dan terus menjadi sumber ketegangan politik dan sosial yang signifikan. Ketegangan antaragama juga dapat dipicu oleh tindakan ekstremis yang menggunakan agama untuk membenarkan

kekerasan, seperti yang terlihat dalam tindakan terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti ISIS dan Al-Qaeda.

Selain konflik terbuka, ketegangan antaragama juga dapat muncul dalam bentuk diskriminasi sehari-hari dan prasangka yang mengakar. Misalnya, di beberapa negara Barat, meningkatnya Islamofobia telah menyebabkan diskriminasi terhadap komunitas Muslim, diperburuk oleh retorika politik yang mengkambinghitamkan imigran dan pengungsi Muslim. Diskriminasi semacam ini tidak hanya merusak kohesi sosial tetapi juga memperkuat identitas eksklusif dan rasa ketidakpercayaan antara kelompok agama berbeda. Oleh karena itu, mengatasi ketegangan antaragama memerlukan upaya untuk membangun dialog dan pemahaman lintas agama, kebijakan yang melindungi hak-hak semua kelompok agama dan mempromosikan keadilan sosial.

Agama digunakan sebagai alat mobilisasi politik, baik oleh pemimpin politik maupun oleh gerakan sosial. Dalam banyak kasus, agama memberikan dasar moral dan etis yang kuat untuk tindakan politik, serta kerangka naratif dapat memobilisasi dukungan massa. Misalnya, dalam perjuangan kemerdekaan India, Mahatma Gandhi menggunakan prinsip-prinsip Hindu seperti ahimsa (tanpa kekerasan) dan satyagraha (kekuatan kebenaran) untuk mobilisasi massa melawan penjajahan Inggris. Gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, pemimpin seperti Martin Luther King Jr. menggunakan ajaran Kristen tentang keadilan dan kasih sayang untuk memobilisasi dukungan terhadap penghapusan segregasi rasial.

Di banyak negara, partai politik berbasis agama memainkan peran penting dalam sistem politik. Partai-partai ini sering kali menggunakan identitas agama untuk membangun basis dukungan dan mempromosikan agenda politik mereka. Misalnya, di Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berakar pada Islamisme moderat berhasil mobilisasi dukungan luas dan menggabungkan identitas agama dan kebijakan pembangunan ekonomi. Di India, Partai Bharatiya Janata (BJP) menggunakan identitas Hindu sebagai bagian dari platform politiknya, memicu ketegangan dengan komunitas minoritas Muslim. Penggunaan agama dalam politik tidak hanya terbatas pada partai politik, tetapi juga terlihat dalam gerakan sosial dan protes massa. Misalnya, Revolusi Iran 1979 yang menggulingkan rezim Shah dipimpin oleh ulama dan didorong oleh semangat keagamaan.

Namun, penggunaan agama sebagai alat mobilisasi politik juga memiliki risiko. Ketika agama digunakan untuk tujuan politik, ada potensi penyalahgunaan dan manipulasi, yang dapat memperburuk ketegangan sosial dan konflik. Misalnya, di Nigeria, ketegangan antara kelompok Kristen dan Muslim sering kali dipolitisasi oleh elit politik untuk mendapatkan keuntungan politik, yang berujung pada kekerasan dan ketidakstabilan. Selain itu, penggunaan agama dalam politik dapat mengarah pada eksklusifitas dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, yang merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mobilisasi politik berbasis agama dilakukan dengan cara yang inklusif dan menghormati hak-hak semua kelompok agama.

Secara keseluruhan, agama memiliki peran yang kompleks dan beragam dalam pembentukan identitas kelompok, ketegangan antaragama, dan mobilisasi politik. Sementara agama menjadi sumber solidaritas dan kekuatan moral, ia juga dapat menimbulkan konflik dan ketegangan ketika digunakan untuk membedakan dan mempolarisasi kelompok. Oleh karena itu, penting untuk mengakui dan memahami peran agama dalam dinamika sosial dan politik, serta bekerja menuju masyarakat yang menghormati dan merangkul keragaman agama.

Mempromosikan dialog antar agama, melindungi hak kelompok dan penggunaan agama dalam politik tidak mengarah pada diskriminasi atau kekerasan, menciptakan lingkungan di mana agama berfungsi sebagai sumber persatuan dan kekuatan positif anggota masyarakat.

3) Etnisitas dan Kedaerahan

Identitas etnis dan perbedaan budaya memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial dan politik berbagai negara. Identitas etnis didasarkan pada faktor seperti asal usul leluhur, bahasa, adat istiadat, dan praktik budaya. Identitas memberikan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelompok etnis, serta membedakan mereka dari kelompok lain. Misal, di Indonesia, suku Jawa, Sunda, Batak, dan Minangkabau memiliki identitas etnis kuat dengan budaya, bahasa, dan adat istiadat unik. Identitas etnis tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari, memainkan peran dalam politik dan pembangunan ekonomi. Perbedaan budaya di antara kelompok etnis dapat memperkaya warisan budaya suatu negara, namun juga dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan baik.

Pentingnya identitas etnis dan perbedaan budaya terlihat berbagai aspek kehidupan meliputi: pendidikan, sistem hukum, dan hubungan antar-komunitas. Pendidikan sering kali menjadi arena di mana identitas etnis dipertahankan dan dilestarikan, misalnya melalui pengajaran bahasa ibu dan sejarah lokal. Sistem hukum beberapa negara mencerminkan keragaman etnis dengan mengakui hukum adat atau tradisi. Hubungan antar-komunitas harmonis ketika saling penghormatan dan pengakuan terhadap perbedaan, tetapi dapat menjadi tegang jika diskriminasi atau ketidaksetaraan. Misalnya, di negara seperti Rwanda, perbedaan etnis antara Hutu dan Tutsi telah menjadi sumber konflik berdarah yang memerlukan upaya rekonsiliasi panjang dan kompleks.

Perbedaan budaya juga mempengaruhi dinamika politik di tingkat nasional dan regional. Misalnya, di Spanyol, identitas etnis dan budaya Basque dan Catalan telah mempengaruhi tuntutan untuk otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan. Perbedaan budaya sering kali diiringi oleh perbedaan dalam aspirasi politik dan ekonomi, memperkuat tuntutan untuk pengakuan dan hak-hak yang besar. Ini menunjukkan bahwa perbedaan etnis dan budaya tidak merupakan soal identitas sosial tetapi berkaitan erat dengan kekuasaan dan sumber daya.

Regionalisme dan tuntutan untuk otonomi daerah sering kali muncul sebagai respons terhadap perbedaan etnis dan budaya. Regionalisme mengacu pada loyalitas dan identifikasi yang kuat dengan wilayah atau daerah tertentu, sering kali berdasarkan kesamaan etnis, budaya, atau sejarah. Di banyak negara, regionalisme menjadi kekuatan penting dalam politik lokal dan nasional. Misalnya, di Spanyol, kawasan seperti Catalonia dan

Basque memiliki identitas regional yang kuat dan telah lama menuntut otonomi yang besar dari pemerintah pusat. Tuntutan ini didasarkan pada keinginan untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk pendidikan, budaya, dan kebijakan ekonomi, sesuai karakteristik lokal.

Otonomi daerah adalah cara untuk mengakomodasi tuntutan regionalisme dan mengurangi ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah lokal diberikan kekuasaan untuk mengatur urusan tertentu tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat. Ini memungkinkan daerah untuk merespons kebutuhan dan aspirasi lokal dengan lebih efektif. Misal, di Indonesia, penerapan otonomi daerah setelah reformasi 1998 telah memberikan provinsi dan kabupaten/kota kekuasaan lebih besar untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dan mengambil keputusan yang relevan dengan kondisi lokal. Otonomi daerah mendorong partisipasi politik luas dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah lokal.

Namun, otonomi daerah juga dapat menimbulkan tantangan, jika tidak diimbangi dengan mekanisme yang efektif untuk mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tantangan utama adalah potensi ketidaksetaraan antara daerah kaya dan miskin. Daerah kaya sumber daya alam atau memiliki ekonomi yang maju mungkin mendapatkan manfaat lebih besar dari otonomi daerah dibandingkan dengan daerah kurang berkembang. Memperburuk ketidaksetaraan regional dan menimbulkan ketegangan baru. Selain itu, otonomi daerah juga bisa disalahgunakan oleh elit lokal memperkuat kekuasaan mereka sendiri, dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.

Konflik etnis adalah salah satu manifestasi paling serius dari ketegangan yang disebabkan oleh identitas etnis dan perbedaan budaya. Konflik etnis dapat terjadi ketika kelompok-kelompok etnis merasa terancam atau tidak adil diperlakukan oleh kelompok lain atau oleh pemerintah. Faktor seperti diskriminasi, marginalisasi, ketidaksetaraan ekonomi, dan perebutan sumber daya sering kali menjadi pemicu konflik. Misalnya, di Rwanda, ketegangan etnis antara Hutu dan Tutsi yang dipicu oleh ketidakadilan dan diskriminasi yang sudah berlangsung lama, mencapai puncaknya dalam genosida tahun 1994 menewaskan ratusan ribu orang Tutsi dan Hutu moderat.

Resolusi konflik etnis memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah mengakui dan memahami akar penyebab konflik. Ini sering kali melibatkan dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk membangun kepercayaan dan mencari solusi yang adil. Misal, di Afrika Selatan, proses rekonsiliasi pasca-apartheid melibatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan mempromosikan rekonsiliasi antara kelompok berbeda. Pengakuan atas ketidakadilan masa lalu dan komitmen untuk memperbaikinya adalah langkah dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan inklusif dan pemerintahan yang adil sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik etnis. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kelompok etnis memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan, serta perlindungan yang sama di bawah hukum. Pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan penghormatan

terhadap perbedaan budaya dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi. Di Bosnia dan Herzegovina, perjanjian perdamaian Dayton mengakhiri perang etnis pada tahun 1995 dan membentuk kerangka pemerintahan yang mencerminkan keragaman etnis di negara tersebut, meskipun tantangan masih ada dalam mempromosikan kohesi sosial dan integrasi nasional.

Pengembangan ekonomi merata merupakan bagian dari resolusi konflik etnis. Ketidaksetaraan ekonomi sering kali menjadi sumber ketegangan yang signifikan antara kelompok etnis. Mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, pemerintah dapat mengurangi ketegangan ini dan mendorong stabilitas sosial. Misalnya, program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah-daerah yang tertinggal membantu mengurangi perasaan ketidakadilan dan marginalisasi. Program ini harus dilaksanakan dengan cara yang menghormati dan melibatkan komunitas lokal, sehingga merasa memiliki dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Keterkaitan antar identitas etnis, perbedaan budaya, regionalisme, otonomi daerah, dan konflik etnis menunjukkan betapa kompleks dan terkait isu dalam dinamika sosial dan politik suatu negara. Setiap aspek mempengaruhi yang lain dan memerlukan pendekatan yang holistik untuk dikelola dengan efektif. Misalnya, pengakuan dan penghargaan terhadap identitas etnis dan budaya bantu mengurangi ketegangan dan mendorong otonomi daerah yang inklusif. Sebaliknya, kebijakan mengabaikan atau mendiskriminasi kelompok etnis tertentu dapat memicu regionalisme yang memecah belah dan konflik etnis.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama menciptakan lingkungan mendukung keragaman dan inklusi, dengan menghormati hak-hak semua kelompok etnis dan budaya. Ini memerlukan kebijakan yang adil, pemerintahan yang transparan, serta partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat dalam proses politik dan pembangunan. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat damai, adil, dan sejahtera, di mana perbedaan etnis dan budaya bukan menjadi sumber konflik, tetapi menjadi kekuatan memperkaya kehidupan bersama.

2. Faktor Mempengaruhi Identitas Politik

Identitas politik merupakan aspek mendasar yang melekat pada setiap individu, mencakup berbagai elemen yang membentuk keberadaan dan persepsi diri seseorang dalam masyarakat. Mahfud menjelaskan bahwa identitas politik dapat dilihat sebagai bentuk identitas primordial, yaitu identitas yang bersifat fundamental dan terbentuk dari sejak lahir. Salah satu contoh dari identitas ini adalah identitas agama, di mana individu-individu dapat dikenal berdasarkan agama yang mereka anut, seperti Islam, Kristen, atau Katolik. Identitas agama ini tidak hanya menentukan cara seseorang beribadah, tetapi juga sering kali mempengaruhi nilai-nilai, etika, dan pandangan hidup mereka.

Selain identitas agama, terdapat pula identitas suku yang membedakan kelompok-kelompok etnis dalam suatu negara. Di Indonesia, misalnya, terdapat berbagai suku bangsa seperti Madura, Jawa, Bugis, Batak, dan lain-lain. Setiap suku memiliki tradisi, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang khas, yang membentuk keragaman budaya bangsa Indonesia. Identitas ras juga merupakan

komponen penting dari identitas politik. Di Indonesia, ada warga dari berbagai latar belakang etnis, termasuk Melayu, Cina, Arab, dan lainnya. Identitas ras ini sering kali berkaitan dengan ciri-ciri fisik dan warisan budaya tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Pemahaman akan identitas politik ini penting dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana keberagaman dianggap sebagai aset sekaligus tantangan. Mengakui dan menghargai identitas primordial yang berbeda-beda ini dapat memperkuat solidaritas sosial dan mencegah konflik yang berbasis pada perbedaan identitas. Oleh karena itu, kesadaran dan pengelolaan identitas politik yang bijaksana merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Identitas politik memainkan peran kunci dalam strategi politik. Identitas politik sering kali menjadi dasar dari strategi komunikasi politik, di mana politisi atau kelompok politik membangun pesan dan citra mereka berdasarkan identitas yang mereka anut. Sebagai contoh, seorang politisi dengan identitas politik yang kuat sebagai pendukung keadilan sosial mungkin akan fokus pada isu kesejahteraan sosial dan kesetaraan komunikasinya. Makan dapat disimpulkan bahwa Identitas politik adalah konsep yang merujuk pada cara individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks politik. Identitas politik mencakup berbagai aspek, termasuk keyakinan politik, afiliasi partai, ideologi, dan kesetiaan kepada kelompok atau komunitas tertentu. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti etnisitas, agama, gender, kelas sosial, dan pengalaman pribadi. Beberapa elemen identitas politik meliputi:

1. Afiliasi politik :

Identitas politik merupakan aspek kehidupan sosial yang mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok memahami, merespons, dan berinteraksi dengan dinamika politik. Salah satu elemen kunci dalam identitas politik adalah afiliasi politik. Afiliasi politik adalah hubungan individu dengan partai politik atau gerakan tertentu yang mencerminkan keterlibatan dan partisipasi mereka dalam proses politik. Ini bukan hanya tentang keanggotaan formal dalam partai politik, tetapi mencakup dukungan untuk kandidat tertentu, isu-isu spesifik, dan loyalitas terhadap ideologi politik. Melalui eksplorasi mendalam, kita akan memahami betapa pentingnya afiliasi politik membentuk identitas politik dan bagaimana berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis berkontribusi pada fenomena ini.

Keanggotaan formal dalam partai politik adalah salah satu bentuk afiliasi politik yang paling jelas dan terstruktur. Individu yang menjadi anggota partai politik secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan partai, termasuk menghadiri pertemuan, berpartisipasi dalam kampanye, dan dalam beberapa kasus, mencalonkan diri jabatan politik. Keanggotaan ini sering kali membutuhkan komitmen waktu, energi, dan sumber daya signifikan. Anggota partai terlibat dalam proses pengambilan keputusan internal partai, membantu pengembangan kebijakan, dan berpartisipasi dalam pemilihan kandidat.

Keanggotaan dalam partai politik tidak hanya memberikan individu rasa memiliki dalam konteks politik, tetapi menawarkan platform untuk mempengaruhi kebijakan dan arah partai. Ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana partai mendapat

dukungan dan sumber daya dari anggotanya, sementara anggota mendapatkan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan dan agenda politik. Keanggotaan ini juga sering kali mengikat individu dengan jaringan sosial yang luas, memberikan dukungan sosial dan akses ke informasi dan kesempatan yang mungkin tidak tersedia bagi mereka yang tidak terlibat secara formal dalam partai politik.

Afiliasi politik tidak memerlukan keanggotaan formal partai politik. Individu menunjukkan afiliasi politik mereka melalui dukungan untuk kandidat tertentu atau isu-isu spesifik. Dukungan ini bisa berupa partisipasi dalam kampanye, menyumbangkan dana atau hanya memberikan suara pemilu. Dukungan untuk kandidat sering kali mencerminkan keselarasan dengan visi, misi, dan kebijakan yang diusung oleh kandidat tersebut. Ini mencerminkan harapan dan aspirasi individu terhadap perubahan sosial dan politik yang ingin terlihat terwujud.

Dukungan untuk isu-isu tertentu juga merupakan bentuk afiliasi politik yang signifikan. Individu yang merasa kuat tentang isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, kesehatan atau pendidikan mengidentifikasi diri mereka dengan gerakan atau organisasi yang mendukung isu-isu tersebut. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada masalah-masalah yang paling penting bagi mereka, tanpa harus terikat dengan struktur formal partai politik. Dukungan ini terwujud dalam bentuk aktivisme, petisi, kampanye sosial, dan bentuk partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan opini publik.

Loyalitas terhadap ideologi politik adalah aspek lain dari afiliasi politik yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik. Ideologi politik adalah sekumpulan keyakinan dan nilai yang mempengaruhi

pandangan orang tentang bagaimana masyarakat harus diorganisir dan bagaimana masalah sosial dan politik harus diselesaikan. Ideologi politik bisa bersifat liberal, konservatif, sosialis, berbagai variasi lain. Loyalitas terhadap ideologi politik mencerminkan komitmen individu terhadap prinsip dan nilai tersebut.

Individu yang memiliki loyalitas kuat terhadap ideologi politik tertentu menunjukkan konsistensi dalam pandangan dan perilaku politik. Mereka cenderung mendukung kebijakan dan kandidat yang sejalan dengan ideologi mereka dan menolak yang tidak. Loyalitas ini terlihat dalam cara mereka mendiskusikan isu-isu politik, memilih kebijakan yang mereka dukung, dan dalam identitas diri sebagai anggota partai atau pendukung gerakan. Loyalitas ideologis tidak hanya membentuk pandangan politik individu tetapi juga mempengaruhi cara mereka memahami dan merespons peristiwa politik dan sosial.

Identitas politik dan afiliasi politik tidak terbentuk dalam ruang hampa; mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Faktor meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, serta pengalaman hidup individu. Misal, individu yang tumbuh dalam keluarga yang aktif secara politik cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dan afiliasi politik yang lebih kuat. Pendidikan memainkan peran penting, dengan individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terlibat dalam politik dan memiliki pandangan lebih kritis terhadap isu-isu politik.

Budaya juga mempengaruhi afiliasi politik. Nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan identitas kelompok memainkan peran penting dalam membentuk pandangan

politik individu. Misal, di banyak masyarakat, identitas etnis dan agama sangat terkait dengan afiliasi politik. Kelompok etnis dan agama tertentu mungkin memiliki afiliasi politik yang kuat dengan partai atau gerakan yang mendukung kepentingan. Faktor menciptakan kerangka sosial mempengaruhi bagaimana individu memahami dan merespons dinamika politik.

Media massa dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan afiliasi politik. Media massa, seperti surat kabar, televisi, dan radio, memberikan informasi yang membantu individu membentuk pandangan mereka tentang isu-isu politik. Media ini juga memiliki kekuatan untuk membingkai isu-isu tertentu dengan cara yang mempengaruhi persepsi publik. Media sosial, di sisi lain, menawarkan platform lebih interaktif di mana individu dapat mengekspresikan pandangan, berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pandangan serupa, dan membentuk komunitas online.

Pengaruh media sosial dalam afiliasi politik sangat signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku politik. Algoritma media sosial juga cenderung

memperkuat pandangan yang ada dengan menyajikan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna. Ini bisa menyebabkan pembentukan echo chambers, di mana individu hanya terpapar pada pandangan serupa dengan mereka, yang pada gilirannya memperkuat afiliasi politik.

Pengalaman kolektif dan sejarah juga memainkan peran penting dalam membentuk afiliasi politik. Sejarah politik suatu negara, termasuk peristiwa penting seperti revolusi, perang, dan gerakan sosial, mempengaruhi

identitas politik individu dan kelompok. Pengalaman kolektif ini menciptakan narasi membentuk pandangan politik dan identitas kelompok. Misalnya, negara-negara yang memiliki sejarah kolonialisme mungkin memiliki identitas politik yang kuat yang berakar pada perjuangan untuk kemerdekaan dan kedaulatan nasional.

Gerakan sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk afiliasi politik. Gerakan-gerakan ini sering kali mengangkat isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat dan memobilisasi dukungan untuk perubahan sosial dan politik. Partisipasi dalam gerakan sosial dapat memperkuat afiliasi politik individu dengan memberikan mereka rasa keterlibatan dan pengaruh dalam proses politik. Ini juga menciptakan solidaritas di antara peserta, yang memperkuat identitas politik mereka sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar.

Gender adalah faktor penting yang mempengaruhi afiliasi politik. Studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pandangan politik antara laki-laki dan perempuan, dengan perempuan cenderung lebih mendukung kebijakan sosial yang progresif dan memiliki pandangan yang lebih liberal dibandingkan laki-laki. Ini mencerminkan pengalaman hidup yang berbeda dan peran gender yang mempengaruhi pandangan politik.

Gerakan feminisme, misalnya, telah memainkan peran penting dalam memobilisasi perempuan untuk terlibat dalam politik dan memperjuangkan hak-hak mereka. Gerakan ini tidak mempengaruhi kebijakan dan legislasi tetapi membentuk identitas politik perempuan dengan memberikan platform untuk mengekspresikan pandangan dan mempengaruhi perubahan. Gender juga mempengaruhi cara individu memahami dan merespons

isu-isu politik, dengan banyak perempuan yang merasa bahwa isu-isu seperti kesetaraan gender, hak reproduksi, dan kekerasan terhadap perempuan adalah prioritas yang perlu diperjuangkan.

Regionalisme adalah faktor yang mempengaruhi afiliasi politik. Identitas regional, berakar pada sejarah, budaya, dan kepentingan ekonomi yang khas dari suatu daerah, membentuk pandangan politik individu dan kelompok. Di banyak negara, perbedaan regional yang signifikan dalam pandangan politik dan afiliasi politik mencerminkan perbedaan dalam kebutuhan dan prioritas lokal. Misal, di negara-negara dengan perbedaan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kita sering melihat afiliasi politik yang berbeda antara penduduk kota dan desa. Penduduk perkotaan mungkin lebih cenderung mendukung kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi dan modernisasi, sementara penduduk pedesaan mungkin lebih fokus pada isu-isu yang terkait dengan pertanian, sumber daya alam, dan dukungan terhadap komunitas lokal. Perbedaan ini mencerminkan kepentingan dan prioritas berbeda berdasarkan konteks regional unik. Secara keseluruhan, afiliasi politik adalah aspek yang sangat kompleks dan multidimensi dari identitas politik individu. Ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan dan dukungan politik, mulai

2. Gerakan sosial dan aktivisme

Gerakan sosial dan aktivisme memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan memperkuat identitas politik individu dan kelompok. Keterlibatan dalam gerakan sosial atau kegiatan aktivisme tidak hanya memberikan platform bagi individu untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan perubahan, tetapi juga

memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu politik yang relevan. Melalui partisipasi dalam gerakan, individu dapat mengalami transformasi pribadi dan kolektif yang memperkuat komitmen mereka terhadap nilai-nilai dan tujuan politik tertentu. Artikel ini akan mengeksplorasi berbagai aspek keterlibatan dalam gerakan sosial dan aktivitas, serta dampak terhadap identitas politik dalam bentuk narasi yang mendalam.

Gerakan sosial adalah upaya kolektif terorganisir untuk mencapai perubahan sosial atau politik. Gerakan ini biasanya muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh sekelompok orang. Gerakan sosial dapat berfokus pada berbagai isu, seperti hak-hak sipil, lingkungan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan banyak lagi. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat 1950-an dan 1960-an, yang memperjuangkan hak-hak dasar bagi orang Afrika-Amerika dan menentang segregasi rasial.

Aktivisme dalam konteks gerakan sosial melibatkan tindakan yang disengaja untuk mendorong perubahan. Aktivis adalah individu yang berpartisipasi dalam kegiatan seperti protes, kampanye, petisi, pendidikan publik, dan advokasi. Keterlibatan ini dapat bervariasi dari partisipasi yang bersifat episodik hingga komitmen jangka panjang intens. Aktivis sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko pribadi dan profesional, namun motivasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar sering kali mengatasi hambatan ini.

Keterlibatan dalam gerakan sosial dan aktivitas tidak hanya memberikan rasa tujuan dan kepuasan pribadi, tetapi juga memperkuat identitas politik. Identitas politik adalah bagian dari identitas diri individu yang terkait dengan keyakinan, nilai-nilai, dan afiliasi politik mereka. Ini mencakup cara individu melihat diri mereka sendiri dalam konteks politik dan bagaimana mereka berhubungan dengan dunia politik lebih luas. Keterlibatan dalam gerakan sosial membantu individu memahami dalam isu yang diperjuangkan, memperkuat komitmen mereka terhadap nilai-nilai, dan memperluas jaringan sosial dengan orang yang memiliki pandangan serupa.

Sosialisasi politik adalah cara gerakan sosial bentuk identitas politik. Mempelajari dan menginternalisasi standar, prinsip, dan perilaku politik dikenal sebagai sosialisasi politik. Terjadi melalui berbagai cara, seperti sekolah formal, berhubungan dengan teman dan keluarga, dan terlibat dalam politik. Dalam gerakan sosial, orang dapat belajar tentang masalah politik, memperoleh keterampilan organisasi dan advokasi, dan membangun identitas politik kuat.

Contoh bahwa gerakan feminis memainkan peran penting mengubah identitas politik banyak perempuan di seluruh dunia. Perempuan belajar tentang masalah seperti kekerasan berbasis gender, hak reproduksi, dan kesetaraan gender melalui keterlibatan dalam gerakannya. mengembangkan kemampuan mereka untuk mengatur dan mendorong perubahan, meningkatkan kesetiaan terhadap prinsip feminis, dan meningkatkan pemahaman tentang masalah politik relevan. Gerakan feminis menyediakan jaringan dukungan sosial yang memperkuat identitas politik individu sebagai feminis dan aktivis.

Keterlibatan dalam gerakan sosial juga dapat memperluas pemahaman individu tentang isu-isu politik dengan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Melalui partisipasi dalam protes, kampanye, dan kegiatan advokasi lainnya, individu dapat berinteraksi dengan berbagai pandangan dan pengalaman berbeda. Membantu mereka memahami kompleksitas isu politik dan mengembangkan pandangan lebih komprehensif dan nyaris holistik. Misal, partisipasi gerakan lingkungan dapat membantu individu memahami hubungan antara kebijakan lingkungan, keadilan sosial, dan kesehatan masyarakat, tidak mereka sadari sebelumnya.

3. Faktor Yang Memunculkan Politik Identitas Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024

Politik identitas dan nasionalisme adalah dua konsep yang sering kali saling terkait dan memberikan dampak signifikan terhadap dinamika politik suatu negara. Di Indonesia, politik identitas dan nasionalisme telah mendapatkan ruang yang sangat istimewa dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam praktik maupun dalam studi keilmuan di bidang politik dan sosiologi. Fenomena ini semakin terlihat menjelang pesta demokrasi besar, seperti Pemilihan Presiden (PILPRES) 2024.

Dalam kajian pasca kolonial, politik identitas dan nasionalisme telah lama menjadi topik yang dipelajari. Di Indonesia, sejarah politik identitas dapat ditelusuri kembali ke era perjuangan kemerdekaan, di mana identitas kebangsaan dan nasionalisme menjadi alat utama untuk melawan penjajahan. Para pejuang kemerdekaan menggunakan semangat nasionalisme untuk menyatukan berbagai suku, agama, dan ras di Indonesia dalam

perjuangan bersama melawan penjajah. Seiring waktu, politik identitas mengalami transformasi dan menjadi elemen penting dalam pertarungan politik.

Donald L. Horowitz, seorang pakar politik dari Universitas Duke, mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis tegas untuk menentukan siapa saja yang akan diikutsertakan dan siapa yang akan ditolak dalam sebuah komunitas politik. Definisi mencerminkan realitas politik identitas di Indonesia, di mana berbagai kelompok berusaha untuk memposisikan diri mereka dan mengamankan dukungan konstituen mereka berdasarkan identitas suku, agama, ras, atau golongan.

Menjelang Pemilu 2024, politik identitas semakin mengemuka sebagai strategi utama bagi banyak politisi dan partai politik. Berusaha menggalang dukungan dengan menekankan kesamaan identitas di antara konstituen mereka. Hal ini sering kali dilakukan dengan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan identitas suku, agama, atau golongan, bisa memicu sentimen emosional dan solidaritas kelompok. Namun, strategi ini tidak tanpa risiko. Politik identitas berlebihan dapat menyebabkan polarisasi dan fragmentasi sosial, yang pada akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Fenomena politik identitas di Indonesia juga dapat dilihat dari berbagai peristiwa politik besar dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, dalam Pemilu 2019, isu agama dan identitas suku menjadi sangat dominan, terutama dalam kampanye dan debat publik. Kampanye politik mengandung unsur yang mengangkat identitas tertentu, yang kemudian memicu reaksi dan ketegangan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Salah satu contoh nyata dari penggunaan politik identitas adalah

bagaimana kandidat tertentu menggunakan sentimen agama untuk meraih dukungan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kampanye yang mengedepankan isu-isu yang sensitif seperti penistaan agama, kebijakan berbasis syariah, dan lainnya. Pendekatan ini memang efektif dalam menarik dukungan dari kelompok tertentu, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya intoleransi dan konflik antar kelompok.

Dalam konteks nasionalisme, politik identitas juga berperan penting. Nasionalisme di Indonesia sering kali dibangun di atas fondasi identitas kebangsaan yang inklusif, yang mencakup berbagai suku, agama, dan ras. Namun, nasionalisme bisa digunakan untuk memperkuat identitas kelompok tertentu dan mengeksklusi yang lain. Ini terlihat dari bagaimana berbagai kelompok berusaha menegaskan keunggulan identitas mereka dalam konteks nasionalisme, melalui kebijakan, narasi publik, maupun simbol-simbol nasional. Selain itu, politik identitas juga memiliki implikasi terhadap kebijakan publik dan pemerintahan. Ketika politisi menggunakan identitas sebagai alat untuk meraih kekuasaan, hal ini sering kali tercermin dalam kebijakan yang diimplementasikan. Misal, kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu atas dasar identitas mereka, atau sebaliknya, kebijakan yang mendiskriminasi kelompok lain. Menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, pada gilirannya menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Dalam situasi seperti ini, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak politik identitas dan bagaimana mengelolanya secara bijaksana. Pendidikan dan dialog antar kelompok menjadi kunci membangun toleransi dan saling pengertian. Pemerintah

dan pemimpin masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan kelompok mayoritas tetapi juga melindungi hak-hak minoritas.

Meskipun politik identitas dapat menjadi alat yang kuat untuk mobilisasi politik, penting untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak merusak integritas dan kesatuan bangsa. Indonesia, sebagai negara yang beragam dengan beragam suku, agama, dan ras, memerlukan pendekatan yang menghargai pluralisme dan inklusivitas. Semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika" harus dijadikan landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan politik, memastikan perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan yang memperkaya bangsa. Pada akhirnya, tantangan terbesar dalam politik identitas adalah menemukan keseimbangan antara merayakan perbedaan dan menjaga persatuan. Demokrasi sehat harus mampu mengakomodasi berbagai identitas tanpa mengorbankan kesatuan nasional. Dengan dialog konstruktif, pendidikan yang mempromosikan toleransi, dan kebijakan yang inklusif, Indonesia dapat mengelola politik identitas secara bijaksana dan memastikan bahwa demokrasi menjadi alat untuk memperkuat persatuan dan keadilan sosial.

Pemilu 2024 menjadi ujian penting bagi Indonesia dalam hal ini. Bagaimana politisi dan partai politik mengelola politik identitas akan sangat menentukan arah masa depan negara. Jika dilakukan dengan bijaksana, politik identitas dapat menjadi kekuatan positif yang memperkuat demokrasi dan memperkaya kehidupan politik. Namun, jika disalahgunakan, bisa menjadi sumber perpecahan dan konflik mengancam keutuhan bangsa.

Oleh karena itu, semua pihak harus berkomitmen untuk menggunakan politik identitas secara bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan persatuan nasional.

Identitas berbagai lingkungan memunculkan potensi konflik yang sering kali disebabkan oleh perbedaan. Konflik ini sering terjadi di sekitar kita, dan oleh karena itu, diperlukan ide-ide dalam menyikapi perkembangan politik identitas. Penting untuk membangun hubungan interaktif antara kelompok yang berbeda, seperti antar etnis, suku, agama, dan ras, dengan menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi perkembangan politik identitas saat ini. Sikap toleransi diterapkan dalam berbagai bidang seperti politik, budaya, dan sosial. Toleransi politik penting di negara yang penduduknya memiliki berbagai identitas yang berbeda atau negara multikultural dan demokratis. Faktor yang mempengaruhi penanaman sikap toleransi politik: faktor psikologi politik, penerapan sistem politik, struktur politik kuat, dan kemakmuran ekonomi negara.

Faktor yang mempengaruhi politik identitas di Indonesia adalah perseteruan antara nasionalisme dan agama. Isu-isu politik identitas sering kali muncul dari keinginan masyarakat berdasarkan pandangan mereka sendiri. Di Indonesia, terdapat dua kubu masyarakat yang berselisih berdasarkan pemikiran mereka, yaitu antara yang mendukung identitas nasionalisme dan mendukung identitas agama. Padahal, landasan keagamaan telah memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan landasan negara, yaitu Pancasila, yang mengandung sila Ketuhanan

BAB V

DAMPAK POLITIK IDENTITAS

1. Dampak Politik Identitas Kepada Keberagaman

Kajian yang dilakukan oleh Supratikno pada tahun 2022 memberikan sorotan yang mendalam terhadap dampak negatif yang muncul ketika politik identitas tidak terkendali. Dalam analisisnya, Supratikno menyoroti bahwa kegagalan dalam mengelola politik identitas dapat menyebabkan eskalasi konflik SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), tingkatan fenomena fundamentalisme dan radikalisme agama, memunculkan praktik politik sarat dengan propaganda kebencian terhadap kelompok-kelompok lain. Temuan ini secara paralel dengan peringatan yang disampaikan oleh Akbar Faisal, yang juga menekankan bahwa politik identitas tidak terkendali berpotensi memecah belah masyarakat, mengkotak-kotakkan kepentingan, menciptakan diskriminasi, dan menjadi sarana manipulasi politik.

Ketika politik identitas menjadi bahan perdebatan dalam arena publik, muncul ketegangan antara kelompok-kelompok berbeda menjadi semakin nyata. Perdebatan ini telah menjadi hangat dan kontroversial sejak artikel Samuel Huntington berjudul "Clash of Civilizations?" diterbitkan pada tahun 1993. Artikel tersebut menjadi pemicu bagi pertanyaan kritis mengenai peran identitas budaya, agama, dan etnis dalam dinamika politik global. Pemikiran Huntington menyoroti potensi konflik antarbudaya dan menegaskan pentingnya memahami serta mengelola perbedaan identitas untuk mencegah terjadinya konflik yang merusak bagi perdamaian dunia.

Pemahaman mendalam mengenai politik identitas dan kesadaran akan potensi dampak negatifnya menjadi semakin penting dalam konteks tantangan global dan lokal semakin kompleks. Kebijakan dalam mengelola politik identitas menjadi keharusan bagi pemerintah, pemimpin politik, dan masyarakat sipil. Bersama mempromosikan dialog inklusif, memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial, menjauhi penggunaan politik identitas sebagai alat untuk memecah belah masyarakat dan memperkuat kekuasaan politik otoriter.

Dengan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, politik identitas dapat menjadi sarana untuk memperkuat keberagaman, memajukan perdamaian, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Ini berarti membangun pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang keragaman identitas serta upaya konkret dalam menciptakan ruang untuk dialog yang menghormati, menghargai, memperkuat persatuan dalam perbedaan. Politik identitas dapat diarahkan untuk menjadi kekuatan positif memajukan kesejahteraan bersama dan kokoh fondasi perdamaian dan harmoni masyarakat.

Penggunaan identitas dalam politik memang merupakan fenomena yang kompleks, tidak selalu negatif jika dilakukan dengan mempertimbangkan moralitas politik tinggi. Namun, jika moralitas politik diabaikan dan identitas digunakan semata-mata untuk kepentingan elektoral, hal ini dapat mengakibatkan masalah serius, seperti munculnya antagonisme sosial yang merusak.

Menurut Laclau dan Mouffe, ada konsep yang mereka sebut sebagai "political frontiers" atau ambang batas hegemoni politik. Dalam konteks ini, setiap aktor politik memanfaatkan identitas mereka dalam hubungan

yang antagonistik. Artinya, identitas diposisikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik tertentu, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Pada titik ini, politik identitas bukan lagi menjadi sarana untuk mewujudkan aspirasi bersama atau memperkuat kesatuan dalam keragaman, tetapi lebih merupakan instrumen untuk memperkuat polarisasi dan konflik antar-kelompok. Penggunaan identitas secara tidak bertanggung jawab oleh para aktor politik dapat memicu pertarungan yang tidak sehat, bahkan bisa memicu kekerasan dan ketegangan sosial yang lebih besar.

Namun demikian, penting diingat bahwa identitas dalam politik bisa menjadi sarana untuk memperjuangkan hak-hak yang adil, mewakili kepentingan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan membangun kesadaran akan isu-isu yang relevan dengan identitas tertentu. Kunci utamanya adalah bagaimana identitas tersebut digunakan: apakah sebagai alat untuk membangun solidaritas atau sebagai alat memperkuat pembagian dan ketegangan dalam masyarakat. Munculnya antagonisme sosial akibat permainan identitas politik untuk kepentingan elektoral menjadi perhatian serius bagi semua pihak terlibat dalam proses politik. Penting menjaga moralitas politik dan memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan individu atau kelompok menjadi semakin nyata. Hanya dengan demikian, politik identitas dapat menjadi alat yang memperkuat kesatuan dan keadilan dalam masyarakat, bukan memecah belah dan memperkuat konflik yang merugikan.

Pandangan Nawir dan Mukramin Tahun 2019 memberikan gambaran jelas tentang konsekuensi yang mungkin terjadi jika politik identitas tidak terkendali, terutama sebelum, selama, dan setelah pemilihan umum (Pemilu). Mereka menggarisbawahi bahwa jika politik identitas terus dipelihara tanpa pertimbangan moral dan etika politik yang kuat, hal tersebut dapat memicu berbagai konflik sosial dalam skala besar maupun kecil yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui analisis mereka, Nawir dan Mukramin menyoroti bahaya politik identitas yang telah membagi masyarakat menjadi dua kubu yang saling bertentangan, dan pola pemikiran ini terus terjaga bahkan setelah Pemilu berlangsung. Konsekuensinya, masyarakat terpolarisasi lebih dalam, menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan terhadap pihak yang terpilih dan penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kondisi ini juga meningkatkan tingkat intoleransi, persekusi terhadap kelompok yang berbeda pandangan, serta mendorong budaya mengolok-olok karena perbedaan pilihan politik.

Lebih lanjut, Nawir dan Mukramin menegaskan bahwa konsekuensi negatif dari politik identitas yang tidak terkendali mencapai titik yang lebih berbahaya, seperti upaya yang menggugat nilai-nilai Pancasila dan ketertiban umum. Ini menandakan bahwa politik identitas yang dijalankan tanpa arahan moral dan tanggung jawab mengancam fondasi nilai demokrasi dan keutuhan negara.

Melihat risiko yang dihadapi, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam politik untuk merenungkan dampak jangka panjang dari praktik politik identitas yang tidak bertanggung jawab. Perlu adanya kesadaran kolektif akan pentingnya mempromosikan dialog yang inklusif,

menghargai perbedaan pendapat, dan membangun solidaritas atas perbedaan politik. Hanya dengan cara ini, masyarakat menghindari konflik sosial yang merusak dan memperkuat fondasi persatuan dalam keragaman.

Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, politik identitas harus menjadi alat yang mempersatukan, sebagaimana yang dicontohkan oleh para guru bangsa pada masa sebelum dan awal kemerdekaan. Namun, ironisnya, politik identitas di Indonesia justru seringkali bergerak menuju arah yang mengancam persatuan. Fenomena ini semakin kompleks dengan kehadiran media sosial (medsos) memiliki penetrasi besar di masyarakat. Pada tahun 2021 saja, penetrasi medsos telah mencapai 73.7%, setara dengan 204.7 juta dari total populasi Indonesia yang mencapai 277.7 juta jiwa.

Peran media sosial dalam politik identitas sangat signifikan. Meskipun medsos memberikan akses yang lebih mudah bagi individu untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi, namun seringkali digunakan sebagai alat untuk memperkuat polarisasi politik dan perpecahan sosial. Di media sosial, identitas politik sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkuat kelompok tertentu dan menyerang kelompok lainnya, sehingga memperdalam jurang pemisahan di antara masyarakat. Tidak jarang, politik identitas di medsos dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memanipulasi opini publik atau memperoleh dukungan politik dengan cara yang tidak etis. Propaganda, disinformasi, dan retorika yang memecah belah sering kali menyebar dengan cepat di platform-platform medsos, memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu politik dan identitas.

Penting untuk diakui bahwa dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, keberagaman identitas adalah kenyataan yang harus diterima. Namun, politik identitas yang bertujuan untuk memperkuat kesatuan dan keadilan justru harus didorong. Hal ini membutuhkan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media, dan individu, membangun kesadaran akan dialog inklusif, penghormatan terhadap perbedaan, dan peningkatan literasi digital menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh media sosial. Dengan pendekatan bijak dan tanggung jawab, politik identitas menjadi sarana memperkuat persatuan dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Sebaliknya, jika tidak dielola dengan baik, politik identitas dapat mengancam stabilitas sosial dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan strategi yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan menghadapi tantangan politik identitas di era digital.

2. Dampak Politik Identitas Terhadap Demokrasi Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk dan beragam, merangkul ideologi Pancasila sebagai fondasi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasca reformasi, tantangan dihadapi bangsa Indonesia makin kompleks, merebaknya politik identitas.

Politik identitas ini seringkali menempatkan identitas kelompok atau simbol-simbol tertentu di atas nilai-nilai kesatuan dan persatuan dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Fenomena politik identitas ini menghadirkan tantangan yang serius bagi stabilitas dan keutuhan bangsa. Ketika identitas kelompok atau simbol-simbol tertentu

diutamakan dalam politik, hal ini dapat memicu polarisasi sosial, meningkatkan ketegangan antargolongan, dan bahkan mengancam kerukunan dan keberagaman yang selama ini menjadi kekayaan Indonesia. Dalam konteks politik, pihak-pihak yang menggunakan politik identitas cenderung memanfaatkan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat untuk kepentingan politik mereka sendiri. Mereka memanfaatkan sentimen-sentimen etnis, agama, atau budaya sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik, tanpa memperhitungkan dampak negatifnya terhadap stabilitas dan persatuan bangsa.

Penting untuk diakui bahwa keberagaman adalah salah satu kekuatan utama Indonesia. Namun, politik identitas yang berlebihan dapat mengaburkan nilai-nilai kesatuan dan keberagaman yang telah dibangun selama ini. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama dari semua elemen masyarakat untuk mencegah penyebaran politik identitas yang berpotensi merusak keutuhan bangsa. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan, serta menolak upaya-upaya yang memecah belah bangsa. Pemimpin politik, lembaga negara, dan masyarakat sipil bekerja sama dalam mengedukasi dan mengadvokasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam membangun bangsa yang bersatu dan berkeadilan. Dengan demikian, Indonesia dapat mengatasi tantangan politik identitas dan tetap kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam politik praktis, identitas dimanipulasi dan dieksploitasi untuk kepentingan politik yang sempit, yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Identitas, baik itu berbasis etnis, agama, atau

budaya, digunakan sebagai alat politik meraih keuntungan dalam pemilihan umum, memperoleh dukungan massa, atau bahkan untuk mencapai tujuan politik lebih besar seperti pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Politik identitas dasarnya, menyoroti perbedaan-perbedaan identitas antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Namun, ketika identitas dieksploitasi untuk kepentingan politik yang sempit, hal ini dapat memicu konflik, polarisasi, dan ketegangan sosial yang merugikan bagi keseluruhan masyarakat. Penggunaan politik identitas dalam konteks seringkali tidak memperhatikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang menjadi landasan negara. Sebaliknya, politik identitas lebih cenderung mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bersama sebagai bangsa.

Penting untuk diwaspadai bahwa eksploitasi politik identitas dapat mengancam stabilitas dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen dari semua pihak, baik itu pemimpin politik, lembaga negara, maupun masyarakat, untuk menolak praktik politik yang memanfaatkan identitas sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Perlunya penguatan pendidikan politik yang berorientasi pada nilai-nilai persatuan, demokrasi, dan keadilan, sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas dalam menyikapi upaya-upaya yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran kolektif, kita dapat mengatasi ancaman politik identitas dan menjaga keutuhan NKRI sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Politik identitas menjadi semakin kuat karena munculnya rasa ketidakpuasan yang berkembang, akibat kurangnya pengakuan terhadap kebutuhan individu akan identitas mereka. Hal ini terjadi karena adanya apa yang disebut sebagai "entrepreneur of identity," yaitu aktor-aktor kunci secara aktif memobilisasi dan mempolitisasi identitas untuk mencapai tujuan politik atau kepentingan tertentu. Fenomena ini menimbulkan ancaman karena kecenderungan politik identitas lebih condong pada pembatasan daripada pembebasan. Ambiguitas dalam klaim representasi dan legitimasi juga meningkatkan potensi politik identitas untuk dimanipulasi oleh elit politik guna mencapai kepentingan mereka sendiri.

Fukuyama, dalam pemikirannya, menggunakan sudut pandang psikologi politik untuk menjelaskan munculnya politik identitas. Menyoroti konsep "thymos," yaitu sifat manusia yang berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas identitas agar merasa bangga, dihormati, dan lain sebagainya. Selain itu, dia mengidentifikasi konsep "isothymia," yang mengacu pada tuntutan individu untuk diperlakukan secara sama dengan orang lain, serta "megalothymia," yang terjadi ketika seseorang merasa berhak mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi daripada orang lain.

Dalam konteks politik, tuntutan untuk pengakuan identitas memicu persaingan dan konflik antarindividu atau kelompok, terutama jika pengakuan dirasakan tidak proporsional/tidak adil. Ketidakpuasan akan pengakuan identitas juga dapat memperkuat politik identitas, karena individu atau kelompok yang merasa diabaikan atau direndahkan cenderung cari saluran untuk menegaskan identitas mereka dengan lebih keras. Dengan demikian,

pemahaman mendalam tentang dinamika psikologi politik dalam konteks politik identitas menjadi penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani fenomena ini. Upaya untuk mempromosikan inklusi, pengakuan adil, dan dialog yang konstruktif antarberbagai identitas menjadi kunci dalam mengatasi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh politik identitas.

Fenomena politik identitas di era demokrasi sering kali mencakup penggunaan identitas yang dibungkus dengan kepentingan agama sebagai alat untuk kelompok tertentu dalam menyuarakan aspirasinya. Hal ini terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melek politik dan hukum. Ketika masyarakat kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang proses politik dan hukum, rentan terhadap pengaruh politik identitas dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Dikhawatirkan ketidakpahaman ini dapat menyebabkan reaksi emosional mudah tersulut, akhirnya dapat memicu konflik vertikal (antara pemerintah dan rakyat) maupun horizontal (antara kelompok dalam masyarakat) yang merugikan keutuhan bangsa Indonesia.

Politik identitas berdasarkan ras dimanfaatkan oleh kelompok separatis mencapai tujuan memerdekakan diri dari pangkuan Republik Indonesia. Penggunaan identitas ras sebagai dasar politik memperdalam jurang perpecahan dalam masyarakat dan kedaulatan negara. Kelompok separatisme ini memanfaatkan perasaan solidaritas dan identitas rasial untuk memobilisasi massa dan mendukung agenda kemerdekaan mereka. Konflik yang muncul dari politik identitas ras seringkali menimbulkan ketegangan dan kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan mempengaruhi perdamaian serta pembangunan.

Dalam menghadapi fenomena politik identitas yang kompleks ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memperkuat pendidikan politik dan hukum serta meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai persatuan dan keragaman. Pemerintah meningkatkan pengawasan propaganda politik yang memanfaatkan identitas agama dan ras untuk kepentingan politik sempit. Sementara masyarakat perlu didorong untuk menganalisis secara kritis isu-isu politik identitas dan mengutamakan dialog, toleransi, dan kerja sama lintas kelompok untuk memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Indonesia mengatasi tantangan politik identitas dan memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan sosial.

3. Dampak Politik Identitas Pada Pemilu 2019

Menurut Fernandes, politik identitas cenderung mengalami penguatan ketika terjadi kontestasi yang cukup kuat antara kandidat, terutama di daerah dengan komposisi pemilih yang beragam, baik dari segi agama, suku, maupun ras. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, Fernandes mencatat bahwa politik identitas menjadi lebih kuat karena adanya persaingan yang sengit antara pasangan calon dan adanya keragaman latar belakang pemilih. Namun, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, politik identitas cenderung tidak begitu mendominasi, seperti yang terjadi di beberapa daerah.

Dampak dari peristiwa Pilkada DKI Jakarta dan Aksi 212 tidak hanya dirasakan oleh pemilih, tetapi juga oleh elit politik di tingkat nasional. Peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi perilaku dan keputusan politik partai serta calon presiden dalam menentukan kebijakan dan sikap politik terkait Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dari sisi Joko Widodo, pembatalan nama calon wakil presiden dari Mahfud MD ke Ma'ruf Amin dengan cepat menunjukkan strategi politik untuk mendapatkan dukungan dari pemilih Muslim. Dari perspektif Prabowo, terlihat perlunya mengakomodasi kepentingan elit politik Muslim dalam pemilihan calon wakil presiden. Elit-elit tersebut tergabung dalam *ijtima'* ulama GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, yang diadakan hingga dua kali sebagai wadah merumuskan keputusan politik.

Dari perspektif elektoral, dampak mobilisasi pemilih dalam aksi 212 terhadap politik nasional belum terlalu signifikan menjelang pemilihan umum serentak nasional pada 17 April 2019. Kelemahan efek massa dari aksi 212 terhadap politik nasional dapat diamati dari beberapa indikator yang tersedia. **Pertama**, tidak terdapat dampak langsung dari aksi 212 terhadap kenaikan atau penurunan suara pasangan calon presiden. Contohnya, perolehan suara untuk Joko Widodo tidak mengalami penurunan yang berarti setelah berlangsungnya aksi 212, demikian juga dengan suara yang diperoleh oleh Prabowo Subianto, tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada rentang waktu 24 September - 5 Oktober 2018 menunjukkan tingkat elektabilitas Jokowi sebesar 52,6% dan Prabowo sebesar 32,7%.

Meskipun aksi 212 menarik perhatian publik dan memiliki dampak psikologis yang cukup besar, namun tampaknya belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap dinamika politik dan hasil pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti program kerja, isu-isu politik, dan dinamika politik lokal maupun nasional, mungkin memiliki pengaruh yang

lebih besar dalam menentukan pilihan pemilih. Dengan demikian, sementara aksi massa 212 dapat menciptakan gejolak dinamika politik, namun tidak selalu berdampak langsung pada hasil pemilihan umum.

Bila politik identitas beroperasi secara efektif, Joko Widodo yang kerap menjadi sasaran kampanye negatif terkait politik identitas seharusnya mengalami penurunan suara. Namun, yang terjadi justru sebaliknya; suara untuk Jokowi justru mengalami peningkatan. Hal yang sama berlaku untuk Prabowo Subianto, yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok organisasi Islam; meskipun demikian, ia tidak mengalami peningkatan suara yang signifikan, bahkan mengalami stagnasi.

Kedua, Dari segi distribusi suara pendukung dan partisipasi dalam aksi 212, cenderung tersebar pada kedua pasangan calon, baik Jokowi maupun Prabowo. Hasil tabulasi silang data survei CSIS pada bulan April 2018, yang membandingkan dukungan pemilih terhadap Aksi 212 dengan pilihan calon presiden, menunjukkan bahwa dukungan politik dari pendukung aksi 212 terbagi antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi mendapatkan dukungan lebih tinggi dari massa aksi 212 di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara Prabowo mendapat dukungan lebih besar dari pendukung aksi 212 di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Di Provinsi Sulawesi Selatan, dukungan tersebut relatif seimbang. Penting untuk dicatat bahwa data agregat dari lima provinsi menunjukkan bahwa sekitar 67,9% responden pernah mendengar tentang aksi 212, dan dari persentase tersebut, sekitar 60% mengaku mendukung aksi tersebut. Namun, tingkat partisipasi dalam aksi tersebut relatif rendah, rata-rata sekitar 6%.

Pasca-Pilkada DKI Jakarta, partai-partai yang terkait dengan gerakan 212 tidak merasakan dampak politik yang signifikan. Hal ini terlihat dari sebaran dukungan massa 212 yang merata ke partai-partai dengan ideologi yang berbeda, baik yang berbasis agama maupun nasionalis. Partai politik mendukung pencalonan Ahok maupun mendukung calon lainnya, keduanya menerima dukungan massa pendukung 212. Secara keseluruhan, Gerindra merupakan partai yang paling banyak dipilih oleh pendukung 212, dengan sekitar 22,4% dukungan, diikuti oleh PDIP dengan 16,6%, dan Golkar (10,8%) sebagai tiga besar.

4. Dampak Politik Identitas Pada Pemilu 2024

Indonesia adalah kumpulan dari berbagai etnis, agama, ras, dan budaya yang beragam. Di negara yang terletak di garis Khatulistiwa ini, kita memiliki kekayaan alam dan manusia yang melimpah ruah. Namun, dengan populasi yang begitu besar dan keberagaman budaya, agama, dan suku yang berbeda-beda, sering kali kita dihadapkan pada tantangan mempertahankan persatuan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu mencari titik persatuan yang bisa menjadi landasan bagi berbagai kelompok masyarakat dan kepentingannya. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional kita, menjadi pijakan dalam upaya mempersatukan Indonesia yang beragam ini. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Semboyan ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan merayakan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita menjalin persatuan dalam keberagaman, membangun kerjasama lintas budaya dan agama, serta mendorong

inklusi sosial bagi semua warga Indonesia. Dengan memegang teguh semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat melewati berbagai rintangan dan konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan kita. Ini bukan hanya menjadi semboyan, tetapi juga menjadi prinsip yang kita anut dalam membangun bangsa yang kokoh dan berdaya. Bersatu dalam keberagaman, kita dapat menghadapi tantangan apa pun dan mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan damai bagi semua warganya.

Dalam Pemilu 2024, pemahaman akan bahaya penyalahgunaan politik identitas menjadi sangat relevan. Jika politik identitas digunakan secara tidak bertanggung jawab, hal itu dapat memicu polarisasi yang lebih besar dalam masyarakat, mengancam stabilitas politik, serta merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Terdapat potensi besar bagi pihak-pihak politik untuk memanfaatkan isu-isu identitas seperti suku, agama, ras, dan budaya sebagai alat untuk meraih dukungan politik. Jika hal ini tidak diawasi dengan ketat dan tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip moralitas politik serta nilai-nilai demokratis, maka hasilnya dapat menjadi konflik sosial yang merugikan. Dalam konteks ini, pemilih perlu waspada terhadap upaya-upaya manipulatif yang menggunakan politik identitas sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu, dan harus memilih pemimpin yang berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati keberagaman serta nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan analisis sederhana terhadap teori dan fakta sosial politik, terdapat bahaya penyalahgunaan politik identitas yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara Pancasila.

1) Mengancam Keutuhan NKRI

Ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin mengkhawatirkan karena politik identitas yang semakin mengedepankan identitas agama. Fenomena ini bukan hanya sekadar gejala politik identitas biasa, tetapi juga menjangkiti kedalaman ideologi negara. Kehadiran kelompok-kelompok yang mulai mempersoalkan ideologi bangsa menjadi ancaman yang sangat besar bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Ironisnya, fenomena ini juga mencuat dalam konteks Pemilu 2019, di mana munculnya pihak-pihak yang mempertanyakan landasan ideologi negara menjadi sorotan utama. Hal ini menjadi lebih mengejutkan mengingat sebelumnya, bahkan pada era Orde Baru dan beberapa pemilu langsung pasca reformasi hingga pemilu 2014, tidak ada yang mempermasalahkan ideologi negara.

Penting memahami bahaya politik identitas dalam konteks masyarakat juga turut menjadi sorotan. Terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi isu-isu SARA yang melibatkan emosi massa, di mana sebagian darinya bahkan tidak sepenuhnya memahami fakta sebenarnya. Pelanggaran norma sosial dan kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila menjadi contoh konkret bagaimana politik identitas dapat memicu gesekan dan konflik di antara masyarakat. Dalam era yang semakin terbuka dengan akses informasi, tantangan menyikapi politik identitas dengan bijaksana dan bertanggung jawab makin mendesak. Dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah arus politik yang semakin kompleks dan dinamis.

2) Menimbulkan Adu Domba/perpecahan

Politik identitas adalah fenomena kompleks yang telah menjadi sorotan utama dalam dinamika sosial dan politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks politik modern, penggunaan identitas, baik itu agama, etnis, ras, atau bahkan orientasi seksual, telah menjadi strategi umum memperoleh dukungan politik, menggalang massa, dan memperkuat basis kekuasaan. Namun, dampak politik identitas tidak selalu positif, terutama ketika digunakan secara tidak bertanggung jawab atau eksploitatif.

Dampak negatif politik identitas adalah polarisasi masyarakat. Identitas dipolitisasi, perbedaan-perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan dan keunikan sebuah masyarakat menjadi pemicu konflik dan ketegangan. Politik identitas mengedepankan perbedaan seringkali memicu pembentukan kelompok-kelompok yang saling bertentangan, menciptakan jurang yang sulit untuk dijembatani. Hal ini dapat mengakibatkan terpecahnya masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling berseteru, mengancam kesatuan dan stabilitas sosial.

Di Indonesia, negara dengan keragaman suku, agama, dan budaya yang kaya, politik identitas sering kali menjadi bahan bakar bagi konflik dan ketegangan. Contohnya adalah politik identitas yang berkaitan dengan agama, yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit. Dalam beberapa kasus, politik identitas agama telah menyebabkan konflik antarumat beragama, bahkan kekerasan antarkelompok. Selain itu, politik identitas juga dapat mengancam prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ketika identitas digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi atau menindas kelompok-

kelompok minoritas, hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menganut konsep kesetaraan dan perlindungan hak-hak minoritas. Politik identitas yang menekan minoritas juga dapat mereduksi kebebasan berpendapat dan hak-hak partisipasi politik, menghambat proses demokratisasi yang seharusnya inklusif dan adil.

Namun, tidak semua politik identitas bersifat negatif. Dalam beberapa konteks, politik identitas dapat menjadi alat untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan atau diskriminasi. Misalnya, gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., menggunakan identitas ras sebagai landasan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi komunitas Afro-Amerika yang terdiskriminasi. Dalam kasus seperti ini, politik identitas dapat menjadi instrumen perubahan sosial yang positif. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara politik identitas yang bertujuan memperjuangkan hak dan kepentingan kelompok tertentu dengan politik identitas yang digunakan untuk memecah belah atau memperkuat dominasi atas kelompok lain. Politik identitas yang dibangun atas dasar kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas dapat menjadi kekuatan positif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat.

Tantangan utama dalam mengelola politik identitas adalah bagaimana menciptakan ruang dialog yang inklusif dan bangun pemahaman bersama tentang keberagaman. Penting untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan dan membangun solidaritas di antara kelompok berbeda. Pemerintah, pemimpin politik, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan saling pengertian.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengatasi politik identitas dirugikan. Melalui pendidikan inklusif dan holistik, masyarakat membangun kesadaran akan pentingnya nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi antar kelompok. Guru dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebererlanjutan masa depan bangsa.

3) Ancaman Terhadap Pluralisme

Pluralisme, dalam konteks sosial dan politik, adalah konsep yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu "plural" yang berarti beragam, dan "isme" yang mengacu pada paham atau doktrin. Jadi, secara harfiah, pluralisme mengacu pada paham atas keberagaman. Namun, definisi pluralisme disalahartikan, dianggap sebagai konsep memunculkan ambiguitas karena pengertian beragam dari setiap individu atau kelompok.

Dalam realitasnya, pluralisme merupakan kesediaan menerima dan menghargai keberagaman (pluralitas) berbagai aspek kehidupan. Mencakup keberagaman suku, golongan, agama, budaya, adat, dan pandangan hidup. Pluralisme mengandaikan sebuah tindakan yang didasarkan pada pengakuan akan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, serta kebebasan mencari informasi. Untuk capai kondisi pluralisme yang sejati, diperlukan kematangan kepribadian individu maupun kelompok.

Pluralisme bukan hanya tentang kesediaan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan, tetapi juga tentang menghargai dan memanfaatkan keberagaman tersebut sebagai sumber kekuatan dan kekayaan dalam sebuah masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya

dialog, toleransi, dan saling pengertian antarindividu dan kelompok dalam masyarakat yang majemuk.

Dalam konteks politik, pluralisme memperjuangkan inklusi dan partisipasi setiap individu dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Ini mengakui bahwa setiap kelompok memiliki hak yang sama dalam berkontribusi dan mengemukakan pendapatnya tanpa diskriminasi atau penindasan dari pihak lain. Pluralisme politik mendorong terciptanya ruang politik yang inklusif dan adil bagi semua warga negara.

Pentingnya pluralisme terutama terlihat dalam masyarakat yang multikultural dan multi-etnis seperti Indonesia. Negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, Indonesia adalah gambaran nyata dari keberagaman yang kaya. Dalam kerangka Bhinneka

Tunggal Ika, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme untuk membangun kesatuan dalam keragaman.

Namun, implementasi pluralisme tidak selalu berjalan lancar. Tantangan utamanya adalah mengatasi ketegangan dan konflik yang muncul akibat perbedaan. Pengelolaan pluralisme memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan, melibatkan lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat sipil, agama, dan pemimpin masyarakat.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam memperkuat pluralisme. Sekolah dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai pluralisme kepada generasi muda, membantu mereka memahami dan menghargai keberagaman, serta mengembangkan kemampuan berdialog konstruktif.

Selain itu, media massa juga memiliki peran yang signifikan membentuk persepsi masyarakat terhadap pluralisme. Media bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang objektif dan menghindari retorika yang memicu konflik antarkelompok. Dengan kesadaran akan penting pluralisme dan komitmen memperjuangkannya, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk perdamaian, keadilan, dan harmoni sosial. Pluralisme bukan hanya tentang mengakui perbedaan, tetapi juga tentang memperkuat persatuan dalam keberagaman, menciptakan masyarakat inklusif, adil, dan berkelanjutan.

4) Menimbulkan Polarisasi dan Pragmentasi kekuatan politik

Polarisasi isu pribumi dan non-pribumi di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial dan politik yang cukup kompleks dan sensitif. Ini bukanlah isu yang bisa dianggap sepele atau diabaikan begitu saja, mengingat sejarah panjang konflik etnis yang pernah terjadi di negeri ini. Salah satu peristiwa paling mengerikan yang masih segar dalam ingatan kolektif bangsa adalah kerusuhan yang terjadi pada masa-masa menjelang runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Pada saat itu, sentimen anti-non-pribumi memuncak, dan kekerasan etnis pun meletus, mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian yang sangat besar.

Kerusuhan 1998, yang dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda Asia, dengan cepat berubah menjadi kekerasan etnis yang terarah, terutama terhadap warga keturunan Tionghoa. Mereka yang memiliki ciri-ciri fisik berkulit putih dan bermata sipit, sering kali diidentifikasi dengan sebutan 'aseng', menjadi sasaran kemarahan massa. Kebencian dan prasangka telah lama terpendam,

dimanfaatkan oleh beberapa pihak menyulut kebencian dan merusak harmoni sosial yang telah terbangun.

Isu non-pribumi ini tidak hanya muncul tiba-tiba, tetapi memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak zaman kolonial, kebijakan *divide et impera* (pecah belah dan kuasai) diterapkan oleh penjajah Belanda menciptakan stratifikasi sosial yang menempatkan warga keturunan Tionghoa pada posisi tertentu dalam struktur ekonomi dan sosial. Setelah kemerdekaan, sentimen anti-Tionghoa tetap ada dan kadang-kadang digunakan sebagai alat politik menggalang dukungan dari kelompok pribumi.

Dalam konteks modern, isu pribumi dan non-pribumi sering kali diangkat dalam berbagai diskusi politik, terutama menjelang pemilu. Beberapa politisi dan kelompok kepentingan tidak segan-segan menggunakan isu ini untuk memobilisasi dukungan dan memperkuat basis massa. Polarisasi ini menjadi lebih berbahaya ketika disebarkan melalui media sosial, yang dapat mempercepat penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Dalam lingkungan digital yang semakin terhubung, isu-isu sensitif seperti dengan cepat membesar dan keluar dari kendali, mengarah pada potensi konflik yang lebih luas.

Sementara beberapa pihak melihat penggunaan isu identitas sebagai strategi politik yang efektif, dampaknya terhadap kohesi sosial sangat merusak. Ketegangan antara pribumi dan non-pribumi menciptakan jurang pemisah yang dalam di masyarakat, menghambat upaya untuk membangun persatuan nasional yang sejati. Ini juga dapat mengalihkan perhatian dari masalah-masalah mendasar lainnya seperti ketidaksetaraan ekonomi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum.

Mengatasi polarisasi ini membutuhkan upaya kolektif dari semua elemen masyarakat. Pemerintah harus berperan aktif dalam mempromosikan kebijakan yang adil dan inklusif, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan atau didiskriminasi. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan toleransi antarbudaya sejak usia dini. Kurikulum sekolah harus dirancang untuk mengajarkan sejarah multikultural Indonesia dan menghargai perbedaan.

Media massa, termasuk media sosial, juga harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang objektif dan mendorong dialog yang konstruktif. Platform media sosial harus bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memerangi penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu. Ini dapat dilakukan melalui kebijakan moderasi konten ketat dan kampanye edukasi publik tentang literasi digital.

Masyarakat sipil aktif mempromosikan dialog antar kelompok. Organisasi non-pemerintah, komunitas, dan tokoh masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ruang-ruang dialog yang aman dan inklusif, perbedaan dibahas dengan cara damai dan menghormati.

Pengalaman masa lalu seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Isu pribumi dan non-pribumi tidak boleh lagi digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Sebaliknya, keberagaman yang harus dilihat sebagai kekuatan yang memperkaya bangsa. Melalui upaya bersama, Indonesia membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan harmonis, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang etnis atau agamanya, merasa dihargai dan memiliki tempat yang sama dalam membangun masa depan bangsa.

5) **Membawa Perselisihan/Konflik**

Perselisihan mengenai agama dan klaim ketuhanan memang merupakan isu yang sangat kompleks dan tampaknya tidak akan pernah menemukan titik akhir. Bahkan, dalam masyarakat yang semakin sekuler, di mana ateisme atau agnostisisme mungkin lebih diterima, perdebatan mengenai keberadaan Tuhan dan kebenaran ilahiah tetap saja menjadi topik yang kontroversial dan penuh perbedaan pendapat. Fyodor Dostoevsky, seorang penulis dan filsuf terkenal, memberikan penjelasan yang sangat rasional tentang hal ini. Ia menyatakan, “Jika di alam semesta ini tidak ada Tuhan, maka semua perbuatan akan dibenarkan.” Kalimat ini menyiratkan bahwa tanpa suatu standar moral atau kebenaran ilahiah yang absolut, kebenaran bisa menjadi relatif dan subjektif, tergantung pada perspektif masing-masing individu atau kelompok.

Dostoevsky menyadarkan kita bahwa meskipun setiap kelompok atau individu mungkin memegang teguh pandangan mereka tentang kebenaran, hanya Tuhan yang bisa menetapkan kebenaran universal. Dalam konteks kehidupan manusia penuh dengan berbagai kepercayaan dan agama, ini berarti bahwa kebenaran bisa hadir dalam berbagai bentuk dan bisa diakui oleh berbagai kelompok dengan keyakinan yang berbeda. Namun, hal ini juga berarti bahwa tidak ada kelompok yang memiliki hak eksklusif untuk mengklaim kebenaran mutlak atas yang lain. Semua bisa benar menurut perspektif mereka sendiri, namun bisa salah pandangan kelompok lain.

Namun, apabila benturan identitas primordial ini dibiarkan terus-menerus tanpa upaya untuk mencari titik temu atau pemahaman bersama, demokrasi kita akan terancam berubah menjadi rimba belantara. Dalam

kondisi ini prinsip demokrasi mengedepankan kesetaraan, kebebasan, dan keadilan akan runtuh, digantikan oleh hukum rimba di mana yang kuat akan menemuk yang lemah dan mayoritas akan berkuasa tanpa memperhatikan hak-hak minoritas. Ini akan menciptakan ketidakadilan, diskriminasi, dan potensi konflik yang semakin besar. Untuk menghindari skenario buruk tersebut, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya. Pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengajarkan nilai toleransi, pluralisme, dan penghargaan terhadap perbedaan sejak usia dini. Kurikulum pendidikan harus dirancang sedemikian rupa untuk mengajarkan siswa tentang keberagaman agama dan budaya serta pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Pemerintah dan para pemimpin masyarakat juga harus mengambil langkah proaktif untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi berbasis agama. Hukum dan kebijakan harus ditegakkan dengan tegas untuk melindungi hak-hak semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan mereka. Selain itu, media massa juga harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang objektif dan tidak memprovokasi perpecahan.

Dalam praktik demokrasi yang sehat, perbedaan pendapat dan keyakinan seharusnya menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan. Kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Namun, kebebasan ini juga diimbangi dengan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain dan menjaga harmoni sosial.

Dialog antaragama dan kerjasama lintas budaya perlu terus didorong untuk membangun jembatan pengertian di antara berbagai kelompok masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui berbagai forum diskusi, seminar, kegiatan sosial bersama, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan ruang-ruang pertemuan yang produktif di mana perbedaan tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai kekayaan yang harus dirayakan bersama. Pada akhirnya, tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana menjadikan perbedaan sebagai modal sosial untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Kita harus berkomitmen untuk terus belajar dari satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa demokrasi kita tidak berubah menjadi rimba belantara, tetapi menjadi taman yang subur di mana semua warga hidup dengan damai, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama.

BAB VI

CONTOH PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA

1. Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017

Jakarta memiliki posisi strategis sangat menentukan arah politik di Indonesia. Meskipun wilayahnya tidak luas dan jumlah penduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, statusnya sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) memberikan Jakarta keistimewaan tersendiri. Keistimewaan ini menjadikan Jakarta selalu menjadi pusat perhatian, terutama pada momen-momen politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur. Ketika Pilkada Jakarta berlangsung, seluruh mata masyarakat Indonesia akan tertuju ke sana, mengamati dengan seksama setiap perkembangan dan dinamika terjadi. Ini tidak mengherankan, mengingat Jakarta sering kali dianggap sebagai barometer politik nasional. Apa yang terjadi di Jakarta, baik dari segi kebijakan maupun hasil pemilihan, kerap memberikan pengaruh signifikan terhadap politik di tingkat nasional. Selain itu, peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan media, setiap isu dan keputusan politik di Jakarta cenderung mendapat sorotan luas dan bisa mempengaruhi opini publik secara lebih luas di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Pilkada Jakarta bukan hanya ajang politik lokal, tetapi juga peristiwa nasional yang memiliki dampak besar terhadap konstelasi politik dan arah kebijakan di Indonesia.

Meskipun DKI Jakarta dikenal sebagai rumah bagi masyarakat yang sangat beragam, dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan sosial yang berbeda, kehidupan di ibu kota ini telah lama ditandai oleh harmoni dan kerukunan antarberbagai kelompok. Warga Jakarta terbiasa hidup berdampingan, menjalani kehidupan sehari-hari di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Namun, ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 berlangsung, lanskap sosial masyarakat Jakarta mengalami perubahan yang signifikan.

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tidak hanya menjadi ajang demokrasi untuk menentukan pemimpin, tetapi juga menyajikan sebuah panggung politik yang memunculkan polarisasi di tengah masyarakat. Polarisasi tidak hanya bersifat politik, tetapi juga memperlihatkan dimensi yang lebih sensitif, yakni polarisasi berbasis agama. Terjadi polarisasi secara langsung memengaruhi dinamika sosial Jakarta, memicu konflik dan ketegangan antarberbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan secara harmonis.

Sentimen agama menjadi salah satu pemicu utama polarisasi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama digaungkan secara massif dalam proses politik, baik oleh kubu pendukung maupun oleh aktor politik di berbagai pihak. Fenomena tidak menciptakan gesekan antarberbagai kelompok masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan, ketegangan, dan bahkan konflik terbuka di beberapa titik.

Polarisasi dan konflik yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menimbulkan dampak yang signifikan tidak hanya konteks politik, tetapi dalam pemahaman demokrasi dan identitas keindonesiaan. Konflik yang

muncul berbasis pada sentimen agama menggoyahkan fondasi pluralisme dan kerukunan yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Jakarta. Hal ini menantang pemahaman tentang esensi demokrasi yang seharusnya menghargai keberagaman, serta menggugah kesadaran akan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai keindonesiaan.

Peristiwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi sebuah catatan penting dalam sejarah politik Indonesia, menandai eskalasi polarisasi dan konflik dalam dinamika demokrasi di tingkat lokal. Dari pengalaman ini, kita belajar pentingnya mewaspadaikan isu-isu yang dapat memicu polarisasi dan konflik, mengupayakan dialog, pemahaman, dan kerjasama antarberbagai kelompok masyarakat untuk membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadilan. Semua pihak, baik pemimpin politik maupun masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan persatuan demi masa depan yang lebih baik bagi Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan.

Pada tahap kedua Pilkada Jakarta tahun 2017, ketegangan dan polarisasi dalam masyarakat Jakarta semakin meruncing. Putaran kedua ini mempertemukan dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mewakili dua visi dan pandangan yang berbeda mengenai masa depan ibu kota. Pasangan calon yang bertarung pada putaran kedua adalah pasangan petahana, Basuki Cahaya Purnama (Ahok) dan Djarot Saeful Hidayat, lawan pasangan Anis Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno. Pertarungan antara kedua pasangan ini tidak hanya berkutat pada isu-isu program dan kebijakan, tetapi juga melibatkan dimensi identitas dan politik.

Masyarakat Muslim Jakarta menjadi salah satu fokus utama dalam dinamika politik identitas pada Pilkada Jakarta tahun 2017. Gerakan politik identitas yang menggerakkan masyarakat Muslim menjadi signifikan dalam mendukung kemenangan pasangan Anies-Sandi. Isu berkaitan dengan agama, keberpihakan, dan identitas etnis menjadi sorotan utama dalam kampanye pasangan.

Pendukung pasangan Anies-Sandi menggalang massa dengan memanfaatkan sentimen agama sebagai alat untuk menggerakkan basis dukungan. Pesan-pesan politik yang disampaikan oleh pasangan ini dirancang untuk membangkitkan semangat dan kebanggaan keagamaan di kalangan masyarakat Muslim Jakarta. Dalam konteks politik identitas, mereka menonjolkan narasi kemenangan Anies-Sandi adalah kemenangan bagi Islam dan kemenangan bagi warga pribumi. Polarisasi politik identitas yang semakin memanas selama Pilkada Jakarta tahun 2017 menciptakan ketegangan sosial yang dapat dirasakan di berbagai lapisan masyarakat. Sentimen berkembang di tengah-tengah masyarakat cenderung menggiring opini publik ke arah persepsi bahwa perbedaan identitas agama dan etnis adalah faktor penentu dalam memilih calon pemimpin.

Penting untuk diingat bahwa polarisasi politik identitas bukanlah fenomena yang terjadi secara sepihak. Dinamika ini juga tercermin dari kebijakan dan retorika politik yang diusung oleh kedua kubu calon. Politisasi isu-isu identitas oleh kedua belah pihak dalam upaya untuk memperoleh dukungan politik telah memperkeruh suasana politik dan sosial di Jakarta. Dengan demikian, Pilkada Jakarta tahun 2017 bukan hanya menjadi ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencerminkan

kompleksitas politik identitas dan dinamika sosial di ibu kota Indonesia. Peristiwa ini menggarisbawahi perlunya refleksi mendalam mengenai bagaimana politik identitas dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik, serta pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada.

1) Awal Muncul Politik Identitas Pada PILKADA DKI Jakarta

Kebangkitan politik identitas Islam merupakan fenomena yang kompleks dan mempengaruhi dinamika sosial dan politik dalam masyarakat. Aspek penting dalam kebangkitan ini adalah upaya pembangunan citra diri dan penegakan harga diri di kalangan umat Islam. Hal ini sering kali dipicu oleh persepsi bahwa umat Islam merasa terhina atau tidak diakui dalam ranah sosial dan politik.

Dalam konteks politik, kebangkitan politik identitas Islam sering kali menekankan pada narasi bahwa sesama muslim harus saling mendukung dan memilih pemimpin yang seagama dan seiman. Isu seperti kepatuhan terhadap ajaran agama, keberpihakan terhadap kepentingan umat Islam, dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan menjadi fokus utama dalam kampanye politik identitas Islam. Namun, perlu diakui bahwa kebangkitan politik identitas Islam juga dapat memunculkan dinamika yang kompleks dalam masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan batas kuasa mayoritas terhadap mereka yang dipandang sebagai minoritas. Fenomena ini memicu ketegangan antaragama dan antarkelompok dalam masyarakat, pada akhirnya dapat mengancam stabilitas dan harmoni sosial.

Lebih lanjut, kepentingan elit politik sering kali dimanfaatkan dalam upaya memanipulasi politik identitas Islam demi mempertahankan kekuasaan dan kepentingan politik mereka. Dengan mengatasnamakan agama, elit politik memobilisasi massa dengan narasi keagamaan untuk mendukung agenda politik mereka, bahkan jika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kritis terhadap politik identitas Islam dan mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya terhadap stabilitas sosial dan politik. Pemilihan pemimpin berdasarkan kualifikasi, integritas, dan kompetensi yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebangkitan politik identitas Islam tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sempit.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, munculnya politik identitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memperkuat polarisasi antara dua pasangan calon yang bertarung. **Pertama**, persaingan kontestasi politik yang sengit antara pasangan Basuki Cahaya Purnama (Ahok) dan Djarot Saeful Hidayat dengan pasangan Anis Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno jadi pemicu utama. Dalam konteks, identitas politik terfokus pada perbedaan latar belakang etnis dan agama kedua pasangan calon.

Ahok, sebagai petahana, adalah sosok yang berasal dari etnis keturunan Cina dan beragama Kristen. Sementara itu, Anis Baswedan adalah sosok yang berasal dari suku Sunda keturunan Arab dan beragama Islam. Dinamika ini menempatkan Ahok sebagai kelompok minoritas, sementara Anis ditempatkan dalam posisi mayoritas dalam perspektif identitas etnis dan agama.

Perbedaan latar belakang ini tidak hanya menciptakan dinamika politik yang tegang, tetapi memicu sentimen dan identitas politik yang kuat di antara pendukung kedua pasangan calon. Masyarakat yang mendukung Ahok mungkin merasa bahwa mereka memperjuangkan hak-hak minoritas dan pluralisme, sementara pendukung Anis mungkin mengidentifikasi diri mereka dengan mayoritas agama dan etnis, serta merasa perlu untuk melindungi kepentingan dan identitas mereka.

Ketegangan politik identitas semakin memanaskan karena kedua pasangan calon dan pendukungnya secara aktif memanfaatkan isu-isu identitas etnis dan agama dalam kampanye mereka. Hal ini menciptakan sebuah narasi politik yang mengaitkan preferensi politik dengan identitas etnis dan agama, yang pada gilirannya memperkuat pembagian antara "kami" dan "mereka" dalam masyarakat. Dengan demikian, politik identitas dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu faktor yang memperumit dinamika politik dan sosial di Jakarta. Perbedaan latar belakang etnis dan agama antara kedua pasangan calon dan pendukungnya menjadi landasan untuk konflik politik berkembang, mempertajam polarisasi dalam masyarakat, dan menyorot kompleksitas politik identitas dalam konteks demokrasi lokal.

Walaupun Ahok, sebagai kelompok minoritas, telah mendapatkan dukungan dari partai politik besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang merupakan kekuatan politik nasional mayoritas di Indonesia, Golkar, PPP, PKB, dan Nasdem. Sedangkan Anis, dari kelompok mayoritas, menerima dukungan dari partai politik yang tidak berhasil memenangkan Pemilu, termasuk Gerindra, PKS, PAN, dan Perindo. Selain

mendapatkan dukungan dari partai politik, Anis juga mendapat dukungan dari kelompok masyarakat etnik Forum Betawi Rempug (FBR) dan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). FPI dikenal sebagai kelompok Islam garis keras yang kuat. Menurut keyakinan mereka, pemimpin haruslah seorang Muslim, bukan seorang kafir. Sangat tidak diperbolehkan bagi umat Islam memiliki pemimpin yang kafir. Keyakinan ini seringkali disuarakan dalam setiap kampanye untuk mempengaruhi pemilih di DKI Jakarta.

Factor **Kedua**, Politik identitas muncul sebagai hasil dari serangkaian peristiwa yang memengaruhi dinamika politik DKI Jakarta, terutama dalam konteks Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Salah satu faktor utama yang memicu munculnya politik identitas adalah Gerakan 212 yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2016. Gerakan ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, yang dianggap melecehkan keyakinan agama orang lain, umat Islam.

Tanggal 27 September 2016, Ahok memberikan pidato di Kepulauan Seribu yang menyinggung ayat Al Quran Surat Almaidah Ayat 51 tentang pedoman memilih pemimpin. Pidato ini dianggap menistakan agama Islam oleh sebagian masyarakat, yang kemudian memicu gelombang protes besar dari umat Islam di seluruh Indonesia. Puncaknya adalah gelombang demonstrasi damai pada tanggal 2 Desember 2016, yang dihadiri oleh lebih dari dua juta umat Islam Indonesia, dikenal dengan gerakan 212. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri menyatakan bahwa ucapan Ahok telah menghina Al Quran dan ulama, serta meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadapnya.

Dampak dari Gerakan 212 tidak hanya terbatas pada demonstrasi besar-besaran, tetapi juga melahirkan suatu forum yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), yang dipimpin oleh Bachtiar Nasir. Forum ini menampung organisasi kemasyarakatan berbasis Islam, termasuk Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Rizieq Shihab, seorang ulama yang vokal dan berpengaruh. FPI menyuarakan ajakan untuk tidak memilih pemimpin yang dianggap kafir.

Gerakan 212 dan GNPF-MUI, bersama dengan dukungan dari berbagai organisasi Islam lainnya, membentuk forum silaturahmi yang kemudian menjadi kekuatan politik besar yang diperhitungkan dalam arena politik. Forum silaturahmi Gerakan 212 berperan dalam mendukung dan memenangkan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Peristiwa Gerakan 212 dan dampaknya dalam politik DKI Jakarta menunjukkan bagaimana politik identitas dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam proses pemilihan kepemimpinan daerah. Kontroversi yang dihasilkan dari pernyataan Ahok dan respons dari masyarakat, khususnya umat Islam, telah membentuk narasi politik yang kuat, dengan implikasi yang signifikan pada arah politik dan dinamika sosial di wilayah tersebut.

Faktor ***Ketiga***, Dominasi penguasaan ekonomi oleh etnis minoritas Cina di Jakarta telah menjadi salah satu pendorong utama munculnya politik identitas dalam Pilkada 2017. Meskipun etnis Cina merupakan minoritas, namun kekuatan ekonomi yang mereka miliki cukup dominan dalam mengendalikan sumber daya ekonomi di ibu kota. Hal ini tercermin dari dominasi pemilik

perusahaan dan toko-toko di pusat-pusat perbelanjaan yang sebagian besar dikuasai oleh orang-orang Cina. Di sisi lain, etnis pribumi yang mayoritas sering kali hanya menjadi karyawan atau pekerja di bawah kepemilikan etnis Cina. Kesenjangan sosial yang dihasilkan dari ketidakseimbangan tidak menciptakan ketidakadilan ekonomi, tetapi menimbulkan rasa kecemburuan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat pribumi.

Setelah Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ada pergeseran perilaku. Orang Cina etnis sering merasa sombong dan rasa lebih baik daripada karyawan pribumi. Rasa tidak hormat sebabkan ketidaknyamanan di tempat kerja dan ketegangan antar-etnis tempat kerja. Perilaku tidak menghargai keberadaan dan martabat bangsa pribumi menyebabkan sentimen anti-Cina di kalangan mayoritas penduduk pribumi.

Masyarakat pribumi menganggap kehadiran orang Cina dalam posisi kepemimpinan politik, khususnya Ahok sebagai gubernur, sebagai ancaman yang signifikan bagi masyarakat pribumi. Agama awal muncul sebagai semangat perjuangan dan solidaritas untuk melindungi martabat agama mayoritas, tetapi kemudian berkembang jadi kebencian terhadap etnis Cina secara keseluruhan.

Politik identitas muncul selama Pilkada 2017 bidang agama, ekonomi, dan sosial. Kepentingan dan kedaulatan masyarakat pribumi dianggap terancam oleh kehadiran etnis Cina di jajaran pemerintahan. Ketidakpuasan terhadap ketidakadilan ekonomi yang terus-menerus menambah semangat ini. Kehidupan sehari-hari warga Jakarta telah dipengaruhi oleh politik identitas, yang mengganggu keakraban bernegara mereka.

2. Politik Identitas di Manado

1) Geografis dan Demografis

Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengalami sejumlah perubahan administratif sejak tahun 2014. Pada tahun ini, terjadi pemekaran kecamatan yang berjumlah sembilan menjadi sebelas kecamatan. Meskipun demikian, jumlah kelurahan di Manado tetap sama, yakni 87 kelurahan atau desa. Wilayah administratif Manado memiliki luas sebesar 157,26 km². Dalam hal populasi, penduduk Manado mencapai angka 419.596 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 210.706 jiwa laki-laki dan 208.890 jiwa perempuan. Ini menunjukkan bahwa penduduk Manado memiliki perincian gender cukup seimbang, meskipun angka pastinya mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu.

2) Sosio-Religi Masyarakat

Sejak zaman dahulu, Manado telah dikenal sebagai kota yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen. Mayoritas dari mereka adalah penduduk asli yang berasal dari berbagai etnis, seperti suku Minahasa, Tombulu, dan Sangir. Di antara beragam etnis yang ada di Manado, suku Minahasa mendominasi dengan jumlah sekitar 70%, dan mereka tersebar di seluruh kecamatan di kota ini. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah etnis lokal lainnya yang turut mendiami Manado, seperti suku Bugis, Makassar, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Batak.

Selama bertahun-tahun, suku Minahasa, yang mayoritas beragama Kristen, tetap mendominasi hampir semua aspek kehidupan di Manado, terutama dalam bidang politik dan birokrasi pemerintahan. Masyarakat Minahasa cenderung memegang peranan penting dalam berbagai struktur kekuasaan, baik di tingkat lokal maupun

nasional. Seringkali menempati posisi-posisi strategis, seperti kepala daerah (gubernur dan walikota), serta kepala dinas di berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun vertikal.

Tradisi ini telah berlangsung secara konsisten dari masa ke masa, di mana orang-orang Minahasa selalu mempertahankan posisi mereka sebagai "nomor satu" dalam dunia politik dan birokrasi Manado. Hal ini tercermin dalam kepemimpinan yang secara konsisten diisi oleh orang-orang Minahasa dalam berbagai jabatan penting di pemerintahan, mencerminkan dominasi mereka dalam ranah politik dan administratif kota ini. Meskipun Manado merupakan tempat yang kaya akan keragaman etnis, dominasi politik dan pemerintahan oleh suku Minahasa telah menjadi ciri khas yang menonjol dalam sejarah dan dinamika perkembangan kota ini.

Berdasarkan data yang tersedia, Manado memiliki keragaman agama yang cukup signifikan. Data penduduk tahun 2011 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Kristen, dengan jumlah mencapai 290.665 jiwa. Sementara itu, agama Islam juga memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu sebanyak 175.569 jiwa. Agama Katolik diikuti dengan jumlah 30.275 jiwa, sementara agama Buddha diikuti oleh 6.436 jiwa. Ada juga minoritas agama Hindu dengan jumlah 2.592 jiwa, dan agama Khonghucu dengan jumlah 600 jiwa.

Dari segi tempat ibadah, Manado juga memiliki keragaman yang mencerminkan pluralitas agama yang ada di kota ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat adanya 597 gereja sebagai tempat ibadah bagi umat Kristen, 199 masjid, dan 36 mushalla untuk umat Islam. Selain itu, terdapat empat pura untuk

umat Hindu, dan 18 vihara/TITD umat Buddha. Dengan adanya jumlah cukup signifikan dari berbagai tempat ibadah ini, Manado menunjukkan keberagaman budaya dan agama yang menjadi salah satu ciri khasnya sebagai kota multikultural. Hal ini juga mencerminkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Manado.

3) Lahirnya Kelompok Identitas Nyiur Melambai: Bermuara dari Semangat Permesta

Kelahiran kelompok identitas di Sulawesi Utara (Sulut) dan Manado memiliki akar yang dalam dalam sejarah gerakan politik di Indonesia, salah satunya adalah gerakan Perjuangan Rakyat Semesta atau yang dikenal dengan singkatan Permesta, yang berlangsung dari tahun 1957 hingga 1961. Permesta merupakan sebuah gerakan militer mencuat sebagai respons terhadap ketegangan politik dan ekonomi di Indonesia pada masa itu, terutama terkait dengan ketidakpuasan pemerintahan pusat.

Perjuangan Permesta bukanlah gerakan yang mengatasnamakan kelompok identitas tertentu, seperti agama atau etnis, namun lebih merupakan respons dari sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Utara, terhadap kondisi politik yang ada. Gerakan ini melibatkan berbagai kelompok dan elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh militer, politisi, dan kelompok masyarakat sipil. Meskipun tidak secara eksplisit mengusung identitas agama atau etnis tertentu, namun dampak dan implikasi dari gerakan Permesta tetaplah signifikan dalam membentuk identitas politik di Sulawesi Utara, termasuk di Manado. Gerakan ini telah memberikan kontribusi dalam membentuk kesadaran politik dan identitas lokal di daerah tersebut, serta memengaruhi dinamika politik dan

sosial di masa mendatang. Dengan demikian, walaupun tidak secara langsung mengenalkan atau menetapkan identitas tertentu, gerakan Permesta tetaplah menjadi bagian dari warisan sejarah yang turut membentuk identitas politik dan sosial di Sulawesi Utara, termasuk di kota Manado.

Gaung Permesta memang terasa lebih kuat di Manado dibandingkan di daerah-daerah lain. Ini karena sejumlah faktor, termasuk partisipasi aktif tokoh-tokoh

Islam lokal yang ikut bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang mayoritas beragama Kristen. Salah satu contohnya adalah tokoh seperti Kyai Haji Arifin Assegaf. Dalam era Permesta, Kyai Haji Arifin Assegaf, seorang ulama kharismatik dengan keturunan Arab-Minahasa dan Jawa, dihormati dan diakui keberadaannya di Sulawesi Utara hingga hayatnya. Ia bahkan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Permesta di Maluku Utara.

Namun, terdapat kesalahpahaman yang sering terjadi terkait gerakan Permesta, di mana gerakan ini sering diidentikkan sebagai gerakan yang didominasi oleh orang Minahasa yang beragama Kristen. Padahal, seperti yang terlihat dari partisipasi tokoh-tokoh Islam seperti Kyai Haji Arifin Assegaf, gerakan Permesta melibatkan berbagai kelompok agama dan etnis di Sulawesi Utara, tidak hanya dari kalangan Kristen. Meskipun demikian, persepsi ini telah membentuk narasi tersendiri tentang gerakan Permesta, terutama dalam konteks identitas politik di daerah tersebut.

Gerakan Permesta masih menjadi bagian integral dari ingatan kolektif masyarakat lokal hingga saat ini. Untuk memelihara dan mengenang perjuangan Permesta, pemerintah setempat memutuskan untuk membangun

patung Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alex Evert Kawilarang. Pembangunan patung ini dilakukan pada era Orde Baru dan ditempatkan di ruang publik, tepatnya di Taman Kesatuan Bangsa (TKB) Manado. Simbolisme yang terkandung dalam bentuk patung atau tugu pahlawan Permesta memiliki makna yang sangat penting sebagai "jejak-jejak ingatan" bagi masyarakat lokal. Patung tersebut menjadi sebuah penanda yang jelas, mengingatkan bahwa orang Minahasa pada masa lalu memiliki semangat patriotik yang kuat dan berjuang demi menentukan nasib mereka sendiri, yakni untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan wilayah mereka (self-determination). Dengan mempertahankan dan merawat simbol-simbol seperti patung Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, masyarakat Manado memperkuat hubungan mereka dengan masa lalu dan menghargai perjuangan pahlawan yang telah berjuang untuk kepentingan kolektif. Ini juga menjadi cara untuk menjembatani manusia pada masa kini dengan warisan sejarah mereka, memperkaya pemahaman akan identitas dan jati diri mereka sebagai bagian dari perjalanan sejarah yang kaya dan beragam.

Jejak-jejak ingatan yang tersisa dari masa lalu tentang gerakan Permesta, bersama dengan semangat militansi yang masih hidup, memberikan landasan bagi lahirnya beberapa kelompok identitas pada masa reformasi. Periode awal reformasi, khususnya pada tahun 1998, ditandai dengan mulainya perbincangan tentang gagasan komunitas adat dan etnis. Pada bulan Agustus 1999, momentum ini mencapai puncaknya dengan diselenggarakannya Kongres Minahasa Raya di Kota Tomohon, Sulut. Kongres ini menjadi platform penting

bagi warga Minahasa untuk merumuskan aspirasi dan kepentingan bersama, mengukuhkan identitas mereka sebagai bagian dari komunitas adat dan etnis yang kuat di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, jejak sejarah Permesta menjadi semacam katalisator yang memicu kesadaran akan pentingnya memperkuat identitas etnis dan adat. Kongres Minahasa Raya menjadi wadah untuk menyatukan pemikiran dan langkah-langkah menuju pengakuan yang lebih besar atas hak-hak dan kepentingan komunitas Minahasa dalam ranah politik, sosial, dan budaya. Hal ini mencerminkan bagaimana warisan sejarah dapat terus memengaruhi perkembangan identitas dan gerakan sosial di masa kini.

Kongres Minahasa Raya muncul sebagai respons tokoh-tokoh Minahasa terhadap politik nasional pada masa itu yang dianggap sebagai marginalisasi terhadap kaum minoritas. Dalam konteks ini, kongres tersebut menjadi salah satu wadah penting yang memungkinkan para tokoh Minahasa untuk bersatu dan mendiskusikan berbagai isu, terutama terkait masa depan daerah mereka sendiri. Selama ini, masyarakat Minahasa merasa sebagai *double minority*, yakni minoritas baik dari segi agama maupun etnis. Hal ini menyebabkan mereka merasa terancam dan terpinggirkan dalam dinamika politik dan sosial di tingkat nasional. Seperti yang dikemukakan oleh Edward Said, gerakan resistensi politik lokal, baik dalam ranah politik maupun sosial-budaya, merupakan bentuk baru dari kritik yang didorong oleh pemahaman yang lebih dalam tentang identitas. Di tengah arus globalisasi yang seringkali mendukung hegemoni politik nasional atau homogenisasi, munculnya kekuatan lokal menjadi suatu antitesis yang kuat. Kekuatan lokal ini menantang

upaya penyamaan dan homogenisasi, serta menegaskan keberagaman identitas dan kepentingan lokal. Kongres Minahasa Raya menjadi cermin dari upaya para tokoh lokal memperkuat identitas dan kepentingan mereka dalam menghadapi dinamika politik nasional cenderung merendahkan peran kaum minoritas.

4) Perkembangan Politik Identitas: Identitas Ke-Minahasa-An Yang Terpecah-Pecah, Dominasi, Dan Diperebutkan

Di wilayah berjuduk Nyiur Melambai, kelompok identitas yang paling populer dan memiliki anggota terbanyak adalah Brigade Manguni Indonesia (BMI). Sejak terbentuknya pada tahun 2002, BMI telah menjadi kelompok identitas pertama dan tertua di daerah tersebut. Dengan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri, seperti di Belanda, Malaysia, dan Brunei, BMI menjadi simbol kekuatan dan solidaritas bagi banyak orang.

Namun, BMI bukanlah satu-satunya kelompok identitas di daerah tersebut. Ada juga Laskar Manguni, Legium Christum, Makapetor (Masyarakat Kawanua Pecinta Toleransi), Milisi Waraney, Pisok, Waraney Wuaja, Milisi Kristi, dan Bantik yang turut berkontribusi dalam menguatkan ikatan identitas etnis dan agama di Manado. Seperti yang disampaikan oleh Bikhu Parekh (2008:218-219), budaya memiliki peran penting dalam membentuk jaringan dukungan, solidaritas, sumber daya moral, dan emosional bagi anggotanya. Orang-orang di Manado juga merasa berkewajiban untuk memelihara dan mewariskan budaya yang dianut. Hal ini mencerminkan realitas sosial di mana orang-orang di Manado cenderung terikat pada identitas etnis dan agama mereka.

Identitas etnis, khususnya Minahasa, menjadi pusat perhatian dan arena pertarungan di antara kelompok-kelompok tersebut. Meskipun awalnya tergabung dalam satu "payung" besar, identitas tersebut akhirnya terpecah-belah menjadi beberapa bagian yang mencari atau membentuk kelompok-kelompok baru yang juga berbasis identitas Minahasa. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika pembentukan dan penguatan identitas di Manado. Organisasi pertama dan tertua di Manado dan Sulawesi Utara, Brigade Manguni Indonesia (BMI) memegang peranan dominan dalam menentukan arah dan dinamika kelompok identitas di wilayah tersebut. Sebagai mentor, BMI telah melahirkan banyak organisasi baru yang berbasis Minahasa di Manado. Seorang guru yang melatih murid-muridnya, BMI telah mencetak banyak pengikut yang kemudian menjadi pemimpin di kelompok-kelompok baru.

Contoh konkret hasil mentornya BMI adalah Laskar Manguni (LM), sebuah kelompok identitas yang muncul sekitar bulan Februari 2016 di Manado. Sebagian besar anggota LM sebelumnya adalah tokoh utama dalam BMI, namun kemudian memutuskan untuk meninggalkan BMI dan membentuk kelompok baru yang mereka sebut sebagai Laskar Manguni. Perjalanan dari BMI ke LM mencerminkan dinamika perubahan dan pergeseran dalam politik dan identitas di Manado. Awalnya terikat satu kelompok, anggota merasa tidak puas atau memiliki pandangan berbeda kemudian beralih dan membentuk kelompok baru yang sesuai dengan visi dan misi mereka sendiri. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dan warisan BMI dalam membentuk identitas dan gerakan di kalangan masyarakat Minahasa di Manado.

Banyak orang tertarik untuk membentuk organisasi berbasis etnis Minahasa karena ini merupakan mayoritas di Sulawesi Utara, sehingga menjadi pusat dari berbagai kontestasi dan perebutan pengaruh. Identitas Minahasa bukan hanya sekadar label etnis, melainkan juga simbol kekuatan dan akses yang membuka peluang luas dalam jejaring sosial, politik, dan ekonomi. Bagi siapa saja yang dapat mengidentifikasi atau berafiliasi dengan identitas ini, baik itu penduduk lokal maupun pendatang, terdapat kesempatan besar memperluas pengaruh dan mencapai tujuan pribadi maupun kelompok.

Dalam "tubuh" ke-Minahasa-an, akses ke berbagai sumber daya menjadi lebih mudah. Jejaring sosial yang kuat memberikan dukungan emosional dan moral, jaringan politik membantu memperlancar jalan untuk mencapai posisi strategis. Selain itu, ikatan etnis ini juga memberikan akses ekonomi signifikan, karena banyak peluang usaha dan karier yang terbuka lebih luas bagi mereka dalam kelompok berbasis Minahasa.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pihak, termasuk "orang luar" sekalipun, berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari identitas Minahasa atau bahkan membentuk organisasi baru berbasis etnis ini. Dengan demikian, Minahasa tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga medan strategis di mana berbagai aktor berupaya memperoleh keuntungan dan kekuasaan. Hal ini mencerminkan pentingnya identitas etnis dalam membentuk struktur sosial dan politik di Sulawesi Utara, serta betapa dinamisnya persaingan dan kolaborasi dalam komunitas Minahasa.

Minahasa mendominasi instansi pemerintahan dan politik Sulawesi Utara, mencerminkan kekuatan dan pengaruh mereka yang signifikan di wilayah tersebut. Di tingkat provinsi dan kota, posisi strategis seperti Gubernur Sulawesi Utara dan Walikota Manado hampir selalu dipegang oleh Minahasa. Dominasi ini telah terbukti kuat terutama setelah reformasi politik bergulir di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan dan politik, orang Minahasa selalu menempati posisi superior dan menunjukkan keinginan yang kuat untuk tidak menjadi nomor dua di daerah mereka sendiri.

Fenomena ini membuka wawasan tentang peran kelompok identitas Minahasa. Kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai “pintu” untuk menembus batas-batas lapisan struktural yang ada. Melalui keterlibatan dalam kelompok identitas berbasis Minahasa, individu dan komunitas dapat lebih mudah mendekati atau didekati oleh penguasa. Ini tidak hanya membantu mereka dalam mengamankan posisi strategis, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan politik mereka.

Dengan kata lain, kelompok identitas berbasis Minahasa menjadi alat untuk mobilitas sosial dan politik di Sulawesi Utara. Mereka memungkinkan anggotanya untuk mengakses sumber daya dan kekuasaan yang mungkin sulit dicapai tanpa ikatan etnis yang kuat. Dalam struktur sosial dan politik yang kompetitif, keberadaan kelompok identitas ini memainkan peran vital dalam membentuk dinamika kekuasaan di daerah tersebut, memperlihatkan betapa pentingnya identitas etnis dalam pengaruh dan dominasi politik di Sulawesi Utara.

Secara personal, hubungan antar kelompok identitas di Sulawesi Utara, terutama di Manado, tergolong harmonis meskipun mereka tergabung dalam organisasi yang berbeda. Meskipun ada persaingan dalam hal memperoleh sumber ekonomi seperti proyek atau dalam pertarungan politik dengan melihat massa sebagai sumber daya politik, mereka tidak bermusuhan. Persaingan ini sering terlihat dalam upaya untuk menarik dukungan dan menentukan yang mendukung siapa. Namun, mereka juga memiliki kecenderungan untuk saling berbagi kekuasaan.

Contohnya, pada Pilkada Walikota Manado, BMI mendukung calon incumbent Vicky Lumentut yang akhirnya terpilih, sementara Laskar Manguni mendukung pasangan lain. Kelompok-kelompok identitas di Manado dan Sulut tidak hanya diikat oleh faktor primordial seperti agama atau etnis, tetapi lebih oleh kepentingan. Agama atau etnis dapat menjadi alat kepentingan di saat tertentu. Walaupun BMI terlihat dominan, bersikap pragmatis dan tidak berusaha menguasai semuanya. Demi kepentingan bersama, menjelang pilkada, beberapa kelompok identitas sering terlihat bersatu memenangkan pilihan politik.

Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kelompok identitas berinteraksi dengan akrab, menunjukkan bahwa hubungan mereka didasari oleh pragmatisme dan kepentingan bersama, bukan semata-mata oleh identitas primordial. Dalam pandangan Pierre Bourdieu (1984:11-17), konsep "distinction" atau pembedaan menjelaskan bagaimana dalam masyarakat terdapat penghakiman berkaitan dengan selera, ekonomi, dan seni. Menurut Bourdieu, terdapat hierarki dalam selera di mana ada yang dianggap memiliki selera tinggi dan ada yang memiliki selera rendah. Proses pembedaan

sangat nyata karena kebudayaan dalam masyarakat sering kali dibayangkan bersifat aristokrat tingkatan yang jelas.

Bourdieu mengamati bahwa masyarakat cenderung terpecah-belah berdasarkan justifikasi selera yang sering kali tidak sepenuhnya akurat. Namun, meskipun ada perbedaan dan pembedaan yang tajam, terdapat titik-titik di mana masyarakat bisa bersatu. Arena atau medan sosial adalah tempat di mana berbagai kelompok saling bersaing untuk pengakuan, kekuasaan, dan sumber daya.

Dalam konteks kelompok identitas di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, konsep "distinction" ini dapat terlihat dalam bagaimana kelompok-kelompok tersebut bersaing dan berusaha menunjukkan keunggulan masing-masing. Meski persaingan dalam mendapatkan sumber ekonomi dan pengaruh politik, kelompok ini menemukan cara bersatu ketika diperlukan, terutama demi kepentingan bersama. Contohnya, dalam persaingan politik seperti Pilkada Walikota Manado, meskipun BMI mendukung calon incumbent Vicky Lumentut dan Laskar Manguni mendukung calon lain, bisa menunjukkan sikap pragmatis. Kepentingan bersama bisa menjadi faktor pemersatu yang kuat. Selain itu, hubungan personal yang harmonis dan interaksi sehari-hari yang akrab antara anggota berbagai kelompok identitas menunjukkan bahwa perbedaan selera dan kepentingan tidak selalu menjadi penghalang bagi persatuan.

Arena sosial ini menjadi tempat di mana identitas etnis dan kepentingan politik saling bersilangan dan berinteraksi. Meski ada perbedaan yang jelas dalam selera dan kepentingan, kelompok-kelompok ini tetap dapat menemukan titik temu yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama demi tujuan yang lebih besar. Ini

menunjukkan bahwa dalam masyarakat, perbedaan dan persatuan bisa berjalan berdampingan, tergantung pada konteks dan kepentingan yang ada.

Relasi antara kelompok identitas dengan politisi dan pemerintah bersifat simbiosis mutualistik, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Menggunakan istilah teori Powercube (Kubus Kekuasaan) oleh John Gaventa, mereka memanfaatkan “Kekuasaan yang Tersembunyi (Hidden Power)” untuk keuntungan pribadi, kekuasaan, dan hak istimewa, yang menjadi alat bagi para penguasa mempertahankan status quo atau mengejar kekuasaan. Meskipun etnis Minahasa Kristen mendominasi hampir semua kelompok identitas di Manado, persaingan ketat dan perebutan dalam arena tetap menyisakan ruang untuk kompromi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika melihat relasi sosial berbagai identitas bisa saling berbaur.

3. Politik Identitas di Maluku Utara 2018

Pada kasus Maluku Utara, politik identitas sering kali dimainkan dengan mengangkat isu politik etnis, terutama selama momentum Pilkada 2018. Isu digunakan secara strategis dalam materi kampanye dan diperkuat melalui modal kekerabatan politik antara calon dengan pemuka agama dan adat. Aktor politik yang memainkan isu ini biasanya berasal dari tim kampanye calon dan organisasi kemasyarakatan yang mendukung salah satu calon. Meskipun secara kasat mata tidak selalu terlihat, isu politik identitas menjadi komoditas politik yang dianggap mampu mendongkrak suara pemilih.

Isu politik identitas ini mempengaruhi kualitas hasil pemilu atau pilkada. Ketika isu ini menguat, ia menjadi tolak ukur kualitas pemilih yang ikut berpartisipasi dalam pemilu atau pilkada. Jika pemilih lebih dominan memilih berdasarkan pertimbangan politik identitas, maka kualitas pemilih masih berada pada kategori pemilih naïf. Pemilih seperti ini cenderung kurang kritis dan rasional dalam menentukan pilihannya. Mereka lebih mudah dipengaruhi oleh sentimen etnis dan hubungan kekerabatan daripada oleh program atau kinerja calon yang bersangkutan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun politik identitas bisa efektif dalam menarik dukungan suara, ia juga mencerminkan kelemahan dalam proses demokrasi. Pemilih yang memilih berdasarkan identitas cenderung mengabaikan aspek penting lainnya seperti kompetensi, integritas, dan visi calon untuk masa depan. Oleh karena dalam jangka panjang, penggunaan isu politik identitas dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan matang. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemilih menjadi lebih kritis dan rasional sangat penting agar pemilu atau pilkada menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Pada momentum Pilkada tahun 2018, Maluku Utara termasuk daerah yang rentan terhadap isu politik identitas. Kerentanan ini diungkapkan oleh salah satu komisioner Bawaslu dalam wawancara mengenai daerah-daerah yang rawan dan menjadi perhatian khusus KPU dan Bawaslu. Untuk meredam penggunaan isu politik identitas yang bermuatan SARA, dilakukan kerjasama oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mencegah penyebaran isu tersebut, terutama di media sosial.

Menurut KPU dan Bawaslu, politik identitas tidak melanggar undang-undang pemilu karena konten yang melibatkan isu politik identitas merupakan dinamika yang muncul secara natural dalam masyarakat. Masyarakat merasa bahwa partisipasi dan aspirasi politik mereka diwakili oleh calon yang bertarung dalam Pilkada. Oleh karena itu, meskipun isu politik identitas sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk menarik dukungan, secara hukum tidak diatur oleh undang-undang pemilu.

Dalam menghadapi tantangan ini, langkah yang ditempuh oleh Bawaslu dan KPU lebih berfokus pada proses pencegahan. Mereka berupaya untuk mengurangi munculnya isu politik identitas melalui sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran pemilih agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah dan menimbulkan ketegangan sosial. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mendorong pemilih agar lebih kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politik. Pendidikan politik intensif diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya memilih berdasarkan program kerja dan kapasitas calon, bukan semata-mata berdasarkan identitas etnis/kekerabatan. Kualitas pemilu dapat meningkat dan menghasilkan pemimpin yang lebih kompeten serta mampu mewakili kepentingan seluruh masyarakat secara adil.

Pada momentum Pilkada tahun 2018, Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang paling rentan terhadap isu politik identitas. Kerentanan ini diungkapkan oleh salah satu komisioner Bawaslu dalam wawancara mengenai daerah-daerah rawan yang menjadi perhatian khusus bagi KPU dan Bawaslu. Dalam upaya meredam penggunaan

isu politik identitas yang bermuatan SARA, Bawaslu dan KPU bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencegah penyebaran isu-isu tersebut, terutama di media sosial.

Menurut KPU dan Bawaslu, politik identitas tidak melanggar undang-undang pemilu karena konten yang melibatkan isu politik identitas merupakan dinamika yang muncul secara natural dalam masyarakat. Masyarakat merasa bahwa partisipasi dan aspirasi politik mereka diwakili oleh calon-calon yang bertarung dalam Pilkada. Oleh karena itu, meskipun isu politik identitas sering dimanfaatkan oleh aktor politik untuk menarik dukungan, secara hukum hal ini tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang pemilu.

Dalam menghadapi tantangan ini, Bawaslu dan KPU mengambil langkah-langkah pencegahan yang berfokus pada edukasi dan sosialisasi. Mereka berupaya mengurangi munculnya isu politik identitas dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran pemilih agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah dan menimbulkan ketegangan sosial. Melalui pendidikan politik intensif, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya memilih berdasarkan program kerja dan kapasitas calon, bukan semata-mata berdasarkan identitas etnis atau kekerabatan.

Upaya bertujuan mendorong pemilih menjadi lebih kritis dan rasional menentukan pilihan politik. Dengan meningkatkan kualitas pemilih, diharapkan pemilu dapat menghasilkan pemimpin lebih kompeten dan mampu mewakili kepentingan seluruh masyarakat secara adil. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk

memperkuat demokrasi dan memastikan proses pemilu berjalan integritas dan keadilan, hingga menghasilkan pemerintahan benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Penggunaan media sosial sebagai sarana melakukan agitasi dan propaganda politik sangat dimanfaatkan oleh partai politik dan aktor politik. Media sosial diyakini memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik karena platform ini digunakan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Keberadaan media sosial telah menciptakan ruang yang luas bagi penyebaran informasi dan ide-ide politik secara cepat dan efektif. Ini termasuk penyebaran isu-isu terkait politik identitas, yang menjadi semakin masif dan merata berkat dukungan media sosial.

Politik identitas yang mengandalkan faktor etnis, agama, atau kekerabatan menjadi lebih mudah diakses dan disebarakan melalui media sosial. Aktor politik memanfaatkan algoritma platform ini untuk menargetkan pesan-pesan mereka kepada audiens tertentu, memperkuat sentimen kelompok, dan menggalang dukungan. Dengan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara viral, media sosial memungkinkan pesan politik identitas untuk menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat.

Kecepatan dan luasnya jangkauan media sosial berarti bahwa isu sensitif dan kontroversial dapat dengan cepat mempengaruhi opini publik. Ini menimbulkan tantangan besar dalam menjaga integritas proses politik dan sosial, karena informasi yang beredar sering kali tidak diverifikasi dan dapat memicu ketegangan serta konflik. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam konteks politik pemantauan yang ketat dan tanggung jawab dari semua pihak untuk platform ini digunakan secara etis dan tidak merusak kohesi sosial.

Peran media sosial dalam menguatnya politik identitas menunjukkan betapa pentingnya literasi digital dan pendidikan politik bagi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dampak negatif penyebaran informasi yang tidak diverifikasi dan mempromosikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab harus terus ditingkatkan. Hanya dengan cara ini, media sosial dapat menjadi alat yang positif untuk partisipasi politik dan demokrasi yang sehat.

4. Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

Pada pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2018, jelas bagaimana kepentingan politik memainkan peran penting melalui berbagai macam aksi yang dilakukan oleh berbagai kelompok dalam kampanye. Dua isu utama yang terus menerus muncul adalah isu tentang memiliki seorang putra daerah yang memimpin Sumatera Utara, serta isu bela Islam yang menjadi perhatian serius dalam konteks politik lokal. Pertama-tama, isu tentang keberadaan putra daerah sebagai pemimpin Sumatera Utara mencerminkan pentingnya representasi lokal dalam kepemimpinan. Sebagian besar masyarakat, memiliki seorang pemimpin yang berasal dari daerah itu sendiri dianggap sebagai jaminan akan pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi lokal, serta komitmen yang lebih kuat terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini menjadi tema diangkat oleh berbagai kelompok dan pendukung pasangan calon tertentu, dengan tujuan untuk memenangkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat Sumatera Utara.

Selain itu, isu bela Islam juga memainkan peran signifikan dalam dinamika politik Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, isu agama seringkali menjadi pendorong utama dalam mobilisasi massa dan penggalangan dukungan politik. Isu jadi semakin penting mengingat meningkatnya isu-isu keagamaan dan identitas dalam politik nasional. Pasangan calon dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka akan melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai agama Islam dianggap memiliki keunggulan dalam meraih dukungan pemilih, terutama dari kalangan agama Islam yang konservatif.

Dalam konteks pasangan calon pada pemilihan kepala daerah tahun 2018, pasangan nomor urut satu, Edi Rahmayady-Musa Rajeckshah, mengambil pendekatan lebih menekankan aspek lokal dan identitas Sumatera Utara, sementara pasangan nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus, mungkin lebih fokus pada isu-isu keagamaan dan upaya untuk memperoleh dukungan dari komunitas Muslim. Keduanya secara aktif menggunakan isu-isu tersebut sebagai strategi untuk memenangkan hati dan suara pemilih, dengan harapan untuk meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah Sumatera Utara. Melalui berbagai macam aksi kampanye dan penekanan terhadap isu yang relevan dengan kepentingan politik lokal, pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2018 menjadi sebuah ajang yang memperlihatkan bagaimana dinamika politik dan strategi kampanye jadi bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia. Perkembangan dan narasi politik lokal menjadi cerminan dari kompleksitas dan dinamika dalam konteks politik regional di Indonesia.

Dampak dominasi memiliki kepentingan politik menggunakan ulama sebagai tokoh politik dan memanfaatkan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) menjadi semakin jelas dalam konteks pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2018. Pada konteks ini, lawan politik dari pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah terdiri dari pasangan yang memiliki perbedaan agama, yang membuatnya rentan terhadap dimanfaatkannya isu-isu politik identitas.

Tim pemenangan salah satu calon dengan sengaja memunculkan isu-isu politik identitas untuk mendulang suara. Mereka memanfaatkan perbedaan agama antara pasangan calon, yang terdiri dari seorang muslim dan seorang nonmuslim, untuk menggalang dukungan dari basis pemilih dengan memperkuat identitas agama. Isu tentang putra daerah Sumatera Utara juga digunakan sebagai senjata politik, untuk menyerang kredibilitas calon gubernur nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat, yang berasal dari pulau Jawa dan pernah menjabat sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Kecaman terhadap Djarot Saiful Hidayat juga mungkin terkait dengan kontroversi yang melibatkan dirinya dalam kasus penistaan agama bersama Basuki Tjahja Purnama (Ahok) Jakarta pada tahun sebelumnya. Isu ini digunakan untuk merusak citra dan reputasi Djarot di mata masyarakat Sumatera Utara, terutama di kalangan pemilih yang sensitif terhadap isu-isu agama.

Dengan demikian, penggunaan ulama sebagai tokoh politik dan pemanfaatan isu-isu SARA dalam konteks politik Sumatera Utara tahun 2018 menggambarkan bagaimana kepentingan politik dapat memainkan peran yang besar dalam mempengaruhi dinamika pemilihan.

Strategi tidak hanya mempengaruhi arah kampanye dan narasi politik, tetapi berpotensi menciptakan polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan untuk mengedepankan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan inklusi proses politik, serta menghindari pemanfaatan isu-isu sensitif seperti SARA untuk kepentingan politik sempit.

Pemilihan gubernur Sumatera Utara memang tidak terlepas dari isu agama yang menjadi perhatian utama dari kedua pasangan tim pemenang. Meskipun tidak ada deklarasi resmi yang dilakukan oleh organisasi massa yang berbasis agama selama masa kampanye, kedua tim pasangan calon tetap menggunakan isu agama secara halus dalam upaya mereka untuk menggali dukungan. Kedua tim pasangan calon mungkin menggunakan stimulus lebih halus untuk menunjukkan bahwa mereka peduli dengan umat agama tertentu. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai kegiatan kampanye yang diarahkan untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari pemilih berdasarkan afiliasi agama mereka. Misalnya, menghadiri acara keagamaan, kunjungan ke tempat ibadah, atau menyampaikan pesan-pesan yang berpihak kepada umat agama tertentu melalui media sosial atau pertemuan-pertemuan dengan masyarakat.

Strategi ini mungkin dilakukan karena kesadaran akan sensitivitas isu agama di masyarakat Sumatera Utara. Dengan tidak melakukan deklarasi resmi yang terlalu eksplisit, kedua pasangan calon dapat menghindari kontroversi dan polarisasi yang dapat terjadi jika isu agama diangkat secara terang-terangan. Namun, mereka tetap berusaha untuk memperkuat citra mereka sebagai pemimpin peduli dan mendukung umat agama tertentu,

dengan harapan dapat memenangkan dukungan dan suara dari pemilih yang terkait dengan afiliasi agama tersebut. Dengan demikian, meskipun tidak ada deklarasi resmi dari organisasi massa berbasis agama, isu agama tetap menjadi fokus utama dalam kampanye pemilihan gubernur Sumatera Utara, dan kedua pasangan calon berusaha memanfaatkannya secara halus dalam upaya meraih dukungan pemilih. Mencerminkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia, di mana isu-isu agama sering menjadi faktor penting dalam proses pemilihan dan politik secara umum.

Pada pemilihan gubernur Sumatera Utara, proses penggalangan isu dilakukan dengan menciptakan banyak tokoh baru muncul dalam pemandangan politik. Bahkan, beberapa tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat menjadi alat bagi para elit politik untuk meraih respon dari minat pemilih.

Proses penggalangan isu agama yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut satu pada pemilihan gubernur Sumatera Utara menunjukkan kelanjutan dari politisasi identitas yang telah terjadi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Hal ini terutama dilakukan oleh tim pemenang yang melihat peluang dari kehadiran Djarot Saiful Hidayat, yang sebelumnya menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama, yang terlibat dalam kasus penistaan agama.

Upaya menggalang dukungan, tim pemenang pasangan calon nomor urut 1 memanfaatkan momentum dengan menghadiri kegiatan yang bernuansa Islami dan melakukan kunjungan yang berhubungan dengan agama. Mereka berfokus pada kegiatan tausyiah, perwiraan, dan

kunjungan ke tempat-tempat yang terkait dengan agama, seperti pesantren dan ziarah kubur ulama-ulama besar. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat citra pasangan calon nomor urut 1 sebagai pemimpin yang berkomitmen pada nilai-nilai agama dan mendapatkan dukungan dari pemilih sensitif terhadap isu agama. Menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan dan kunjungan ke tempat-tempat suci, tim pemenangan berharap untuk memenangkan hati dan suara pemilih yang peduli akan masalah agama.

Hubungan kekerabatan antara Musa Rajekshah dan Abdussomad tidak terjalin secara baru pada saat pemilihan gubernur Sumatera Utara, melainkan telah ada sejak lama. Kedua keluarga telah memiliki hubungan yang erat sejak zaman kakek mereka, yang keduanya merupakan ulama dan hafidz Quran, dan menimba ilmu agama di Kisaran. Karena hubungan kekerabatan yang kuat ini, Ustadz Abdussomad memiliki niat baik untuk membantu memenangkan pasangan calon nomor urut satu pada pemilihan gubernur Sumatera Utara.

Dalam rangka memanfaatkan dukungan dan potensi dari hubungan kekerabatan ini, tim pemenangan pasangan calon nomor urut satu melihat peluang dan memasukkan agenda ketika Ustadz Abdussomad melakukan safari dakwah di Sumatera Utara. Dalam setiap kesempatan tersebut, calon wakil gubernur nomor urut satu selalu hadir mendukung dan memperkuat hubungan dengan Ustadz Abdussomad serta komunitas terkait dengannya.

Menunjukkan pentingnya jaringan kekerabatan dan dukungan dari tokoh agama dalam politik lokal, serta bagaimana kedekatan personal dan hubungan keluarga memengaruhi dinamika politik dan dukungan pemilih.

Meskipun agenda ini dapat dilihat sebagai strategi politik, niat dari Ustadz Abdussomad untuk mendukung pasangan calon nomor urut satu juga mencerminkan komitmen dalam memilih pemimpin yang dianggap memiliki nilai-nilai dan integritas yang sejalan dengan keyakinan agama.

Musa Rajeckshah, selaku ketua Yayasan Haji Anif, memiliki posisi yang memudahkan tim pasangan calon nomor urut satu dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Melalui yayasan tersebut, pasangan calon nomor urut satu dapat menunjukkan kepedulian mereka terhadap tempat ibadah umat muslim menyelenggarakan pembersihan masjid secara gratis secara rutin. Hal ini mencerminkan komitmen pasangan calon terhadap kebersihan tempat ibadah dan menegaskan bahwa mereka benar-benar peduli terhadap kepentingan umat.

Selain itu, kunjungan pasangan calon nomor urut satu ke pesantren Mustafawiyah di Kabupaten Mandailing Natal, di mana mereka menginap di rumah pemilik pesantren, jadi bagian dari strategi untuk menunjukkan kesederhanaan dan kepedulian terhadap pendidikan agama Islam bagi generasi muda. Ini merupakan upaya untuk membangun citra bahwa pasangan calon tersebut adalah pemimpin dekat rakyat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Tim pasangan calon nomor urut satu, yang dikenal dengan nama ERAMAS, membangun isu bahwa pasangan ini adalah pemimpin yang peduli terhadap umat. Mereka aktif dalam kegiatan bernuansa Islam selama masa kampanye, seperti menghadiri perwiritan, pengajian ibu, kunjungan ke pesantren, dan ziarah kubur di Barus dan Labuhan Batu Utara. Puncak dari penggalangan isu ini terjadi pada tanggal 23 Juni 2018, saat rapat umum

terakhir yang diubah menjadi Dzikir Akbar dengan tema "Doa untuk Sumut Bermartabat". Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh agama seperti Ustadz Abdussomad, Ustadz Zulkarnain, serta mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dalam kesempatan tersebut, seruan diberikan kepada umat muslim untuk memilih pemimpin yang seiman dan sesuai dengan nilai-nilai agama, serta memilih pemimpin yang berasal dari Sumatera Utara.

Sedangkan Proses penggalangan isu agama tidak menjadi fokus utama dari tim DJOSS dalam kampanye mereka pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Meskipun peneliti menyampaikan bahwa etnis dan agama memiliki pengaruh besar dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara, tim DJOSS lebih berorientasi pada program-program dan pendekatan kepada berbagai etnis di Sumatera Utara. Ini tidak berarti bahwa tim DJOSS sama sekali tidak melakukan pendekatan melalui agama selama kampanye pemilihan gubernur Sumatera Utara. Salah satu upaya penggalangan isu yang dilakukan oleh wakil gubernur nomor urut dua, Sihar P. Sitorus, adalah dengan mengunjungi gereja dan Taman Wisata Iman. Tujuannya adalah sama dengan pasangan calon nomor urut satu, yaitu untuk meraih simpati dari masyarakat Kristen di Sumatera Utara. Sihar P. Sitorus berupaya menunjukkan bahwa ia juga peduli terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kristen, sebagaimana pasangan nomor urut satu yang berusaha merebut simpati dari masyarakat muslim. Tidak menutup kemungkinan bahwa calon wakil gubernur dari nomor urut dua juga menghadiri acara-acara buka puasa bersama untuk menunjukkan sikap toleransi dan kedamaian dalam beragama. Hal ini mungkin dilakukan di Padang

Sidempuan bersama Raja Luat sebagai bentuk upaya dari Sihar P. Sitorus untuk menunjukkan sikap inklusif dan perdamaian antaragama dalam masyarakat Sumatera Utara.

Penggalangan isu juga dilakukan oleh Djarot dengan mengunjungi tokoh agama di Labuhan Batu Utara. Namun, gerakan dalam mencari dukungan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dua terbatas pada kunjungan kepada tokoh-tokoh agama. Tidak ada bentuk gerakan yang masif dilakukan, seperti yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut satu, seperti menghadiri acara langsung yang berkaitan dengan agama. Dalam hal ini, posisi yang dilakukan oleh calon gubernur nomor urut dua kurang terlihat secara nyata oleh masyarakat bahwa pasangan calon nomor urut dua juga peduli terhadap umat.

Model politik identitas pada segi etnisitas juga ditekankan dengan menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut satu adalah putra asli Sumatera Utara. Isu yang dibangun oleh tim adalah bahwa Edi Rahmayadi adalah keturunan yang berdarah Melayu-Jawa, sedangkan wakilnya, Musa Rajeckshah, adalah putra kelahiran Sumatera Utara dengan keturunan berdarah Melayu-Pakistan. Pernyataan semacam itu disampaikan untuk meyakinkan masyarakat bahwa Sumatera Utara masih memiliki putra daerah terbaik.

Tim ERAMAS melakukan politik identitas yang berfokus pada agama dengan langkah-langkah strategis. Salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan mendata dai, imam, dan ustadz yang berada di Sumatera Utara melalui Yayasan Haji Anif. Setelah mendata, mereka kemudian melibatkan para dai dan imam masjid

dalam menyampaikan pesan politik kepada jemaah di masjid-masjid. Para dai dan imam masjid diminta untuk menganjurkan kepada jemaah agar memilih pemimpin yang sesuai dengan akidah agama mereka. Selain itu, mereka juga diminta untuk menjelaskan larangan untuk tidak memilih pemimpin yang dianggap kafir. Dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dalam menyampaikan pesan politik, tim ERAMAS dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan pemilih, terutama dari kalangan yang sangat memperhatikan faktor agama dalam memilih pemimpin. ada kegiatan tausyiah atau dzikir akbar, pasangan calon nomor urut dua, yaitu Musa Rajeckshah, secara konsisten hadir untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia benar-benar peduli terhadap kondisi umat. Musa Rajeckshah selalu turut serta dalam kegiatan semacam itu, menegaskan keterlibatannya dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui ranah keagamaan. Selain itu, Musa Rajeckshah juga sering mendampingi Ustadz Abdussomad dalam melakukan safari dakwah di Sumatera Utara. Tindakan ini merupakan upaya konkret untuk mendukung dan memperkuat pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh agama tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, Musa Rajeckshah berusaha membangun citra sebagai pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kepedulian terhadap umat.

Proses politik identitas merupakan strategi umum digunakan dalam kampanye politik untuk memperkuat dukungan dan memenangkan pemilihan. Dua tim, ERAMAS dan DJOSS, masing-masing mengadopsi pola yang berbeda dalam menerapkan politik identitas dalam konteks pemilihan gubernur Sumatera Utara. Tim

ERAMAS mengeksekusi strategi politik identitas dengan pendekatan yang terfokus pada tokoh adat dan agama. Mereka secara aktif berinteraksi dengan tokoh-tokoh adat dan agama di berbagai daerah. Keterlibatan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti safari dakwah bersama Ustadz Abdussomad, acara dzikir akbar, penyediaan fasilitas mobil pembersih masjid, gerakan subuh berjamaah, dan perwiritan. Selain itu, mereka juga terlibat dalam kegiatan adat tradisional untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat setempat.

Tim DJOSS memilih untuk mengeksekusi pola politik identitas dengan fokus pada tokoh adat di berbagai daerah. Mereka terlibat dalam kegiatan adat tradisional dan memperkuat hubungan dengan tokoh-tokoh adat setempat. Namun, dalam hal pendekatan keagamaan, mereka lebih membatasi diri dengan hanya melakukan kunjungan kepada tokoh agama di daerah, tanpa terlibat dalam kegiatan keagamaan yang lebih intens seperti yang dilakukan oleh tim ERAMAS.

Pola politik identitas yang diterapkan oleh kedua tim mencerminkan strategi yang berbeda dalam membangun citra dan mendapatkan dukungan dari pemilih. Tim ERAMAS lebih menekankan pada aspek keagamaan dalam upaya untuk menarik perhatian dan dukungan, sementara DJOSS lebih fokus aspek adat dan tradisional. Kedua tim berusaha untuk memenangkan hati pemilih dengan memanfaatkan identitas lokal dan nilai penting bagi masyarakat Sumatera Utara.

5. Politik Identitas di Kalangan Partai Politik

Partai Ummat tegas menyatakan mengusung strategi politik identitas yang berbasiskan pada agama Islam. Ketua Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menegaskan bahwa politik identitas diusung oleh partainya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang akan mengakui keberagaman. Menurutnya, partai tersebut senantiasa menonjolkan isu-isu keagamaan dan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro terhadap Islam, seperti penghapusan pornografi dan judi, serta penerapan hukum syariah Islam. Pernyataan dan pandangan yang diungkapkan oleh Partai Ummat mengundang kekhawatiran dari sebagian kalangan. Ada yang merasa khawatir bahwa politik identitas berbasis agama Islam yang diusung oleh Partai Ummat dapat memicu polarisasi dan konflik dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia.

Mereka mengkhawatirkan bahwa penonjolan isu-isu keagamaan secara eksklusif dapat mengaburkan prinsip-prinsip inklusi dan kesetaraan dalam pembangunan negara yang pluralis. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa terlalu banyak berfokus pada masalah keagamaan dapat mengalihkan perhatian dari masalah sosial dan ekonomi yang juga sangat penting. Hal ini dapat mengganggu agenda politik dan menghambat kemajuan nasional. Mereka yang mendukung pendekatan politik identitas Partai Ummat menganggapnya sebagai cara untuk mewakili kepentingan dan keinginan masyarakat muslim yang sah dalam sistem politik demokratis. Mereka berpendapat bahwa partai berhak untuk mengadvokasi masalah yang dianggap penting bagi komunitas Muslim, asalkan dilakukan dengan menghormati demokrasi dan keadilan sosial.

Namun demikian, penting bagi Partai Ummat dan pihak-pihak terkait untuk menjaga keseimbangan antara menonjolkan identitas keagamaan dengan menghormati prinsip-prinsip inklusi dan kesetaraan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa upaya-upaya politik identitas tidak menimbulkan ketegangan antar kelompok dan tetap berlandaskan pada semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengamat politik Yunarto Wijaya mengungkapkan keprihatinannya penggunaan simbol identitas politik, dinilai dapat menurunkan kualitas dari proses pemilu dan berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, politik identitas telah menjadi semakin dominan sejak Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta pada 2017, dan fenomena ini terus terjadi dalam Pilpres 2019. Dalam pemilihan presiden 2019, Yunarto mencatat adanya tren panggilan seperti "cebong" bagi pendukung calon presiden Joko Widodo dan "kampret" bagi pendukung Prabowo Subianto. Fenomena ini mencerminkan semakin kuatnya politik identitas dinamika politik Indonesia. Yunarto menilai bahwa era digital memperkuat pengaruh politik identitas ini, karena memudahkan masyarakat untuk terpapar oleh narasi-narasi politik yang berfokus pada perbedaan identitas.

Penggunaan simbol identitas panggilan "cebong" dan "kampret" tidak hanya mencerminkan perbedaan dukungan politik, tetapi juga dapat memperkeruh suasana politik dengan memicu konflik dan polarisasi di antara masyarakat. Yunarto mengingatkan bahwa politik identitas tidak dielaborasi bijak mengaburkan diskusi mengenai isu-isu substansial yang lebih penting bagi pembangunan negara.

Yunarto juga menyoroti peran media sosial dalam menguatkan politik identitas. Era digital memungkinkan penyebaran informasi dan pesan-pesan politik secara cepat dan luas, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya polarisasi dan pertentangan antar kelompok. Dia menekankan perlunya kritisisme dan pemahaman yang lebih mendalam dari masyarakat terhadap informasi yang mereka terima di media sosial, serta pentingnya pendidikan politik yang mempromosikan dialog dan toleransi. Dalam konteks ini, Yunarto mendorong agar politik identitas digunakan secara bijaksana oleh para politisi dan pemimpin masyarakat. Politik identitas seharusnya tidak hanya berfokus pada perbedaan, tetapi juga harus memperkuat persatuan dan kerjasama di antara beragam kelompok masyarakat. Dia menegaskan bahwa kualitas dari proses demokrasi sangat tergantung pada kemampuan masyarakat untuk melihat jauh di luar perbedaan identitas dan fokus pada tujuan bersama dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

BAB VII

KEBIJAKAN ANTISIPASI POLITIK IDENTITAS INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA

1. Kebijakan Antisipasi Pol Identitas Di Indonesia

Politik identitas telah menjadi konsep yang sangat penting dan kontroversial wacana politik kontemporer. Menurut Agnes Haller, politik identitas adalah konsep dan gerakan politik yang berfokus pada perbedaan sebagai klasifikasi politik utama. Pada dasarnya, ide mengenai perbedaan atau keberagaman dalam politik identitas tawarkan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain. Namun, konsep yang tampaknya ideal ini sering kali disalahgunakan hingga menjadi alat untuk memecah-belah masyarakat di suatu negara. Ini merupakan ancaman serius timbul sebagai eksese dari konsep politik identitas.

Dalam teori politik, politik identitas adalah upaya untuk mengakui dan mengangkat kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau tidak diakui dalam masyarakat. Kelompok mencakup berbagai kategori sosial seperti etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain. Tujuan utama dari politik identitas adalah untuk memberikan suara dan kekuatan politik kepada kelompok-kelompok ini, sehingga mereka dapat memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, politik identitas memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Namun, dalam praktiknya, politik identitas sering kali mengarah pada polarisasi dan fragmentasi sosial. Ketika perbedaan diangkat sebagai aspek utama dari politik, hal ini memicu perpecahan di antara berbagai

kelompok dalam masyarakat. Aktor-aktor politik sering kali mengeksploitasi perbedaan ini untuk mendapatkan keuntungan politik. Memanfaatkan sentimen identitas untuk memobilisasi dukungan, sering kali dengan mengorbankan kesatuan sosial. Ini dapat dilihat dalam banyak konteks di seluruh dunia, di mana politik identitas telah menyebabkan konflik etnis, agama, atau sosial yang mendalam.

Di Indonesia, politik identitas juga telah menjadi alat yang digunakan untuk memecah belah masyarakat. Pada Pemilu 2019 dan Pilkada di berbagai daerah, isu-isu identitas berbasis agama dan etnis sering kali digunakan untuk memobilisasi dukungan politik. Misalnya, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, isu agama menjadi pusat perhatian, calon petahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi sasaran serangan berbasis identitas agama. Kampanye berhasil mobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga menyebabkan ketegangan sosial yang signifikan.

Ancaman dari politik identitas tidak hanya terletak pada potensinya untuk memecah belah masyarakat, tetapi juga pada kemampuannya untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak dan substantif. Ketika politik identitas mendominasi wacana politik, isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi, korupsi, dan perubahan iklim sering kali terpinggirkan. Politik identitas sering kali digunakan sebagai alat distraksi, di mana politisi memfokuskan perhatian pada perbedaan identitas untuk menghindari tanggung jawab atas kegagalan mereka dalam menangani isu yang lebih kompleks dan mendesak. Menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh politik identitas, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan

komprehensif. Pertama, penting untuk mengakui dan menghormati perbedaan identitas dalam masyarakat. Namun, pengakuan ini harus diiringi dengan upaya untuk membangun kesatuan dan solidaritas sosial. Pendekatan mengutamakan dialog dan kerjasama antar kelompok identitas dapat membantu mengurangi polarisasi dan membangun kepercayaan. Kedua, pendidikan politik yang baik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik identitas yang divisif. Masyarakat perlu dididik tentang pentingnya memilih berdasarkan kualifikasi dan program kerja calon, bukan semata-mata berdasarkan identitas mereka. Pendidikan politik yang menekankan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan inklusivitas dapat membantu menciptakan pemilih yang lebih kritis dan rasional. Ketiga, media juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang politik identitas. Media harus bertanggung jawab dalam peliputan isu-isu identitas, dengan menghindari sensasionalisme dan penyebaran kebencian. Media yang bertanggung jawab membantu mengurangi ketegangan sosial dengan menyediakan informasi yang akurat dan berimbang. Keempat, lembaga demokrasi seperti KPU dan Bawaslu harus terus mengawasi dan menegakkan aturan yang mencegah penyalahgunaan politik identitas dalam kampanye politik. Kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, dapat memperkuat upaya ini.

Akhirnya, perlu ada komitmen dari semua pihak, termasuk politisi, pemimpin komunitas, dan masyarakat luas, untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan identitas sempit. Hanya dengan cara ini, kita menghindari ancaman yang timbul oleh politik identitas

dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis. Keseluruhan, politik identitas merupakan fenomena yang kompleks dengan potensi baik dan buruk. Sementara ia dapat memberikan suara kepada kelompok yang terpinggirkan dan mempromosikan keberagaman, ia dapat menjadi alat untuk memecah belah masyarakat dan mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substantif. Oleh karena itu, penting untuk mengelola politik identitas dengan bijaksana, memastikan bahwa ia digunakan untuk mempromosikan inklusivitas dan kesatuan, perpecahan dan konflik.

Efek negatif dari penerapan politik identitas yang salah kaprah sangat berbahaya dan merusak tatanan sosial. Dampak paling mencolok adalah lahirnya rasisme, biofeminisme, dan konflik etnis, fenomena yang ironisnya justru berlawanan dengan tujuan awal politik identitas yang ingin menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan berbasis identitas.

Politik identitas, pada dasarnya, adalah gerakan yang bertujuan untuk mengakui dan memperjuangkan hakkelompok terpinggirkan. Namun, penerapannya tidak tepat, ia bisa menjadi alat yang memperkuat stereotip negatif dan prasangka antar kelompok. Hal ini terlihat dalam fenomena rasisme atau "race thinking," di mana politik identitas salah digunakan untuk membenarkan pandangan superioritas satu kelompok rasial terhadap kelompok lainnya. Alih-alih menciptakan kesetaraan dan penghormatan antarras, politik identitas disalahgunakan memperdalam jurang perbedaan dan memicu diskriminasi rasial yang lebih tajam.

Biofeminisme adalah bentuk lain dari efek negatif politik identitas yang disalahgunakan. Biofeminisme, dalam konteks ini, merujuk pada upaya untuk mengaitkan peran sosial dan politik perempuan dengan sifat biologis mereka. Pandangan mengabaikan kompleksitas identitas gender dan berisiko memperkuat stereotip gender tradisional yang justru ingin diatasi oleh gerakan feminis. Politik identitas yang keliru bisa mempersempit ruang gerak perempuan dengan menempatkan mereka dalam kotak identitas biologis kaku, sehingga menghambat perjuangan untuk kesetaraan gender yang sesungguhnya.

Konflik etnis adalah dampak lain yang sering kali muncul dari penerapan politik identitas yang salah. Politik identitas memperkuat solidaritas dan kerjasama antar kelompok, dapat memicu persaingan dan permusuhan. Ketika identitas etnis digunakan sebagai alat politik untuk memobilisasi dukungan, sering kali terjadi eksklusi dan demonisasi terhadap kelompok lain. Hal ini dapat memicu ketegangan antar kelompok etnis yang berujung pada konflik sosial berkepanjangan. Sejarah penuh dengan contoh bagaimana konflik etnis yang dipicu oleh politik identitas telah menyebabkan kekerasan, pengungsian, dan trauma kolektif bagi masyarakat yang terlibat.

Akibat dari kesalahan dalam menerapkan politik identitas ini, berbagai bentuk intoleransi dan praktik-praktik kekerasan pun terjadi. Intoleransi muncul ketika kelompok rasa superior dan berhak mendiskriminasi kelompok lain berdasarkan identitas mereka. Ini bisa terjadi dalam bentuk diskriminasi rasial, gender, agama, atau etnis. Kekerasan menjadi alat yang digunakan untuk menegaskan dominasi satu kelompok atas kelompok lain, dalih mempertahankan identitas kelompok. Praktik

kekerasan ini tidak hanya menghancurkan kehidupan individu tetapi juga merusak jalinan sosial yang menjadi dasar masyarakat yang damai dan harmonis.

Heller dan Riekmann (1996) menyoroti bahwa politik identitas salah kaprah dapat menjadi katalisator bagi praktik kekerasan. Ketika identitas digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan politik, ia dapat memicu konflik yang melibatkan kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan ini dapat berupa penganiayaan, pembunuhan, penindasan sistematis, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya ditujukan untuk menegakkan dominasi identitas. Dalam situasi seperti ini, politik identitas bukan lagi alat untuk mencapai keadilan sosial, tetapi menjadi senjata untuk mempertahankan kekuasaan dan menindas kelompok lain.

Dalam kondisi masyarakat memiliki keragaman identitas dan entitas-entitas yang bervariasi secara luas, politik perbedaan eksis dengan kuat. Situasi ini biasanya didukung oleh kehidupan berbangsa yang multikultural dan multietnik, di mana berbagai kelompok suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dalam satu kesatuan negara. Keragaman ini merupakan kekayaan yang harus dihargai dan dijaga, namun juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Mahfud MD berpendapat bahwa politik identitas pada dasarnya bukanlah masalah selama tidak digunakan untuk menyerang atau merugikan pihak lain. Menurutny, setiap orang memang memiliki identitas politik yang sah untuk digunakan sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun, penggunaan politik identitas harus dijaga agar tidak melampaui batas-batas etika dan hukum, khususnya yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan

Antar-golongan). Mahfud MD menekankan pentingnya menjaga agar identitas politik tidak dijadikan alat untuk mendiskriminasi, menyudutkan, atau bahkan membasmi kelompok lain.

Sebagai Menkopolkam RI, Mahfud MD juga secara tegas melarang penggunaan tempat-tempat ibadah, seperti masjid, untuk ceramah politik yang bertujuan mengarahkan jemaah ke politik praktis tertentu. Ia menilai bahwa ceramah politik di masjid yang menyerukan agar jemaah tidak memilih calon tertentu adalah tindakan yang tidak pantas dan merusak kesucian tempat ibadah sebagai ruang spiritual yang seharusnya netral dan bebas dari kontestasi politik.

Pandangan Mahfud MD ini sejalan dengan upaya menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Indonesia yang multikultural dan multireligius. Dalam konteks ini, politik identitas dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa semangat demokrasi hidup tanpa mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bijak dalam berpolitik dan menjaga etika, integritas dalam menggunakan identitas politik, terutama di ranah publik dan tempat ibadah.

Secara konseptual, politik identitas tidaklah salah jika dipraktekkan, terutama dalam konteks negara yang multikultur dan multi-etnis seperti Indonesia. Identitas suku dan agama sering kali menjadi faktor penarik minat pemilih dalam suatu pemilu. Hal ini disebabkan oleh kenyataan masyarakat cenderung memilih berdasarkan preferensi kehidupan pribadi, meliputi identitas etnis dan keyakinan agama. Dalam sistem demokrasi, kebebasan untuk memilih sesuai dengan preferensi pribadi adalah hak fundamental yang harus dihargai.

Namun, masalah muncul ketika politik identitas bertransformasi atau ditransformasikan menjadi politik kebencian. Ini bisa terjadi baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Ketika identitas digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat, memicu prasangka, atau bahkan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain, maka politik identitas mulai merusak tatanan sosial yang harmonis. Alih-alih menjadi sarana untuk representasi dan inklusi, politik identitas yang dimanfaatkan kebencian dapat menimbulkan konflik dan ketegangan sosial.

Transformasi politik identitas jadi politik kebencian dapat terlihat melalui kampanye yang mengandung pesan-pesan diskriminatif, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian menjelekkan atau mengintimidasi kelompok lain. Dilakukan untuk memobilisasi dukungan dengan cara tidak sehat dan merusak integritas proses demokrasi. Sebagai akibatnya, masyarakat menjadi terpolarisasi dan hubungan antar kelompok menjadi tegang. Manajer Riset dan Program oleh The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu melakukan upaya preventif mencegah penyalahgunaan politik identitas dalam Pemilu 2024:

Pertama, Untuk menata peraturan kampanye yang bersifat luring maupun daring, perlu ditegaskan dengan jelas bahwa penggunaan politik identitas berbasis SARA dalam muatan kampanye dilarang secara tegas. Dapat dilakukan dengan merumuskan aturan yang mengatur secara rinci tentang larangan penggunaan isu identitas SARA setiap bentuk kampanye, baik dalam pertemuan tatap muka (luring) maupun dalam kampanye digital

(daring). Ditetapkan definisi tentang politik identitas berbasis SARA dalam konteks regulasi kampanye.

Definisi ini harus mencakup berbagai bentuk pesan atau narasi kampanye yang mengaitkan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan dengan tujuan untuk memengaruhi dukungan pemilih. Selanjutnya, dalam aturan kampanye, harus disertakan larangan yang tegas terhadap penggunaan politik identitas berbasis SARA. Peserta kampanye, baik calon maupun tim kampanyenya, harus dilarang secara eksplisit untuk menggunakan isu-isu identitas SARA dalam bentuk komunikasi kampanye, termasuk pidato, spanduk, baliho, media sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, perlu ditetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan. Sanksi harus mencakup berbagai tingkatan, dari peringatan, denda, hingga diskualifikasi atau pembatalan hasil pemilihan bagi peserta kampanye yang terbukti melanggar larangan politik identitas berbasis SARA. Penting untuk menetapkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif guna memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Selain sanksi, penguatan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat juga perlu diperkuat. Pendidikan politik yang menyeluruh dan inklusif harus diberikan kepada seluruh elemen masyarakat, baik peserta pemilu maupun pemilih, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghindari politik identitas berbasis SARA dan memilih berdasarkan program dan visi-misi calon. Dengan aturan tegas dan memberlakukan sanksi yang berdampak, serta melalui pendidikan politik yang menyeluruh, diharapkan dapat diciptakan lingkungan kampanye yang sehat dan berintegritas, mendorong terciptanya proses pemilihan yang lebih adil, transparan, dan demokratis.

Kedua, Penting untuk mendorong Polri untuk menegakkan hukum terhadap kelompok maupun individu yang menyebarkan ujaran kebencian berbasis politik identitas, serta yang melakukan tindakan intoleransi pada masa kampanye Pemilu dan Pilkada 2024. Upaya ini perlu didukung dengan langkah konkret yang menguatkan penegakan hukum dan pencegahan tindakan-tindakan yang merusak stabilitas sosial dan politik negara. Polri perlu melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap aktivitas di media sosial dan platform online lainnya. Dengan memantau konten-konten yang tersebar, Polri dapat mengidentifikasi potensi ujaran kebencian atau tindakan intoleransi yang berkaitan dengan politik identitas. Langkah ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan penggunaan teknologi untuk deteksi dini. Selain itu, Polri harus memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku-pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencakup berbagai bentuk, mulai dari peringatan hingga tindakan hukum yang lebih serius, seperti penuntutan pidana. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan memberikan efek jera bagi para pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat.

Ketiga, Mendorong penyelenggara pemilu untuk bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil dalam memberikan literasi digital kepada masyarakat adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan politik identitas. Dalam era digital yang semakin maju, informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas melalui berbagai platform media sosial. Literasi digital akan membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam memilah informasi,

terutama yang berkaitan dengan penggunaan politik identitas dalam kampanye pemilu dan pilkada mendatang. Upaya ini harus mencakup pendidikan mengenai cara mengenali berita palsu, propaganda, dan ujaran kebencian yang sering kali memanfaatkan sentimen identitas untuk memecah masyarakat. Masyarakat dapat menjadi lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, sehingga dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan lebih sehat dan konstruktif. Kerja sama antara penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil juga penting untuk memastikan bahwa literasi digital menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil, guna menciptakan pemilu yang lebih adil dan bebas dari manipulasi politik identitas yang destruktif.

Pandangan Arfianto Purbolaksono mengenai tindakan tegas penggunaan politik identitas dalam pemilu merupakan gagasan ideal. Namun, implementasi gagasan tersebut dihadapkan pada sejumlah kendala hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Bab 2 yang mengatur mengenai Pengawas Pemilu, tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang pelanggaran politik identitas. Bab ini memuat aturan mengenai pelanggaran teknis penyelenggaraan pemilu, dengan penekanan khusus pada pelanggaran terkait politik uang. Pasal 95 huruf a, misalnya, menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, namun tidak memberikan definisi jelas atau sanksi yang spesifik untuk pelanggaran berkaitan dengan politik identitas.

Politik identitas, yang sering kali memanfaatkan perbedaan agama, suku, dan ras untuk keuntungan politik, masih belum mendapatkan perhatian yang serius dalam regulasi pemilu di Indonesia. Padahal, penggunaan politik identitas ini dapat berdampak serius pada integrasi sosial dan stabilitas politik negara. Seperti yang kita lihat dalam beberapa pemilu sebelumnya, politik identitas dapat memecah belah masyarakat, menciptakan polarisasi, dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk mengatasi kekosongan regulasi ini.

Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan pemilu sebenarnya memiliki wewenang yang cukup luas untuk menindaklanjuti berbagai bentuk pelanggaran. Namun, tanpa adanya definisi yang jelas dan aturan yang spesifik mengenai politik identitas, upaya penindakan menjadi kurang efektif. Hal ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi, Bawaslu diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan tegas, namun di sisi lain, mereka terikat oleh keterbatasan aturan yang ada.

Dalam konteks ini, langkah pertama yang perlu diambil adalah merevisi Undang-Undang Pemilu untuk memasukkan definisi dan sanksi yang jelas mengenai pelanggaran politik identitas. Revisi ini harus mencakup berbagai bentuk penggunaan politik identitas, mulai dari kampanye yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) hingga ujaran kebencian yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, Bawaslu akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran tersebut. Selain itu, pemerintah dan legislatif juga perlu memperkuat regulasi lain yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan diskriminasi. Saat ini, UU KUHP Pasal 243

ayat 1 mengatur mengenai ujaran kebencian, namun implementasi masih kurang optimal. Perlu ada koordinasi yang lebih baik antara Bawaslu, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa pelanggaran terkait politik identitas dapat ditindak dengan tegas dan cepat.

Dari sisi regulasi, pendidikan politik masyarakat juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah politik identitas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif dari politik identitas dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik ini bisa dilakukan melalui berbagai program sosialisasi, seminar, dan diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi. Kerja sama dengan kelompok masyarakat sipil juga sangat penting dalam upaya ini. Kelompok ini dapat membantu dalam menyebarkan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik identitas. Mereka juga bisa berperan sebagai pengawas independen yang melaporkan adanya indikasi penggunaan politik identitas dalam kampanye pemilu. Partai politik juga harus berkomitmen untuk tidak menggunakan politik identitas dalam kampanye mereka. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan opini publik, sehingga komitmen mereka untuk menjalankan kampanye yang bersih dan bebas dari unsur SARA sangat dibutuhkan. Partai politik juga harus mengedepankan isu-isu yang lebih substansial seperti program pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat dalam kampanye.

Untuk mendukung upaya tersebut, media massa juga harus berperan aktif dalam memberikan informasi yang objektif dan berimbang. Media memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk opini publik, sehingga pemberitaan yang sensasional dan provokatif terkait isu-isu SARA harus dihindari. Media juga harus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menolak politik identitas dan mendukung kampanye yang akan bersih dan konstruktif. Dalam jangka panjang, pengembangan identitas nasional yang kuat harus menjadi prioritas. Identitas nasional yang kuat akan membuat masyarakat lebih fokus pada persamaan mereka sebagai warga negara Indonesia, daripada perbedaan suku, agama, atau ras. Masyarakat akan lebih sulit terpengaruh oleh kampanye politik identitas yang memecah belah. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan bersifat inklusif dan merata, sehingga tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan. Kesetaraan dalam pemberian layanan sosial, akses pendidikan, dan kesempatan ekonomi harus menjadi target utama. Tata kelola yang baik dan transparansi juga sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik.

Dalam hal ini, reformasi birokrasi juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pejabat pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Korupsi dan nepotisme harus diberantas, dan penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah dan lebih mendukung upaya-upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pada akhirnya, upaya untuk

mengatasi politik identitas memerlukan komitmen dan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, partai politik, media, dan masyarakat sipil. Hanya dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis, serta menjaga integrasi nasional dan stabilitas politik di Indonesia. Upaya ini bukan hanya penting untuk pemilu 2024, tetapi juga untuk masa depan demokrasi dan keberlanjutan pembangunan negara kita.

Untuk menangani masalah pelanggaran pemilu yang bersifat politik identitas, khususnya yang disalahgunakan, diperlukan pendekatan yang lebih tepat dengan fokus pada esensi dari politik identitas itu sendiri, yaitu ujaran kebencian yang terkait dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyentuh masalah ini, khususnya pada Pasal 280 ayat 1 huruf (c) yang melarang penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya, serta huruf (d) yang melarang hasutan dan adu domba terhadap perseorangan atau masyarakat. Selain itu, UU KUHP Pasal 243 ayat 1 juga mengatur tentang ujaran kebencian, yang mencakup pernyataan perasaan permusuhan yang ditujukan agar diketahui umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang.

Dasar hukum menanggulangi penyalahgunaan politik identitas sebenarnya sudah cukup kuat. Langkah selanjutnya yang perlu didorong adalah keberanian Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menetapkan

apakah pelanggaran pemilu termasuk ujaran kebencian/tidak. Bawaslu kewenangan untuk mengklasifikasikan jenis pelanggaran sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu. Apabila pelanggaran pemilu yang mengandung unsur ujaran kebencian, maka itu merupakan pelanggaran pemilu berbasis politik identitas. Adanya komitmen tegas dari Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran yang berkaitan dengan ujaran kebencian, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan politik identitas dalam Pemilu 2024 dapat diminimalisasi.

2. Antisipasi Politik Identitas di Berbagai Negara

Contoh mencolok adalah situasi politik di banyak negara di mana politik identitas berbasis etnis atau agama digunakan untuk memecah belah masyarakat. Di India, misalnya, politik identitas berbasis agama telah menjadi alat yang kuat untuk memobilisasi dukungan politik. Partai-partai politik menggunakan sentimen agama untuk menarik dukungan dari kelompok, dengan mengorbankan kelompok lain. Hal ini menyebabkan ketegangan dan kekerasan antaragama yang berulang kali terjadi.

Di Amerika Serikat, politik identitas telah menjadi isu yang polarizing. Dalam beberapa dekade terakhir, politik identitas berbasis ras dan gender telah menjadi pusat perdebatan politik. Meskipun gerakan-gerakan seperti Black Lives Matter dan gerakan hak perempuan telah berhasil mengangkat isu-isu penting mengenai kesetaraan dan keadilan, mereka juga telah memicu reaksi balik dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh perubahan sosial yang cepat. Ini telah menyebabkan polarisasi yang mendalam dalam politik Amerika, dengan dampak yang signifikan pada stabilitas sosial dan politik.

1) Antisipasi Politik Identitas di Negara Nigeria

Selain India dan Amerika, Nigeria juga merupakan negara yang mencolok dalam mengatasmakan politik identitas. Politik identitas di Nigeria telah memainkan peran yang signifikan dalam membentuk dinamika sosial dan politik negara tersebut. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1960, Nigeria telah menghadapi tantangan besar dalam upaya untuk membangun identitas nasional yang kohesif dan integrasi nasional yang stabil. Aktivitas para elit politik, dengan menggunakan berbagai kelompok etnis dan agama sebagai basis kekuatan politik mereka, meletakkan dasar bagi menguatnya dikotomi kelompok etnis yang memperkuat rasa saling tidak percaya, curiga, dan takut di antara kelompok-kelompok tersebut.

Elit politik di Nigeria menggunakan politik identitas sebagai alat mengkonsolidasikan kekuasaan. Mereka memanfaatkan perbedaan etnis dan agama memperoleh dukungan politik. Dalam konteks ini, elit politik sering kali mempolarisasi masyarakat dengan mengadu domba satu kelompok melawan kelompok lainnya. Strategi ini tidak hanya efektif dalam jangka pendek untuk memenangkan pemilu, tapi menciptakan kondisi mendukung mempertahankan kekuasaan jangka panjang. Namun, dampak terhadap integrasi nasional merusak.

Raheem dkk. menegaskan bahwa kesenjangan regional yang sangat besar di Nigeria telah berkembang selama periode seratus tahun dari 1861 hingga 1960. Ketimpangan ini telah menciptakan kecenderungan terjadinya agitasi oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan, yang dapat ditelusuri dari aktivitas kumulatif elite penguasa. Chukwuma dkk. berpendapat bahwa politik identitas bukanlah fenomena baru, karena politik

sejak awal selalu didasarkan pada identitas. Identitas menjadi dasar dari setiap keputusan politik di negara maju maupun berkembang, menjadikan politik identitas sebagai titik tumpu sejarah pemerintahan manusia. Odeyemi menyimpulkan bahwa kegagalan berbagai kelompok suku dalam menegosiasikan penggabungan mereka adalah akar dari banyak perselisihan dan agitasi suku, etnis, serta seruan marginalisasi, keserakahan, kontroversi, sensus yang tidak meyakinkan, kecurangan dalam pemilu, stagnasi pertumbuhan ekonomi, dan nepotisme di Nigeria, bukan hanya karena wilayahnya yang luas dan beragam.

Namun, tidaklah adil untuk menyatakan bahwa para elit politik sepenuhnya tidak menyadari tantangan terhadap integrasi nasional dan tidak melakukan upaya untuk mengatasinya. Misalnya, berbagai langkah telah diambil di Nigeria untuk menghadapi tantangan-tantangan. Langkah terpuji meliputi pembentukan negara bagian dan pelembagaan penggunaan lahan untuk memperkuat persatuan nasional; pembentukan Korps Layanan Pemuda Nasional (NYSC) mempromosikan interaksi antar lulusan; penerapan Prinsip Karakter Federal untuk keterwakilan yang adil dalam posisi kekuasaan; relokasi Wilayah Ibu Kota Federal dari Lagos ke Abuja; penyesuaian formula bagi hasil untuk meredakan kekerasan di Delta Niger yang kaya minyak; Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi; pendirian Sekolah Persatuan; dan pengenalan sistem Pemerintahan Daerah yang seragam di Nigeria.

Selain tidak sepenuhnya benar untuk menyatakan bahwa elit politik tidak menyadari tantangan terhadap integrasi nasional dan tidak berusaha mengatasinya. Misalnya, berbagai langkah telah diambil di Nigeria untuk menangani tantangan-tantangan ini. Beberapa langkah tersebut meliputi pembentukan negara bagian dan penetapan penggunaan lahan, memperkuat persatuan nasional; pembentukan Korps Layanan Pemuda Nasional (NYSC) untuk mempromosikan interaksi antar lulusan; penerapan Prinsip Karakter Federal untuk memastikan keterwakilan adil dalam posisi kekuasaan; pemindahan Ibu Kota Federal dari Lagos ke Abuja; penyesuaian formula bagi hasil untuk mengurangi kekerasan di Delta Niger yang kaya minyak; Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi; pendirian Sekolah Persatuan; dan pengenalan sistem Pemerintahan Daerah yang seragam di Nigeria. Dalam mengantisipasi politik identitas di Nigeria dapat di tempuh melalui beberapa Langkah sebagai berikut:

Langkah Pertama untuk mengatasi kesenjangan dan politik identitas Nigeria adalah dengan mengidentifikasi masalah yang ada. Setelah menelusuri sejarah politik identitas hingga periode penggabungan dengan Inggris, masuk akal untuk merekomendasikan negosiasi ulang mengenai eksistensi kolektif negara. Perlu diadakan konferensi untuk memutuskan apakah kelangsungan hidup sebagai satu bangsa masih relevan. Kesempatan ini harus digunakan untuk menetapkan persyaratan persatuan nasional yang mungkin terabaikan sejak tahun 1914. Dalam konteks ini, penting untuk mengatasi keluhan dari berbagai kelompok identitas dengan menciptakan lingkungan menghargai keberagaman. Rekomendasikan restrukturisasi tatanan Nigeria menuju kesatuan yang

lebih kokoh, di mana pandangan, tuntutan, pilihan, impian, budaya, dan aspirasi dari semua kelompok dapat diwakili dalam sebuah konferensi konstitusi baru yang mencerminkan kesepakatan semua peserta. Langkah ini akan mengubah narasi yang menyalahkan eksperimen Inggris pada tahun 1914.

Langkah Kedua, Diperlukan orientasi yang luas untuk mengatasi konflik yang telah tumbuh di Nigeria, yang berasal dari sejarah kelompok etnis nasionalis yang bermusuhan, dan untuk memperbaiki dampak negatifnya yang masih terasa sejak tahun 1914. Fokus utama dari upaya reorientasi ini harus ditujukan kepada generasi muda Nigeria yang telah dipengaruhi oleh politik identitas dan retorika disintegratif. Di Nigeria, terdapat 774 Wilayah Pemerintahan Daerah yang perlu mendirikan dan mendanai lembaga kepemimpinan. Menekankan pada generasi muda Nigeria tentang relevansi lembaga ini dalam memperbaiki kondisi sosial dan politik, dengan tujuan akhir mencapai integrasi nasional.

Langkah Ketiga, Kultur tanggung jawab ekonomi, politik, dan administratif harus ditanamkan di semua instansi pemerintah, baik di tingkat lokal, negara bagian, maupun federal di Nigeria. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi yang merajalela. Korupsi tersebut terkait dengan persepsi manfaat politik yang diperoleh oleh berbagai kelompok identitas, yang memicu persaingan kompetitif di dalam politik Nigeria. Dengan mengurangi insentif tersebut, politik akan menjadi kurang menarik bagi elit politik yang korup. Pemerintah juga perlu memberikan penekanan serius pada sistem prestasi daripada sistem kuota yang saat ini dominan dalam penerimaan di sekolah Unity dan dalam penunjukan di

berbagai lembaga pemerintah. Lebih dari itu, sebaiknya fokus lebih diberikan pada negara tempat tinggal daripada asal usulnya di Nigeria. Tindakan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan yang terjadi akibat separatisme dan politik identitas, serta mendorong terbentuknya identitas nasional yang lebih Bersatu.

Lanjutan dari hal diatas, Hal yang perlu ditekankan adalah pengembangan identitas nasional menempatkan penekanan bukan lagi pada identifikasi dengan keluarga, suku, atau agama, melainkan pada kesetiaan terhadap negara sebagai anggota suatu bangsa. Dengan demikian, individu diharapkan tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari komponen-komponen internal negara, tetapi sebagai warga negara Nigeria yang utuh. Jika seseorang memiliki rasa cinta dan loyalitas terhadap negaranya serta bersedia mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan nasional, maka patriotisme akan berkembang dan usaha mencapai integrasi nasional akan berhasil. Perbaikan tata pemerintahan dan pemerataan harus menjadi fokus utama. Tantangan-tantangan seperti politik identitas, krisis etnis, marginalisasi, konflik bersenjata, dan ancaman disintegrasi nasional, yang sebagian besar disebabkan oleh tata kelola yang buruk, harus diatasi. Negara yang terjebak dalam tata kelola yang buruk menjadi ladang subur bagi kemiskinan, kejahatan bersenjata, penculikan, gerakan militan, pemberontakan, pembersihan etnis, dan terorisme, yang saat ini menjadi masalah serius di Nigeria. Pemerintah harus memastikan pemberian layanan sosial yang merata kepada masyarakat melibatkan organisasi masyarakat sipil.

Langkah Keempat, Federalisme Nigeria hadapi sejumlah masalah, termasuk kekurangan federalisme fiskal, kurang produktifnya beberapa negara bagian, sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, dan kekurangan keberadaan polisi negara bagian. Selain itu, federalisme di Nigeria belum berhasil memastikan integrasi nasional sekaligus mempromosikan pemerintahan lokal. Oleh karena itu, perhatian yang serius harus diberikan pada pengalihan kekuasaan kepada unit-unit konstituen agar mereka dapat menjadi lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, dengan federalisme fiskal menjadi fokus utamanya. Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan praktik federalisme secara efektif dengan memfasilitasi dialog menyeluruh antara berbagai kelompok etnis di negara tersebut. Selain itu, distribusi sumber daya yang adil antara unit-unit federasi dan desentralisasi kekuasaan juga harus diperhatikan. Prinsip penentuan nasib sendiri dan potensi pembentukan lebih banyak negara bagian harus didorong menciptakan federasi yang seimbang dan mendorong perkembangan dari bawah ke atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y. F. (2022). Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran* <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4868/>
- Al-Farisi, L. S. (2020). Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila. *Aspirasi*. <http://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/54>
- Anam, H. F. (2019). Politik identitas Islam dan pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA*. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/view/5953>
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik* <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/1582>
- Asshiddiq, A. I. (2024). Konflik Etnis Di Myanmar: Dari Kontestasi Politik Identitas Hingga Genosida. ... *Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik* <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/13547>
- Bareilly, A. M., Muhammad, M., Kambo, G. A., & ... (2021). The Political Identity of Ethnicity in the

- Local Election of Makassar City 2018. *Journal of*
<https://pustaka.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/12719>
- Efendi, D., & Suswanta. (2017). Politics of Education: Multiculturalism Practice in Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT. *Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices*, 1(1), 47–72.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/iseedu/article/view/5420>
- Fautanu, I., Buhori, M., & Gunawan, H. (2020). Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. *Politicon*. <https://etheses.uinsgd.ac.id/35053/>
- Habibi, M., & Suswanta, S. (2019). Politics Discretionary Fund Budget of Regional Income and Expenditure Before and Election in 2015 in Samarinda City. *Journal of Governance and Public Policy*, 6(1).
<https://doi.org/10.18196/jgpp.61106>
- Harsono, H. (2023). Politik identitas dan partisipasi politik di media sosial: Analisis model struktural pada generasi Z di Kota Malang. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola*
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3482872>
- Hutapea, E. K., Santoso, P., Alexandra, H. F. S., & ... (2023). Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024. *Jurnal*
<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4811>
- Ihsan, A. B., & Nurhayati, C. (2020). *Agama, Negara dan*

- Masyarakat: Tokoh Agama ditengah Politik Identitas Warga Kota.* repository.uinjkt.ac.id.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54438>
- Indrawan, J., Rahmawati, R., Ilmar, A., & ... (2023). Ancaman Politik Identitas Bagi Pemilihan Umum Tahun 2024. ... *Hukum Dan Politik.*
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/download/8214/4524>
- Khoirunnisa, K. (2023). PEMILU DAN POLITIK IDENTITAS: DILEMA ANTARA KEBANGSAAN DAN KEAGAMAAN. *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK*
<https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/6999>
- Kiftiyah, A. (2019). Upaya rekonsiliasi politik identitas pasca pelaksanaan pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan.*
<http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/59>
- Kusyadi, K., Jufri, M., & Yadi, J. (2022). Dinamika posisi identitas Etnis Tionghoa di Tanjungpinang dalam tinjauan teori identitas sosial. *Nautical: Jurnal Ilmiah*
<https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/article/view/453>
- Liadi, H. F., & Erawati, D. (2020). *POLITIK IDENTITAS PADA PILKADA KALIMANTAN TENGAH: Tatapan Mata Warga Bakumpai terhadap Pilkada Kalimantan Tengah.* books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=lQvyDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=>

PP1%5C&dq=politik+identitas%5C&ots=7_wVM
ZxYZU%5C&sig=fFgocMy1AdkAS2KfDS75NX
WqY1Y

- Maulana, A. Z., Nababan, M. R., & ... (2020). Evaluative Language Maintenance and Shift on Vice-Presidential Candidates Reportage: Translation Analysis of â€˜The Conversationâ€™TM Political News. *Script Journal: Journal of ...*
<https://jurnal.fkip-uwgm.ac.id/index.php/Script/article/view/562>
- Mubarok, S. (2023). Akar Politik Identitas di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and ...*
<http://journal.insiera.org/index.php/jisiera/article/view/40>
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, politik identitas, dan dinamika elektoral: mengurai jalan panjang demokrasi prosedural*. repository.uinjkt.ac.id.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54388/2/Peer Review 024.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54388/2/Peer%20Review%20024.pdf)
- Mujab, S., & Irfansyah, A. (2020). Komunikasi Politik Identitas KH Ma'ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*.
<http://www.warta-iski.or.id/index.php/WartaISKI/article/view/46>
- Prasetyo, H., Rosa, D. V., & Sari, R. (2023). Beradab Dengan Adat: Politik Identitas Dalam Ritualitas Agama Masyarakat TenggeR. *Prosiding Konferensi Nasional*
<https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/101>
- Renhoard, J. M. (2019). Politik Identitas Era Orde Baru

- Di Indonesia Memasuki Era Reformasi. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*. <https://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/111>
- Rif'an, F. A. (2020). Politik identitas dan perilaku pemilih pada Pilpres 2019: Studi di kota Palembang Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/view/8499>
- Rozi, S., Noor, F., Gayatri, I. H., & Pabottingi, M. (2021). *Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=8IU_EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=politik+identitas%5C&ots=lKuSO46a-z%5C&sig=S53sc-4NY5pjJNQXc4q_14JwAEM
- Said, R. W. (2023). Fenomena Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/view/233>
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1052>
- Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi isu politik identitas terhadap identitas politik pada generasi milineal indonesia di era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities*.

- <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/5223>
- Sujito, A. (2022). Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila*. <https://journal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/79923>
- Sulaksono, T., Sungkawa, J. D., Suswanta, S., & Sutan, A. J. (2023). Political Recruitment and Party Institutionalization: PDIP's Internal Tension in the 2020 Surakarta Mayoral Election. *Journal of Local Government Issues*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.23121>
- Suswanta. (2018). Reconsidering the Stigma of Political Opportunism Among the Kiai: A Critique of the Modernist Perspective. *Preventing Chronic Disease*, 6(1), 147–172. <https://doi.org/10.22146/PCD.36149>
- Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu, Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*. <http://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/228>
- Tayibnapis, R. G., & Aladdin, Y. (2023). Analisis Bibliometrika Politik Identitas Anies Baswedan Pada Studi Media Komunikasi. *COMMENTATE: Journal of ...*. <https://journal.lspr.edu/index.php/commentate/article/view/529>
- Toulwala, R. B., & Meo, E. N. (2023). Praktik Politik Identitas Etnis dan Perannya dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

- Triantoro, D. A. (2019). Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/1495>
- Ukhra, A., Hijri, Y. S., & ... (2021). Isu Politik Identitas dan Dinasti Politik dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2561247>
- Widjaja, P. S., Wibowo, D. P. A., & ... (2021). Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik. ... *Teologi Kontekstual Dan* <http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gemateologika/article/view/658>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., & ... (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal*
<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/419>